



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



KAJIAN FISKAL REGIONAL

Kalimantan Barat



TRIWULAN II
TAHUN 2023





Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Kukuh Sumardono Basuki

Ketua Tim

M. Purwanto

Penulis & Penyaji Data

Eko Yuli Prianto

Achmad Ford

Muhammad Ulil Albab

Ema Ashari

Nita Safira

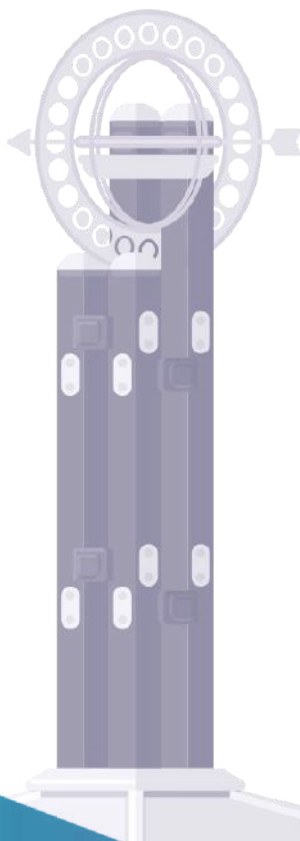
Aulia Ines Paramita

Ade Prima Latifa

Dian Cahyaningsih

Layouting & Desain Grafis

Nita Safira



Pindai *barcode* untuk
mendapatkan *softcopy*
Kajian Fiskal Regional
Triwulan II - 2023 :



Atau untuk pada tautan berikut:

linktr.ee/KFRKalbar

Kritik dan saran:

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat

bidang.pa2kalbar@gmail.com / ppa2.djpbkalbar@kemenkeu.go.id



KATA PENGANTAR

KEPALA KANWIL DJPb KALBAR

Kukuh Sumardono Basuki, S.E., M.Sc.



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat yang diberikan sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Barat dapat menyusun dan menyelesaikan Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2023. KFR merupakan output pelaksanaan tugas Kanwil DJPb yang memiliki fungsi pembinaan, koordinasi, supervisi, dan representasi Kementerian Keuangan di daerah selaku pengelola fiskal dan *Regional Chief Economist*.

Kajian Fiskal Regional terdiri atas beberapa analisis diantaranya analisis ekonomi regional yang berisi data kondisi dan analisis perekonomian dan kesejahteraan regional seperti PDRB berdasarkan pengeluaran dan sektor/lapangan usaha, kontribusi dan pertumbuhan sektor/lapangan usaha terhadap PDRB dan fiskal, inflasi, serta indikator kesejahteraan seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan (rasio gini), Nilai Tukar Petani (NTP), dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Pada KFR ini juga memaparkan analisis fiskal regional yang terdiri dari ringkasan dan analisis atas realisasi APBN, realisasi APBD, dan analisis Neraca Pemerintah Pusat-Tingkat Wilayah.

Pada KFR edisi Triwulan II Tahun 2023, dibahas beberapa topik dalam analisis tematik, yaitu "Analisis/Reviu Kinerja dan Potensi Peningkatan *Local Taxing Power*/Penerimaan Negara dan Daerah" dan "Analisis Kemandirian Fiskal Daerah: Realisasi PAD dan *Local Tax Ratio* (LTR) sejak 2017 s.d. Juni 2023".

Penyusunan KFR ini telah melalui proses pengumpulan data dan informasi dari berbagai pihak sehingga kami berharap substansi KFR yang disusun telah memuat informasi kondisi fiskal Provinsi Kalimantan Barat yang komprehensif dan berguna kepada *stakeholders* regional Provinsi Kalimantan Barat. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung penyusunan KFR ini, terutama berkaitan dengan penyediaan data yang diperlukan. Kami menyadari bahwa dalam KFR ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kami mohon kritik dan saran yang dapat digunakan untuk proses perbaikan dalam penyusunan KFR di masa yang akan datang.



Pontianak, 31 Agustus 2023
Kepala Kanwil DJPb Prov. Kalbar




KUKUH SUMARDONO BASUKI



DAFTAR ISI



PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR TABEL	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
DASHBOARD	xii
BAB I ANALISIS EKONOMI REGIONAL	1
1.1. Perkembangan dan Analisis Indikator Makro Ekonomi	1
1.2. Perkembangan dan Analisis Indikator Kesejahteraan	9
BAB II ANALISIS FISKAL REGIONAL	15
2.1. Analisis Laporan Realisasi Anggaran (APBN)	15
2.2. Analisis Laporan Realisasi Anggaran (APBD Konsolidasi)	24
2.3. Analisis Neraca Pemerintah Pusat-Tingkat Wilayah	30
BAB III PENGEMBANGAN EKONOMI REGIONAL	32
3.1. Kondisi Eksisting Perkembangan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.....	32
3.2. Dukungan Pemerintah Terhadap Pengembangan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34
3.3. Analisis Atas Potensi Pengembangan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37
3.4. Rekomendasi Kebijakan	47
BAB IV ANALISIS TEMATIK	49
4.1. Pendahuluan	49
4.2. Analisis Kemandirian Fiskal Daerah.....	51
4.3. Reviu Kesiapan Daerah dalam Penguatan <i>Local Taxing Power</i>	55
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	65
5.1. Kesimpulan	65
5.2. Rekomendasi	69
DAFTAR PUSTAKA	72



DAFTAR GRAFIK



Grafik 1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat, Regional, & Nasional 2019-2023 (y-on-y)	1
Grafik 1.2.	Distribusi PDRB seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Triwulan II-2023	2
Grafik 1.3.	Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Triwulan II-2023	3
Grafik 1.4.	Pertumbuhan dan Distribusi/Struktur PDRB Kalbar Triwulan II-2023 Menurut Pengeluaran	4
Grafik 1.5.	Nilai PDRB Kalbar Triwulan II-2023 Menurut Pengeluaran	4
Grafik 1.6.	Nilai Neraca Perdagangan (Juta US\$)	6
Grafik 1.7.	Tren Inflasi Kalbar 2022-2023 (Juni)	7
Grafik 1.8.	Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kalbar & Nasional Tahun 2019 s.d. 2023	9
Grafik 1.9.	Angkatan Kerja, TPAK, dan TPT Kalbar Februari 2020 – 2023	10
Grafik 1.10.	Tren Rasio Gini Kalbar dan Nasional 2017-2022	11
Grafik 1.11.	Tren Nilai Tukar Petani (NTP) Kalbar 2022-2023 (Juni)	12
Grafik 1.12.	Tren Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kalbar 2022-2023 (Juni)	13
Grafik 2.1.	Komponen Pendapatan Negara Triwulan II 2023	16
Grafik 2.2.	Penerimaan Pajak Per Sektor sampai Triwulan II Tahun 2023	17
Grafik 2.3.	Top 10 Bea Masuk Komoditi Impor Kalimantan Barat	17
Grafik 2.4.	Top 5 Bea Keluar Komoditi Ekspor Kalimantan Barat	17
Grafik 2.5.	Pagu dan Realisasi Belanja Negara Triwulan II Tahun 2023	19
Grafik 2.6.	Tren Penyaluran KUR Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2020-2023	20
Grafik 2.7.	Tren Pembiayaan UMi Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2020-2023	21
Grafik 2.8.	Komposisi Pendapatan APBD Kalbar Triwulan II-2023	25
Grafik 2.9.	Pagu, Realisasi, dan Komposisi Belanja APBD Kalbar Triwulan II-2023	27
Grafik 2.10.	Belanja APBD Kalbar Triwulan-II 2023 Berdasarkan Fungsi	28
Grafik 3.1.	Perkembangan NTP di Kalimantan Barat Tahun 2012-2022	41
Grafik 3.2.	Perkembangan Anggaran TIK Belanja K/L 2017-2022	44
Grafik 3.3.	Perkembangan Penyaluran KUR Sektor Pertanian	45
Grafik 3.4.	Literasi dan Inklusi Keuangan 2022 Berdasarkan Propinsi	46

DAFTAR GRAFIK



Grafik 4.1.	Tren Realisasi Total PAD Pemerintah Provinsi dan Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota.....	52
Grafik 4.2.	Perkembangan Realisasi Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi dan Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota.....	53
Grafik 4.3.	Perkembangan Local Taxing Ratio Pemerintah Provinsi dan Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota	55
Grafik 4.3.	Perkembangan Local Taxing Ratio Pemerintah Provinsi dan Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota	55



DAFTAR TABEL



Tabel 1.1.	Inflasi menurut Kelompok Pengeluaran Provinsi Kalimantan Barat 2023	7
Tabel 1.2.	Garis Kemiskinan Kalbar	10
Tabel 1.3.	Perbandingan NTP Tahun 2023 di Pulau Kalimantan dan Nasional	12
Tabel 2.1.	Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2023	16
Tabel 2.2.	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDRB di Kalbar	18
Tabel 2.3.	Kinerja APBN Berdasarkan 10 Kementerian/Lembaga Pagu Terbesar	19
Tabel 2.4.	Penyaluran KUR Kalimantan Barat per Sektor Triwulan II Tahun 2023	20
Tabel 2.5.	Perkiraan Ralisasi APBN Lingkup Provinsi Kalbar s.d. Akhir Tahun 2022	22
Tabel 2.6.	Pagu & Realisasi Anggaran pada Fungsi Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Berdasarkan Prioritas Nasional dan K/L	23
Tabel 2.7.	Realisasi APBD Lingkup Provinsi Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2022 dan 2023	25
Tabel 2.8.	Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal	26
Tabel 2.9.	Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah	26
Tabel 2.10.	Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah	27
Tabel 2.11.	Perkiraan Realisasi APBD Kalbar s.d. Triwulan IV Tahun 2023	29
Tabel 2.12.	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) Triwulan II Tahun 2021-2023	30
Tabel 2.13.	Kontribusi Belanja Pemerintah dalam Pembentukan Aset Tetap dari Belanja Modal	31
Tabel 2.14.	Realisasi PNBPN dari BMN Triwulan II Tahun 2021-2023	31
Tabel 3.1.	Pemetaan Sektor Unggulan dan Sektor Potensial Berdasarkan Metode Klassen dan Model I-O	32
Tabel 3.2.	Kontribusi Sektoral terhadap PDRB Kalimantan Barat atas Dasar Harga Berlaku Menurut LU Tahun 2013-Juni 2023	33
Tabel 3.3.	Kontribusi Sektoral terhadap PDRB Kalimantan Barat atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-Juni 2023	34
Tabel 3.3.	Kontribusi Sektoral terhadap PDRB Kalimantan Barat atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-Juni 2023	34

DAFTAR TABEL



Tabel 3.4.	Pemetaan Sektor Unggulan dan Sektor Potensial Berdasarkan Metode Klassen dan Model I-O	38
Tabel 3.5.	Perbandingan Nilai Keterkaitan (<i>Linkage</i>) Antar Sektor Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dan 2022	39
Tabel 3.6.	15 Besar Indeks Literasi Digital berdasarkan Provinsi di Indonesia 2021-2022	40
Tabel 3.7.	Pekembangan NTP per Subsektor di Kalimantan Barat Tahun 2012-2022	42
Tabel 4.1.	Reviu Kesiapan Daerah dalam Penguatan <i>Local Taxing Power</i> pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.....	56
Tabel 4.2.	Reviu Kesiapan Daerah dalam Penguatan <i>Local Taxing Power</i> pada Pemerintah Kota Singkawang	59
Tabel 4.3.	Reviu Kesiapan Daerah dalam Penguatan <i>Local Taxing Power</i> pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang.....	60



RINGKASAN EKSEKUTIF



Analisis Ekonomi Makro Regional

Di tengah perkiraan perekonomian global yang melambat di tahun 2023 serta penurunan harga komoditas di pasar global, ekonomi Indonesia dan Kalimantan Barat masih tumbuh konsisten di atas 4 persen hingga Triwulan II-2023, hal ini menandakan ketahanan dan prospek ekonomi tetap baik. Ekonomi Kalimantan Barat triwulan II-2023 terhadap triwulan I-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 1,59% (q-to-q), serta mengalami pertumbuhan 4,00% (year-on-year), dan 4,32% (secara kumulatif). Perekonomian Kalimantan Barat berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) triwulan II-2023 mencapai Rp67.857,24 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp38.387,99 miliar. Secara triwulanan, struktur PDRB triwulan II-2023 menurut lapangan usaha 74,69% perekonomian Provinsi Kalimantan Barat dikuasai oleh 6 sektor lapangan usaha, yaitu Pertanian, Industri, Perdagangan, Konstruksi, dan Administrasi Pemerintahan, dan Pertambangan.

Nilai neraca perdagangan Kalimantan Barat Juni 2023 surplus US \$ 163,33 juta, sedangkan secara kumulatif Januari - Juni 2023 juga surplus US \$ 776,49 juta. Neraca perdagangan Juni 2023 dibandingkan terhadap Mei 2023, naik 101,05 persen. Berdasarkan hasil pemantauan BPS gabungan 3 kota IHK di Kalimantan Barat pada Juni 2023 terjadi inflasi *year-on-year* sebesar 4,10% atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 116,14 pada Mei 2022 menjadi 116,45 pada Juni 2023. Tingkat inflasi *month to month* (mtm) dan tingkat inflasi *year to date* (ytd) Juni 2023 sebesar 0,27 persen dan 1,46 persen. Penyumbang utama inflasi bulanan di

antaranya adalah komoditas daging ayam ras, bawang putih, dan cabai rawit dengan andil masing-masing sebesar 0,1662%; 0,0661%, dan 0,0482%. Penyumbang utama inflasi tahunan di antaranya adalah komoditas bensin, rokok kretek filter, dan beras dengan andil masing-masing sebesar 1,0264%; 0,4030%; dan 0,2526%.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 6,71%, turun 0,10% poin terhadap September 2022 dan menurun 0,02% poin terhadap Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 353,35 ribu orang, turun 3,2 ribu orang terhadap September 2022 dan meningkat 3,1 ribu orang terhadap Maret 2022. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Barat yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,321. Angka ini naik 0,01 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,311 dan naik 0,007 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,314. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalbar pada Februari 2023 sebesar 4,52%. Jumlah angkatan kerja menurun sebanyak 5,55 ribu orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 4,6 ribu orang, sementara pengangguran turun sebanyak 10,14 ribu orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Februari 2023 sebesar 68,45 persen, turun 1,29 persen poin dibanding Februari 2022.

Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat Juni 2023 sebesar 133,10 poin atau turun 2,92% dibanding Mei 2023 (137,11). Capaian NTP Kalimantan Barat yang berada jauh di atas 100 ini bisa dikatakan sangat tinggi bahkan tertinggi di antara regional Kalimantan dan secara Nasional. Sementara NTN yang dihitung dari nilai tukar di sektor perikanan saja

(Subsektor Perikanan Tangkap dan Subsektor Perikanan Budidaya) mengalami kenaikan sebesar 0,07% dari yang semula 101,28 (Mei 2023) menjadi 101,35 pada Juni 2023.

Analisis Fiskal Regional

Pada APBN Kalimantan Barat TA 2023, target pendapatan yang ditetapkan adalah sebesar Rp12.082,96 miliar dan Pagu Belanja sebesar Rp30.835,76 miliar, sehingga terdapat rencana defisit sebesar Rp18.752,80 miliar. Realisasi pendapatan negara pada APBN Kalimantan Barat sampai dengan akhir Juni atau Triwulan II 2023 mengalami kontraksi yang sebesar 19,75% dengan realisasi sebesar Rp5.636,16 miliar dari total target pendapatan atau sebesar 46,65% dari target pendapatan negara. Seluruh pos penerimaan mengalami kontraksi kecuali pada Cukai, Pajak Lainnya, dan PNBP.

Pada sisi Belanja Negara, tercatat pertumbuhan positif sebesar 2,22% dengan realisasi sebesar Rp 13.216,48 miliar dari total pagu belanja atau sekitar 42,86%. Belanja ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp4.514,53 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp8.701,95 miliar. Seluruh pos belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan serapan (yoy), sedangkan TKDD mengalami kontraksi kecuali pada DBH dan DAK Fisik.

Target pendapatan daerah dalam APBD Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp25.988,89 miliar dan Pagu Belanja sebesar Rp26.905,36 miliar, sehingga terdapat rencana defisit sebesar Rp916,47 miliar, dengan pembiayaan sebesar Rp899,45 miliar dan SIKPA sebesar Rp17,02 miliar. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, realisasi pendapatan daerah dalam APBD Kalbar menunjukkan pencapaian sebesar Rp8.558,01 miliar, masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 74,58% dari total pendapatan. Pada sisi belanja, realisasi s.d. 30 Juni 2023 sebesar Rp6.817,60 miliar atau baru sebesar 25,34%. Dengan kondisi ini, maka APBD Kalbar masih surplus sebesar Rp1.740,41 miliar.

Berdasarkan perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal atas realisasi APBD Kalbar Triwulan II Tahun 2023, diperoleh hasil bahwa Kalbar termasuk kedalam golongan "sedang" dengan Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar 25,32%, sementara untuk Rasio Derajat Ketergantungan Kalbar termasuk ke dalam kategori Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah yang "sangat tinggi" dengan nilai ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat sebesar 74,58%. Dan untuk Rasio Kemandirian Fiskal, diperoleh hasil bahwa Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah Kalbar masih rendah dengan perolehan angka kemampuan keuangan sebesar 33,95% atau termasuk ke dalam kategori pola hubungan "Konsultatif".

Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2023 menunjukkan total jumlah aset sebesar Rp101.088,04 miliar, kewajiban sebesar Rp606,59 miliar dan ekuitas sebesar Rp100.120,76 miliar. Pada sisi kewajiban, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang mengalami pertumbuhan negatif yaitu turun sebesar 6,09% pada jumlah kewajiban jangka pendek. Sementara pada sisi Ekuitas, LKPP-TW Triwulan II 2023 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (*year on year*) tumbuh negatif sebesar 0,93%.

Perkembangan Ekonomi Regional

Berdasarkan analisis sektor unggulan dan sektor potensial dengan menggunakan metode LQ, *Shift Share*, Tipologi Klassen serta Model I-O. Dari analisis tersebut, dipilih sektor unggulan yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan salah satu sektor potensial yaitu sektor informasi dan komunikasi untuk dianalisis lebih lanjut terkait potensi pengembangannya.

Selama sepuluh tahun terakhir (2013-Juni 2023) struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Barat didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu; sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran,



dan reparasi mobil dan sepeda motor; konstruksi; pertambangan dan penggalian.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kalimantan Barat pada tahun 2022 masih dihasilkan oleh sektor primer, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 21,10 persen. Dengan demikian, pada analisis ini akan difokuskan pada salah satu sektor unggulan, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sedangkan untuk salah satu sektor potensial yaitu sektor informasi dan komunikasi yang mengalami trend kenaikan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan perhitungan alokasi APBN yang berkaitan dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, terdapat alokasi sebesar Rp785.958.790.000 atau 1,29% dari pagu sebesar Rp60.794.177.836.000. Pada APBN, realisasi Fungsi Ekonomi sebesar Rp110.806.812.680 sedangkan pada APBD, realisasi Fungsi Ekonomi sebesar Rp135.060.061.199. Demikian halnya untuk mendukung sektor informasi dan komunikasi pada APBN, realisasi Fungsi Ekonomi sebesar Rp110.806.812.680 sedangkan pada APBD, realisasi Fungsi Ekonomi sebesar Rp135.060.061.199.

Penguatan pada sektor informasi dan komunikasi terus diupayakan Pemerintah dengan meningkatkan infrastruktur TIK, sehingga peran APBN dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pada beberapa sektor untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengurangi ketimpangan dapat terwujud.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022 menunjukkan Provinsi Kalimantan Barat memperoleh Indeks Literasi Keuangan sebesar 51,95% diatas rata-rata nasional sebesar 49,68% dan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 84,16% dibawah rata-rata nasional sebesar 85,10%. Hasil survei ini menunjukkan banyak penduduk Kalimantan Barat yang sudah mengakses fasilitas perbankan tetapi kekurangan pengetahuan mengenai keuangan (literasi keuangan).

Analisis Tematik

Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya meramu kebijakan fiskal untuk dapat meningkatkan kesejahteraan salah satunya melalui terbitnya UU HKPD yang memungkinkan adanya *Local Taxing Power* (LTP). Salah satu kontribusi pengawalan implementasi UU HKPD adalah penguatan *Local Taxing Power* untuk meningkatkan kemandirian daerah dan optimalisasi PAD.

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Realisasi PAD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp1.314,05 miliar sedangkan realisasi PAD Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp852,97 miliar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat termasuk kategori Menuju Kemandirian. Sedangkan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat termasuk dalam kategori Belum Mandiri.

Tumbuhnya perekonomian memberikan dampak positif pada penerimaan Pemerintah Daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah. Pada tahun 2022, realisasi jenis pajak dan retribusi Pemerintah Provinsi naik sebesar 24,71% dengan realisasi Rp2.686,22 miliar sedangkan, realisasi jenis pajak dan retribusi Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota naik sebesar 13,10% dengan realisasi Rp1.084,23 miliar.

Local taxing ratio Pemerintah Provinsi Kalbar paling tinggi pada tahun 2022 sebesar 1,22%, sedangkan *local taxing ratio* Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota paling tinggi pada tahun 2022 sebesar 1,08%. Semakin tinggi nilai *local taxing ratio*, semakin besar penerimaan pajak dan semakin leluasa pemerintah membiayai penerimaannya.

Untuk melihat kesiapan daerah dalam penguatan *Local Taxing Power*, selain Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,



Kabupaten Bengkayang dipilih untuk mewakili sampel kabupaten sedangkan Kota Singkawang dipilih sebagai sampel untuk daerah kota. Raperda PDRD Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan UU HKPD masih dalam pembahasan DPRD. Raperda PDRD Kota Singkawang sudah disahkan pada 28 Juli 2023 dan sedang dalam tahap evaluasi oleh Pemerintah Provinsi serta sudah dilakukan harmonisasi dengan Kanwil Kemkumham Kalbar. Raperda PDRD Kabupaten Bengkayang sedang dalam tahap pembahasan dan targetnya pada awal September 2023 Perda sudah selesai. Implementasi Perda PDRD masing-masing pemerintah daerah ditargetkan sebelum 1 Januari 2024.

Kemandirian fiskal Pemerintah Provinsi Kalbar semakin tinggi diikuti ketergantungan yang semakin rendah, sementara untuk konsolidasi Kabupaten/Kota di lingkup Kalimantan Barat justru sebaliknya. Peningkatan LTP bertumpu pada kondisi riil masyarakat di lapangan, Pemerintah tidak akan dapat menaikkan LTP apabila tidak diikuti oleh kemauan membayar pajak dari masyarakat. Penyebab rendahnya pungutan PDRD disebabkan karena basis penerimaan pajak

yang sedikit, hanya sekitar 40% dari basis penerimaan yang tersedia. Penyebab lainnya adalah tren penurunan dari BPHBTB di Kalbar akibat masih banyaknya objek yang berada di bawah NJOP yang sebesar Rp10 juta sehingga tidak bisa dikenakan pajak.

Pada sisi pendapatan, UU HKPD memberikan penguatan sistem pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) melalui restrukturisasi dan konsolidasi jenis PDRD, sumber pajak daerah baru, dan penyederhanaan jenis retribusi daerah. Pada sisi belanja, UU HKPD mengatur penguatan perencanaan belanja daerah melalui penganggaran belanja daerah, simplifikasi dan sinkronisasi program prioritas daerah dengan prioritas nasional, serta penyusunan anggaran yang berdasarkan standar harga. Selain itu perlunya pemanfaatan transfer ke daerah dan dana desa yang belum optimal karena sebagian besar DAU digunakan untuk belanja pegawai dan ketergantungan daerah terhadap DAK sebagai salah satu sumber belanja modal.

HIGHLIGHT EKONOMI REGIONAL

PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN II - 2023

Nasional:
5,17%
Y-on-Y

Regional:
5,56%
Y-on-Y

Kalbar
4,00%
C-to-C

1,59%
Q-to-Q

4,32%
C-to-C

Produk Domestik Regional Bruto TW II - 2023:

PDRB ADHK

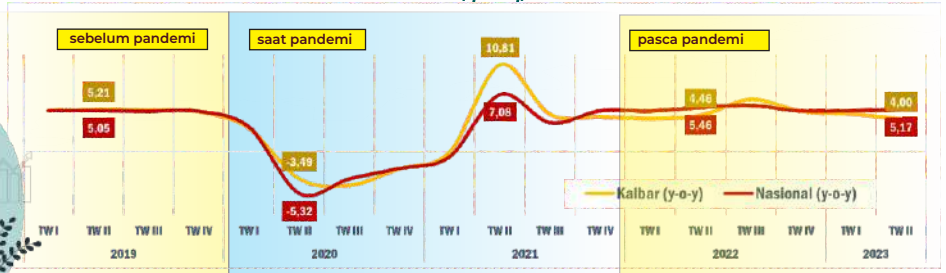
Rp67.857,24 miliar

PDRB ADHB

Rp38.387,99 miliar

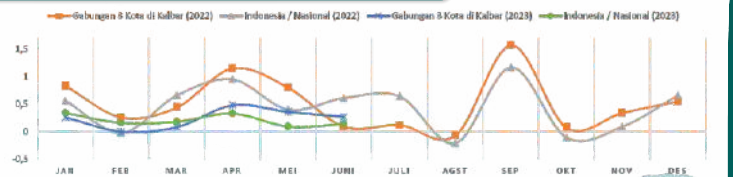
Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Tren Pertumbuhan Ekonomi Kalbar & Nasional (q-to-q)



- Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 20,07 persen. Sementara dari sisi Pengeluaran, komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yaitu sebesar 11,24 persen.
- Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan yang tumbuh sebesar 5,56% (y-o-y), Kalimantan Barat memberikan kontribusi sumber pertumbuhan sebesar 0,61% dari 5,56%, berada di urutan ketiga setelah Kalimantan Timur (3,55%) dan Kalimantan Selatan (0,61%).

TINGKAT INFLASI KALBAR 2023



Tingkat Inflasi Kalimantan Barat Juni 2023:

y-on-y **y-to-d** **m-to-m**
4,10% **1,46%** **0,27%**

NERACA PERDAGANGAN KALBAR JUNI 2023:

SURPLUS
US \$ 163,33 juta

Sumber: BPS Kalbar

INDIKATOR KESEJAHTERAAN

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

2020 2021 2022
67,66 67,9 68,63

NASIONAL
72,91

TINGKAT PENGANGGURAN

2021 2022 2023
5,73% 4,86% 4,52%

NASIONAL
5,45%

*Data per Februari

TINGKAT KEMISKINAN

2021 2022 2023
7,15% 6,73% 6,71%

NASIONAL
9,36%

*Data per Maret

RASIO GINI

2021 2022 2023
0,313 0,314 0,321

NASIONAL
0,388

*Data per Maret

NILAI TUKAR PETANI

2020 2021 2022
108,45 128,63 141,40

JUNI 2023
133,10

NILAI TUKAR NELAYAN

2020 2021 2022
98,22 105,1 103,78

JUNI 2023
101,35

Seluruh indikator kesejahteraan di Kalbar telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Kalbar dan selalu berada di atas (lebih baik) dari capaian secara nasional kecuali pada capaian IPM yang masih berada di bawah rata-rata nasional dan regional Kalimantan.

Sumber ikon grafis :
storyset.com & freepik.com

KINERJA FISKAL REGIONAL KALIMANTAN BARAT TRIWULAN II TAHUN 2023

PENDAPATAN

Real: **5.636,16**
(dalam miliar rupiah)
Growth: -19,75%

44,95% (realisasi) Pajak Dalam Negeri **4.822,09** -10,70% (growth)

42,72% (realisasi) Pajak Internasional **237,27** -79,17% (growth)

72,07% (realisasi) PNBP **576,81** 18,99% (growth)

DEFISIT

28,34% (growth)

7.580,32
(dalam miliar rupiah)

Growth: perbandingan dengan TW II-2022
Realisasi: perbandingan dengan Pagu

BELANJA

Real: **13.216,48**
(dalam miliar rupiah)
Growth: 10,83%

50,08% (realisasi) Pegawai **1.991,47** 8,28% (growth)

39,32% (realisasi) Barang **1.938,62** 35,08% (growth)

24,39% (realisasi) Modal **580,37** 29,60% (growth)

38,29% (realisasi) Bantuan Sosial **4,07** 6,71% (growth)

APBN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Sumber data: OM-SPAN, MEBE, DJP, DJBC (diolah)

TKDD

8.701,95
(dalam miliar rupiah)
Real: 44,54
Growth: 5,45%

Dana Alokasi Umum **5.648,13**
Growth: -9,79%

Dana Bagi Hasil **404,58**
Growth: 129,9%

Dana Alokasi Khusus Fisik **204,63**
Growth: 88,83%

Dana Alokasi Khusus Non-Fisik **1.511,80**
Growth: -9,83%

Dana Insentif Daerah **11,07**
Growth: -76,42%

Dana Desa **921,75**
Growth: -1,43%

KUR & UMi

Sumber data: SIKP | per 30 Juni 2023

APBD

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Sumber data: SIKD, SIMTRADA, DJPK (diolah)

KREDIT USAHA RAKYAT

Penyaluran
Rp1,76 triliun
Jumlah Debitur
25.643 debitur

ULTRA MIKRO

Penyaluran
Rp16,67 miliar
Jumlah Debitur
3.017 debitur

PENDAPATAN

Real: **8.558,01**
(dalam miliar rupiah)
Growth: -5,15%

41,05% (realisasi) Pendapatan Asli Daerah **2.167,02** 3,01% (growth)

31,07% (realisasi) Pendapatan Transfer **6.382,49** -7,40% (growth)

5,05% (realisasi) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah **8,49** 67,82% (growth)

BELANJA

Real: **6.817,60**
(dalam miliar rupiah)
Growth: 6,32%

29,35% (realisasi) Operasi **5.260,67** 6,12% (growth)

8,81% (realisasi) Modal **411,54** 76,70% (growth)

4,34% (realisasi) Tidak Terduga **5,20** -45,71% (growth)

27,22% (realisasi) Transfer **1.140,19** -5,98% (growth)

SURPLUS

1.740,41
(dalam miliar rupiah)
-33,32% (growth)

SILPA

1.692,30
(dalam miliar rupiah)
-33,70% (growth)

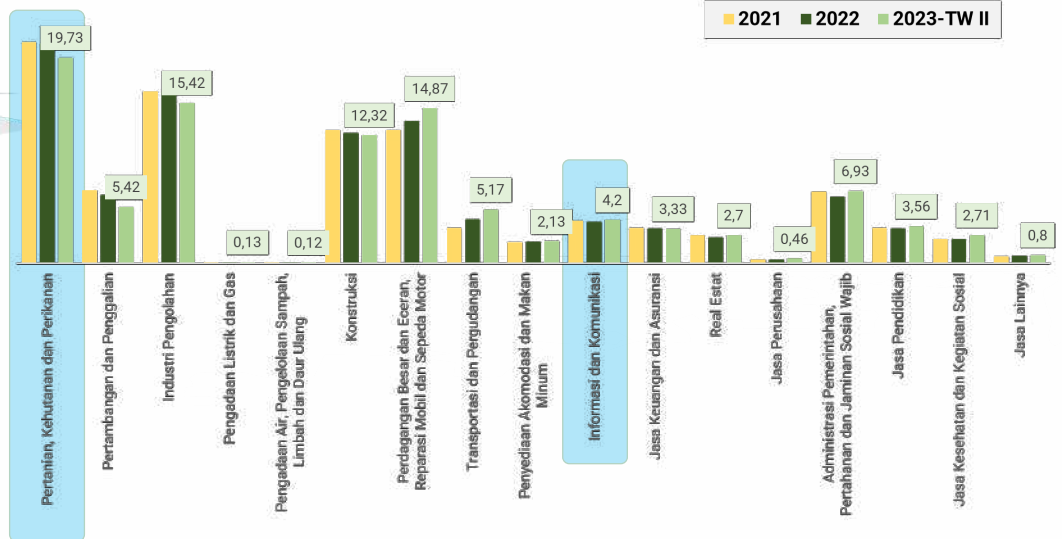
PEMBIAYAAN

-48,11
(dalam miliar rupiah)
Growth: -33,70%

ANALISIS TEMATIK

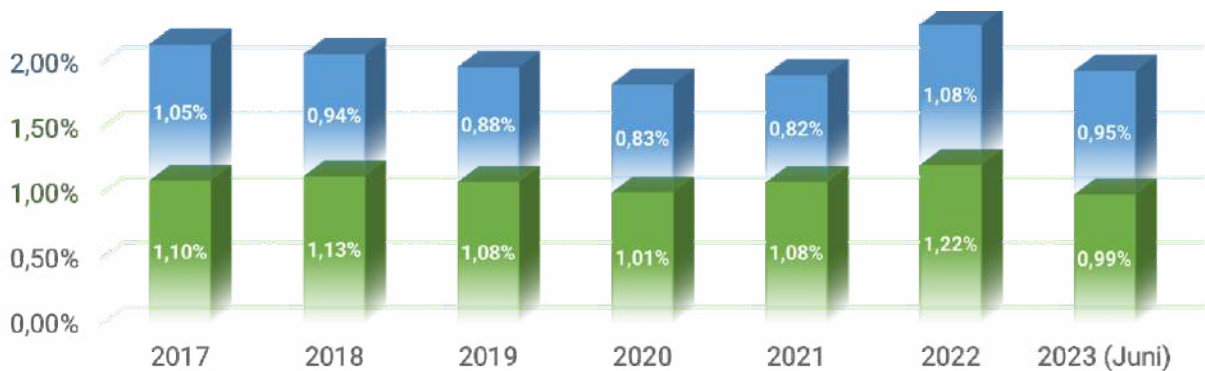
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2023

Kontribusi Sektoral terhadap PDRB Kalimantan Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 s.d. Triwulan II Tahun 2023



- Pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan perubahan struktur perekonomian. Transformasi struktural merupakan proses perubahan struktural perekonomian dari sektor tradisional (pertanian) yaitu sektor primer yang terdiri atas pertanian, kehutanan, dan perikanan ke sektor sekunder yang terdiri atas industri-industri seperti industri pengolahan, konstruksi, pertambangan atau perubahan ke sektor tersier yang terdiri atas bidang pengangkutan dan perhubungan, pemerintahan, perdagangan dan jasa-jasa perseorangan.
- Sektor Potensial dan Unggulan yang dibahas dalam KPR ini adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan salah satu sektor potensial adalah sektor informasi dan komunikasi.

Perkembangan Local Taxing Ratio Pemerintah Provinsi & Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota Lingkup Kalbar



■ Tren Realisasi Local Tax Ratio Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2017 s.d. Juni 2023
 ■ Tren Realisasi Local Tax Ratio Pemerintah Provinsi Tahun 2017 s.d. Juni 2023

$$\text{Local Tax Ratio} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total PDRB}}$$

Tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak yang dikumpulkan pada suatu masa dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga *Local Taxing Ratio* secara sederhana adalah perbandingan antara penerimaan pajak daerah pada periode tertentu dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). *Local Taxing Ratio* merupakan suatu ukuran kinerja penerimaan pajak dalam suatu daerah. Namun, *Local Taxing Ratio* bukanlah satu-satunya indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja pajak daerah.



Governments will always play a huge part in solving big problems. They set public policy and are uniquely able to provide the resources to make sure solutions reach everyone who needs them. They also fund basic research, which is a crucial component of the innovation that improves life for everyone.

- Bill Gates -





KFR
Triwulan II-2023



BAB I

Analisis Ekonomi Regional

BAB I

Analisis Ekonomi Regional



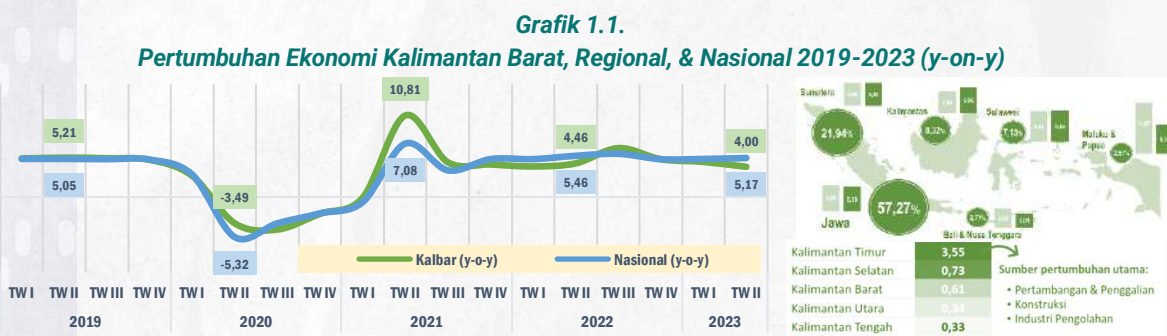
1.1. Perkembangan dan Analisis Indikator Makro Ekonomi

Salah satu tujuan pembangunan Kalimantan Barat adalah meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta memajukan kehidupan masyarakat, sebagaimana pembangunan wilayah yang strategis dan berkualitas menjadi harapan setiap daerah di Indonesia. Indikator makro ekonomi daerah diperlukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Selain itu, indikator makro ekonomi juga dapat digunakan untuk proses (perencanaan, monitoring, dan evaluasi) dalam menentukan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat.

1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Di tengah perkiraan perekonomian global yang melambat di tahun 2023 serta penurunan harga komoditas di pasar global, ekonomi Indonesia dan Kalimantan Barat masih tumbuh konsisten di atas 4 persen hingga Triwulan II-2023, hal ini menandakan ketahanan dan prospek ekonomi tetap baik. Ekonomi Kalimantan Barat triwulan II-2023 terhadap triwulan I-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 1,59% (q-to-q), serta mengalami pertumbuhan 4,00% (year-on-year), dan 4,32% (secara kumulatif). Angka ini berada di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional yang tercatat sebesar 5,17% (yoy). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 20,07%. Sementara dari sisi Pengeluaran, komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yaitu sebesar 11,24%.



Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan yang tumbuh sebesar 5,56% (y-o-y), Kalimantan Barat memberikan kontribusi sumber pertumbuhan sebesar 0,61% dari 5,56%,



berada di urutan ketiga setelah Kalimantan Timur (3,55%) dan Kalimantan Selatan (0,61%). Secara umum struktur ekonomi Regional Kalimantan masih sama seperti triwulan sebelumnya yaitu didominasi oleh Pertambangan & Penggalian, Konstruksi, dan Industri Pengolahan. Meskipun masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, secara umum capaian pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan II-2023 telah mengindikasikan keberhasilan pemulihan ekonomi di Kalimantan Barat pasca pandemi meskipun masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi pra-pandemi (tahun 2019).

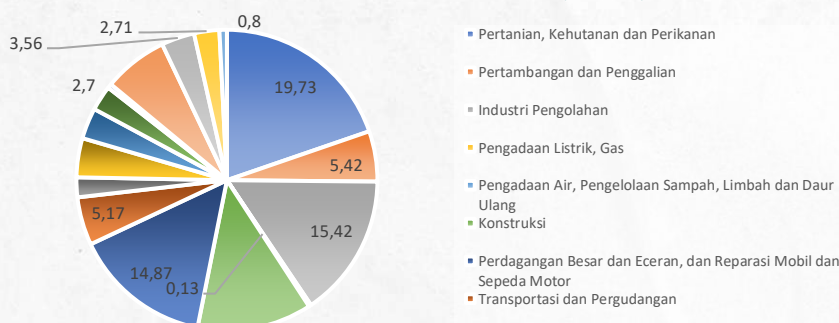
b. PDRB Kalimantan Barat

Secara umum kondisi ekonomi Provinsi Kalimantan Barat dipengaruhi oleh indikator ekonomi makro Indonesia. Kemajuan perekonomian Kalimantan Barat dapat dilihat melalui beberapa indikator, salah satunya adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan sejumlah nilai tambah produksi yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah atau regional tanpa memilih atas faktor produksi (Arsyad, 1992). Perekonomian Kalimantan Barat berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) triwulan II-2023 mencapai Rp67.857,24 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp38.387,99 miliar.

1) PDRB Menurut Lapangan Usaha

Struktur PDRB Kalimantan Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan II 2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Kalimantan Barat masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 19,73%; diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 15,42%; Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil Dan Motor sebesar 14,87%; dan Konstruksi sebesar 12,32%; Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Barat mencapai 62,34%. Secara triwulanan, struktur PDRB triwulan II-2023 menurut lapangan usaha 74,69% perekonomian Provinsi Kalimantan Barat dikuasai oleh 6 sektor lapangan usaha, yaitu Pertanian, Industri, Perdagangan, Konstruksi, dan Administrasi Pemerintahan, dan Pertambangan.

Grafik 1.2.
Distribusi PDRB seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Triwulan II-2023

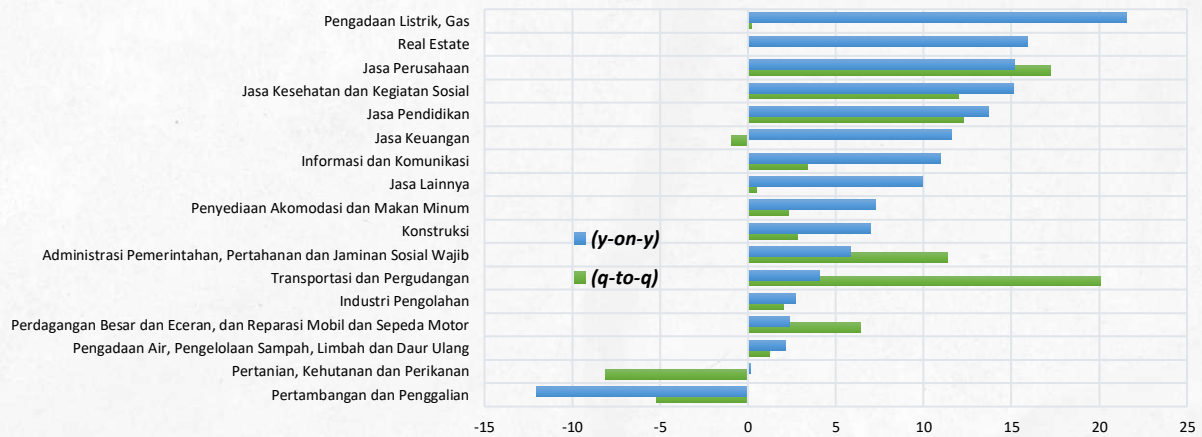


Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Secara tahunan, Kalimantan Barat triwulan II-2023 dibanding triwulan II-2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,00%. Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Dari 4%

pertumbuhan ekonomi Kalbar secara tahunan, sektor konstruksi adalah sumber pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 0,67%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan di atas 10% adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 21,53%; Real Estate sebesar 15,90%; Jasa Perusahaan sebesar 15,16%; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 15,11%; Jasa Pendidikan sebesar 13,71%; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 11,61%; serta Informasi dan Komunikasi sebesar 10,97%. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami kontraksi adalah Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi sedalam 12,06%.

Grafik 1.3.
Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Triwulan II-2023



Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Secara triwulanan, Ekonomi Kalimantan Barat triwulan II-2023 dibanding triwulan I-2023 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 1,59%. Lapangan Usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 20,07%; diikuti oleh Jasa Perusahaan sebesar 17,25%; Jasa Pendidikan sebesar 12,27%; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,99%; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,35%; Perdagangan Besar dan Eceran; dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,39%. Sementara itu, kontraksi terjadi pada beberapa lapangan usaha, dengan kontraksi terdalam dialami oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terkontraksi sedalam 8,11%; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi sedalam 5,18%; dan Jasa Keuangan dan Asuransi kontraksi sedalam 0,94%.

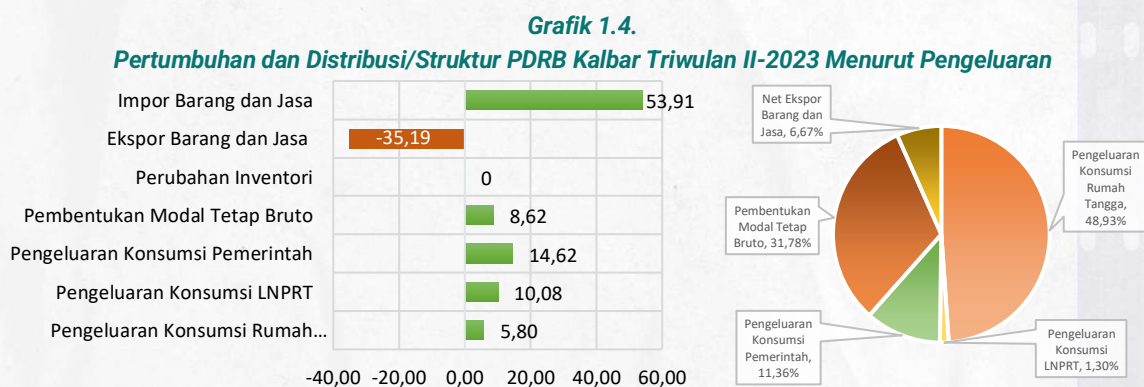
Beberapa sektor dan catatan peristiwa yang turut berkontribusi pada PDRB menurut lapangan usaha di Kalbar pada Triwulan II-2023 yaitu produksi padi dan palawija yang mengalami kontraksi baik triwulanan maupun tahunan, produksi sektor perkebunan Kelapa Sawit yang tumbuh secara triwulanan namun terkontraksi secara tahunan, produksi karet yang tumbuh secara triwulanan dan terkontraksi secara tahunan, produksi perikanan tangkap dan budidaya yang mengalami penurunan, dan pada subsektor peternakan momentum Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha meningkatkan jumlah permintaan daging dan telur, di mana produksi daging dan telur tumbuh secara triwulanan serta naiknya volume pematangan hewan di RPH dan produksi daging telur. Realisasi Gaji 13 dan 14 serta peningkatan belanja modal memberikan dampak positif terhadap peningkatan Sektor Administrasi Pemerintahan.



Pertumbuhan sektor Konstruksi, didorong oleh Belanja Modal Pemerintah (gedung dan jalan) yang meningkat sebesar 119%, Realisasi Kredit Konstruksi meningkat sebesar 3,19%. Sementara secara Tahunan Belanja Modal Pemerintah (gedung dan jalan) tumbuh sebesar 81,99% dan Bongkar Tiang Pancang tumbuh sebesar 1.146,82%. Secara triwulanan Penjualan Mobil turun sebesar 18,01%, tetapi penjualan Motor masih tumbuh sebesar 12,35%. Sementara secara tahunan penjualan Mobil dan Motor berkontraksi sebesar 17,18% dan 2,65%. Pada sektor transportasi laut dan udara jumlah penumpang tumbuh sebesar 74,64% dan 10,54% secara triwulanan. Sementara secara tahunan jumlah penumpang tumbuh sebesar 15,51% dan 1,93%. Pada tahun 2023 triwulan II secara Triwulanan TPK Hotel Bintang tumbuh sebesar 3,97%, TPK Hotel Non-Bintang tumbuh sebesar 6,28%, Survei khusus Asrama dan Rumah Kos tumbuh sebesar 3,8%. Sementara secara tahunan TPK Hotel Bintang tumbuh sebesar 6,74%, Survei khusus Asrama dan Rumah Kos berkontraksi sebesar 3,44%.

2) PDRB Menurut Pengeluaran

Perhitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari perhitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Menurut sisi pengeluaran, Ekonomi Kalimantan Barat triwulan II-2023 dibanding triwulan I-2023 tumbuh sebesar 1,59% (q-to-q). Komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yaitu sebesar 11,24%; diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 8,48%; Komponen PMTB sebesar 5,32%; Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai pengurang sebesar 5,64%; dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 3,04%. Sementara itu, terdapat komponen yang mengalami kontraksi yaitu Ekspor Barang dan Jasa yang berkontraksi sedalam 17,45%. Struktur PDRB Kalimantan Barat menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku Triwulan II-2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Kalimantan Barat masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup hampir separuh PDRB Kalimantan Barat yaitu sebesar 49,93%; diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 31,78%; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 13,32%; Komponen PK-P sebesar 11,36%; Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai pengurang sebesar 6,65%; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 1,30%.



Sumber: BPS Kalbar (diolah)

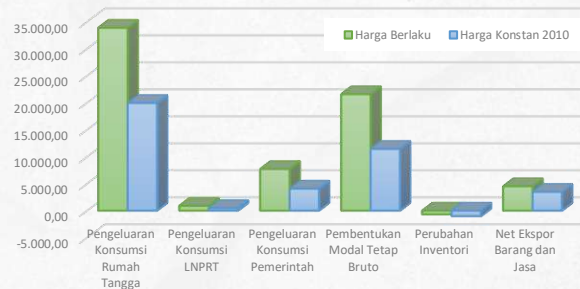
Secara tahunan, Kalimantan Barat pada triwulan II-2023 dibanding triwulan II-2022 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,00%. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada komponen Impor Barang dan Jasa sebagai pengurang yaitu sebesar 53,91%; diikuti oleh komponen PK-P sebesar 14,62%; Komponen PK-LNPRT sebesar 10,08%; Komponen PMTB sebesar 8,62%; dan komponen PK-RT sebesar 5,80%. Sementara itu, Ekspor Barang dan Jasa mengalami kontraksi sedalam 35,19%. Sementara secara kumulatif, ekonomi Kalimantan Barat kumulatif triwulan II-2023 dibanding kumulatif triwulan II-2022 tumbuh sebesar 4,32% (c-to-c). Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali Komponen Ekspor Barang dan Jasa. Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai pengurang mengalami pertumbuhan sebesar 48,10%; Komponen PK-P tumbuh sebesar 14,35%; Komponen PMTB tumbuh sebesar 7,35%; Komponen PK-LNPRT tumbuh sebesar 7,13%; dan komponen PK-RT tumbuh sebesar 4,85%. Sementara itu, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami kontraksi sedalam 26,20%.

Berdasarkan data BPS, peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga didorong oleh meningkatnya sub komponen PKRT terutama pada kelompok pendidikan, transportasi dan pakaian. Pengetatan ekspor hasil tambang mentah (bauksit) berdampak pada produksi hasil tambang pada triwulan II-2023.

Secara triwulanan volume ekspor bauksit terkontraksi sebesar 35,13%. Sementara secara tahunan volume ekspor bauksit terkontraksi sebesar 55,75%. Di sisi lain produksi penggalian pasir masih tumbuh sebesar 112,38% secara triwulanan seiring meningkatnya permintaan di sektor konstruksi. Sedangkan untuk

industri Alumina volume ekspor tumbuh sebesar 17,23% secara triwulanan dan 0,11% secara tahunan. Secara triwulanan Belanja Pegawai meningkat sebesar 76,31% dan Penyusutan Barang Modal meningkat sebesar 119%. Sementara secara tahunan Belanja Pegawai juga mengalami peningkatan sebesar 3,96% dan penyusutan Barang Modal juga meningkat sebesar 81,99%.

Grafik 1.5.
Nilai PDRB Kalbar Triwulan II-2023 Menurut Pengeluaran



Sumber: BPS Kalbar (diolah)

1.1.2. Kontribusi Fiskal (Pengeluaran Pemerintah) terhadap Pembentukan PDRB

Menurut pendekatan pengeluaran, komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terdiri dari pengeluaran sektor rumah tangga: Konsumsi (*Consumption, C*), pengeluaran sektor swasta: Investasi (*Investment, I*), pengeluaran pemerintah: Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure, G*), dan sektor luar negeri/daerah: ekspor bersih (*net export, NX*). Produsen swasta menghasilkan barang dan jasa yang diminta oleh rumah tangga untuk konsumsi (*C*), pemerintah untuk pengeluaran pemerintah (*G*) dan luar negeri dalam bentuk ekspor (*X*). Namun, konsumen domestik juga minta barang dan jasa dari luar negeri dalam bentuk impor. Secara matematis output yang diproduksi (*Y*) akan sama dengan output yang dikonsumsi rumah tangga (*C*), diinvestasikan (*I*), dikonsumsi pemerintah



(G), diminta luar negeri (X), selain itu output juga berasal dari luar negeri (M). Secara matematis, PDRB menurut pendekatan ini dapat dirumuskan sebagai $Y=C+I+G+(X-M)$.

a. Kontribusi belanja Pemerintah terhadap PDRB

Berdasarkan rilis data BPS Kalbar, pada Triwulan II-2023 total Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar Rp7.708,85 miliar. Dengan total PDRB (ADHB) pada Triwulan II-2023 sebesar Rp67.857,24 miliar. Maka kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB Kalimantan Barat Triwulan II-2023 adalah sebesar 11,36%.

$$\text{Kontribusi Belanja Pemerintah terhadap PDRB:} \\ \frac{\text{Pengeluaran Konsumsi Pemerintah}}{\text{Total PDRB}} = \frac{\text{Rp7.708,85 miliar}}{\text{Rp67.857,24 miliar}} = 11,36\%$$

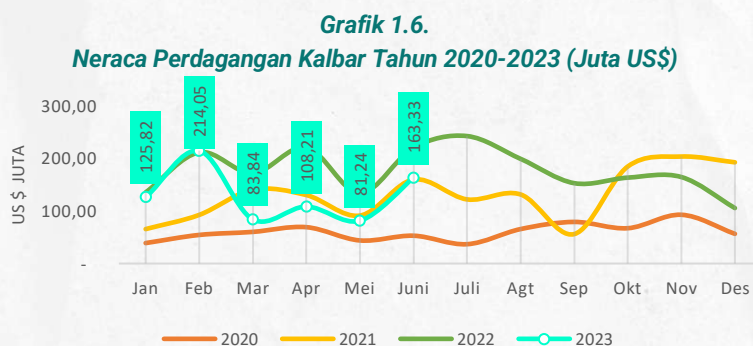
b. Kontribusi investasi Pemerintah terhadap PDRB

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen penyusun PDRB yang merepresentasikan besaran investasi. Dengan PMTB Kalbar Triwulan II-2023 sebesar Rp21.563,20 miliar, maka kontribusi investasi pemerintah terhadap PDRB adalah 31,78%.

$$\text{Kontribusi Investasi Pemerintah terhadap PDRB:} \\ \frac{\text{PMTB}}{\text{Total PDRB}} = \frac{\text{Rp21.563,20 miliar}}{\text{Rp67.857,24 miliar}} = 31,78\%$$

Beberapa hal yang mendorong kontribusi ini adalah adanya peningkatan belanja modal pada realisasi anggaran APBN dan APBD serta meningkatnya impor barang modal serta adanya rekonstruksi dan kelanjutan pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing sehingga meningkatkan Pengeluaran Komponen PMTB. Selain itu juga didorong oleh besarnya anggaran belanja modal pada Kementerian PUPR ini sesuai dengan fokus pembangunan di Kalimantan Barat yaitu program Pembangunan Infrastruktur berupa Konektivitas Darat (Jalan, Jembatan) serta Program Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1.1.3. Neraca Perdagangan Internasional



Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Nilai neraca perdagangan Kalimantan Barat Juni 2023 surplus US \$ 163,33 juta, sedangkan secara kumulatif Januari - Juni 2023 juga surplus US \$ 776,49 juta. Neraca perdagangan Juni 2023 dibandingkan terhadap Mei 2023, naik

101,05 persen. Pada sisi ekspor, Bahan Kimia Anorganik (HS28); Lemak & Minyak Hewan/Nabati (HS15); serta Karet dan Barang dari Karet (HS40) merupakan tiga golongan barang unggulan ekspor Kalimantan Barat Juni 2023, yaitu masing-masing berkontribusi 46,78 persen, 32,51 persen, dan 5,80

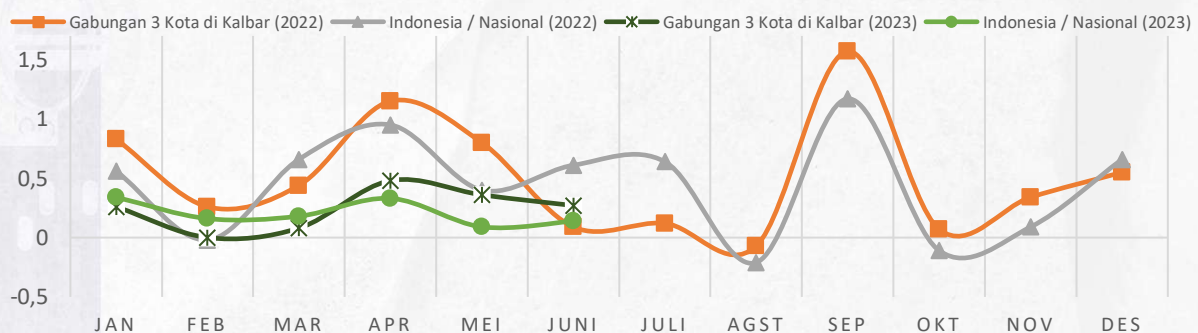
persen. India, Pakistan, dan Mesir merupakan tiga negara tujuan ekspor Kalimantan Barat terbesar pada Juni 2023. Pada sisi impor, Bahan Bakar Mineral (HS27), Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (HS84), dan Gandumgandum (HS10) merupakan penyumbang impor terbesar Kalimantan Barat pada Juni 2023. Ketiga golongan barang tersebut menyumbang masing-masing 35,54 persen, 31,71 persen, dan 10,08 persen dengan kontribusi 77,32 persen. Tiongkok, Malaysia, dan Singapura merupakan tiga negara pemasok terbesar impor Kalimantan Barat pada Juni 2023.

Pemerintah daerah perlu menyadari pentingnya keberadaan terminal yang disebut sebagai “jalur sutra” karena mampu menjembatani ekspor berbagai produk Kalbar ke manca negara serta menjadi jalan pintas (*shortcut*) untuk menekan tingginya biaya dan jarak tempuh berbagai ekspor Kalbar yang selama ini masih harus melewati Singapura. Selain itu, Terminal Pelabuhan Internasional Kijing ini juga menyediakan pula Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mempawah seluas 5.000 hektar, sehingga keberadaan pelabuhan raksasa diperkirakan juga akan semakin menambah devisa negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalbar khususnya Kabupaten Mempawah.

1.1.4. Inflasi

Berdasarkan hasil pemantauan BPS gabungan 3 kota IHK di Kalimantan Barat pada Juni 2023 terjadi inflasi *year-on-year* sebesar 4,10% atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 116,14 pada Mei 2022 menjadi 116,45 pada Juni 2023. Tingkat inflasi *month to month* (mtm) dan tingkat inflasi *year to date* (ytd) Juni 2023 sebesar 0,27 persen dan 1,46 persen. Penyumbang utama inflasi bulanan di antaranya adalah komoditas daging ayam ras, bawang putih, dan cabai rawit dengan andil masing-masing sebesar 0,1662%; 0,0661%, dan 0,0482%. Penyumbang utama inflasi tahunan di antaranya adalah komoditas bensin, rokok kretek filter, dan beras dengan andil masing-masing sebesar 1,0264%; 0,4030%; dan 0,2526%.

Grafik 1.7.
Tren Inflasi Kalbar 2022-2023 (Juni)



Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Meskipun inflasi cenderung terkendali, namun tetap perlu diwaspadai. Daging ayam menjadi salah satu komoditas yang perlu diperhatikan. Berdasarkan informasi dari BPS, daging ayam menjadi salah satu potensi penyumbang inflasi dikarenakan kenaikan harga pakan ayam. Namun demikian fenomena ini tidak hanya terjadi di Kalbar, melainkan juga secara nasional.



Pada Juni 2023 inflasi gabungan tiga kota di Kalimantan Barat secara bulanan (m-to-m) sebesar 0,27%. Singkawang, Pontianak, dan Sintang mengalami inflasi yoy masing-masing sebesar 4,37 persen; 4,26 persen; dan 2,52 persen. Inflasi yoy terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks pada sebelas kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan indeks berturut-turut dari yang tertinggi yaitu kelompok transportasi sebesar 13,24%; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,00%; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,88%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,12%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,15%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,97%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,92%; kelompok pendidikan sebesar 1,36%; kelompok kesehatan sebesar 0,76%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,74%; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,30%.

Tabel 1.1.
Inflasi menurut Kelompok Pengeluaran Provinsi Kalimantan Barat 2023

Kelompok Pengeluaran Inflasi (2018=100)	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Makanan, Minuman, dan Tembakau	0,78	-0,46	0,04	0,45	0,89	1,32
Pakaian dan Alas Kaki	0,08	0,01	0,02	1,41	0,11	0,10
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,22	0,07	0,12	0,01	0,01	0,10
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,22	0,18	-0,11	0,13	0,17	0,17
Kesehatan	-0,37	0,11	-0,30	0,49	0,23	0,13
Transportasi	-0,51	0,69	0,29	1,58	0,18	-1,82
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,14	-0,01	-0,05	0,00	0,05	0,08
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,08	0,20	0,20	-0,03	0,00	0,36
Pendidikan	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,08	0,37	0,00	0,03	0,06	0,22
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,27	0,17	0,32	0,56	0,22	0,08
Umum	0,26	0,00	0,08	0,48	0,36	0,27

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Selain itu, *administered price* atau biaya komoditi yang ditentukan oleh pemerintah pusat menjadi penyebab cukup tingginya angka inflasi Kalimantan Barat seperti angkutan udara, harga rokok, BBM, dan listrik dan juga sebagai komoditas dominan yang memberi andil pada inflasi Kalbar. Kalbar terutama Pontianak sangat sensitif terhadap konsumsi bensin. Sehingga, jika terjadi penurunan harga bensin, maka otomatis akan mempengaruhi penurunan inflasi.

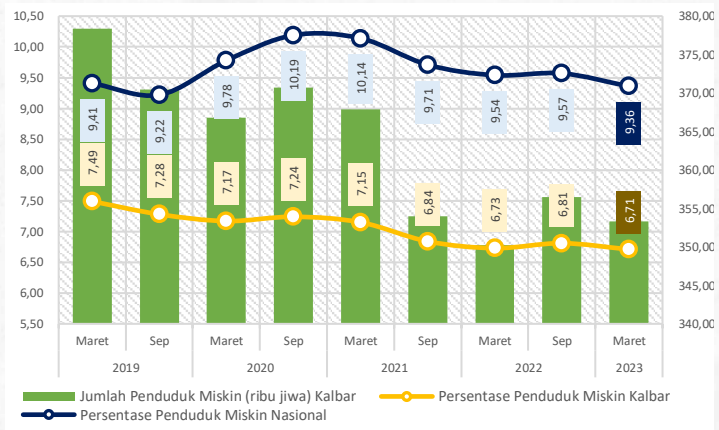
1.2. Perkembangan dan Analisis Indikator Kesejahteraan

Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah selain memperhatikan sisi ekonomi juga harus menekankan pada pertumbuhan, kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia. Secara umum, kinerja ekonomi publik ditunjukkan oleh tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercermin dalam beberapa indikator diantaranya tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, rasio gini, Nilai Tukar Petani (NTP), dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).

1.2.1. Kemiskinan

Pembangunan di satu sisi selain meningkatkan kesejahteraan, namun di sisi lain ketidakmerataannya dapat menyebabkan lahirnya keterbelakangan dan kemiskinan. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 6,71%, turun 0,10% poin terhadap September 2022 dan menurun 0,02% poin terhadap Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 353,35 ribu orang, turun 3,2 ribu orang terhadap September 2022 dan meningkat 3,1 ribu orang terhadap Maret 2022. Berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, periode Maret 2022 – Maret 2023, jumlah penduduk miskin di perkotaan meningkat sebesar 2,35 ribu orang dari 85,04 ribu orang Maret 2022 menjadi 87,39 ribu orang Maret 2023. Sejalan dengan kondisi di perkotaan, penduduk miskin di pedesaan juga mengalami peningkatan. Jumlah penduduk miskin di pedesaan meningkat 0,75 ribu orang dari 265,21 ribu orang Maret 2022 menjadi 265,96 ribu orang Maret 2023.

Grafik 1.8.
Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kalbar & Nasional Tahun 2019 s.d. 2023



Sumber: BPS Nasional dan Kalbar (diolah)

Apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan secara nasional, kemiskinan di Kalbar tergolong masih cukup baik dibuktikan dengan tingkat kemiskinan yang selalu berada di bawah rata-rata nasional sejak tahun 2019 sampai dengan 2023. Hal ini tidak luput dari berbagai upaya dan intervensi baik pemerintah pusat maupun daerah terus dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin secara bertahap khususnya

Tabel 1.2.
Garis Kemiskinan Kalbar

Gabungan Perkotaan & Perdesaan	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
Maret 2022	397.561	123.099	520.660
Sep 2022	421.139	130.528	551.667
Maret 2023	425.767	137.521	563.288
Perubahan Mar'22–Sept'22(%)	5,93	6,03	5,96
Perubahan Sept'22-Mar'23(%)	1,10	5,36	2,11

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan pada Maret 2023 adalah sebesar Rp563.288 per kapita per bulan. Dibandingkan September 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,11%. Sementara jika dibandingkan Maret 2022 dengan Setember 2022, terjadi kenaikan sebesar 5,96%. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2022 sebesar 75,59%.

pada masa pandemi tahun 2020-2022. Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah



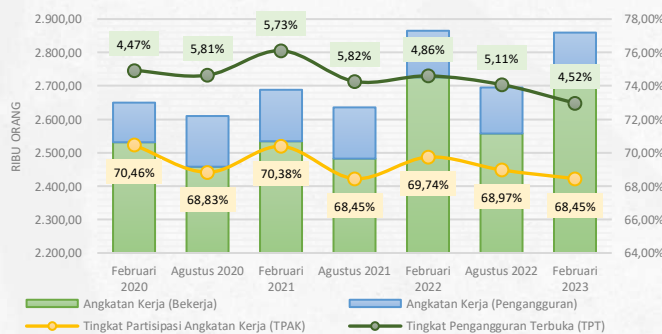
Ada beberapa faktor penyebab kemiskinan, seperti rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, lapangan kerja yang rendah dan terisolasinya suatu penduduk. Dikutip dari World Bank, lima faktor yang dianggap dapat memengaruhi kemiskinan, yaitu pendidikan, jenis pekerjaan, *gender*, akses terhadap layanan kesehatan dan infrastruktur dan lokasi geografis.

Beberapa kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah guna mengurangi angka kemiskinan melalui strategi ekonomi adalah melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan penanganan kelompok rentan miskin. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan seperti menciptakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin, mewujudkan koperasi yang berkualitas, dan menciptakan industri kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal. Sedangkan program peningkatan penanganan kelompok rentan miskin dapat dilakukan melalui meningkatkan kualitas dan pemerataan jumlah sarana sosial, meningkatkan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial, meningkatkan pemberdayaan sosial dan kapasitas hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan meningkatkan kualitas penanganan dan pembinaan anak terlantar.

1.2.2. Pengangguran

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Penduduk usia kerja di Kalimantan Barat pada Februari 2023 sebanyak 4,18 juta orang, naik sebanyak 69,23 ribu orang jika dibanding Februari 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 2,86 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 1,32 juta orang. Komposisi angkatan kerja pada

Grafik 1.9.
Angkatan Kerja, TPAK, dan TPT Kalbar Februari 2020 - 2023



Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Februari 2023 terdiri dari 2,73 juta orang penduduk yang bekerja dan 129,22 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2022, jumlah angkatan kerja menurun sebanyak 5,55 ribu orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 4,6 ribu orang, sementara pengangguran turun sebanyak 10,14 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan dibanding Februari 2022. TPAK pada Februari 2023 sebesar 68,45 persen, turun 1,29 persen poin dibanding Februari 2022. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Kalimantan Barat berdasarkan hasil Sakernas Februari 2023 sebesar 4,52 persen.

Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima orang penganggur. Pada Februari 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,34 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022. Pada Februari 2023, TPT laki-laki sebesar 4,61 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 4,37 persen. TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,68 persen poin, sebaliknya TPT perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,18 persen poin jika dibandingkan Februari 2022. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (7,21 persen) dua kali lebih tinggi TPT di daerah perdesaan (3,11 persen). TPT menurut daerah tempat tinggal memiliki pola yang sama dengan TPT Provinsi yaitu turun dibandingkan Februari 2022, masing-masing sebesar 0,96 persen poin untuk TPT Perkotaan dan 0,01 persen poin untuk TPT Perdesaan.

1.2.3. Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini (*gini ratio*) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah, Koefisien Gini memiliki indeks yang memiliki rentang nilai antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 berarti tidak ada kesenjangan ekonomi, atau perekonomian merata pada daerah tersebut. Sementara itu, nilai 1 menunjukkan nilai kesenjangan maksimal.

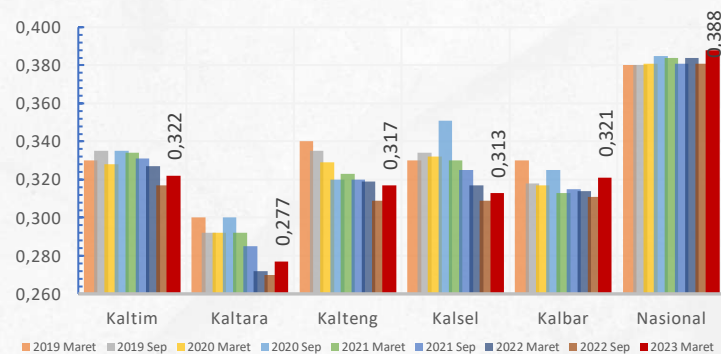
Distribusi pendapatan suatu daerah dikatakan sangat timpang bila angka koefisien gini terletak antara 0,5 sampai 0,7 dan relatif merata bila angka Koefisien Gini terletak antara 0,2 sampai 0,35. Pada Maret 2023, koefisien rasio gini di Kalimantan Barat terpantau lebih baik karena masih terjaga dibawah rata rata nasional.

Tingkat ketimpangan

pengeluaran penduduk Kalimantan Barat yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,321. Angka ini naik 0,01 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,311 dan naik 0,007 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,314.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,348, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,334 dan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,342. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,273, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,264 dan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,265. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 21,33 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 20,10 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 23,26 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Grafik 1.10.
Tren Rasio Gini Kalbar dan Nasional 2017-2023



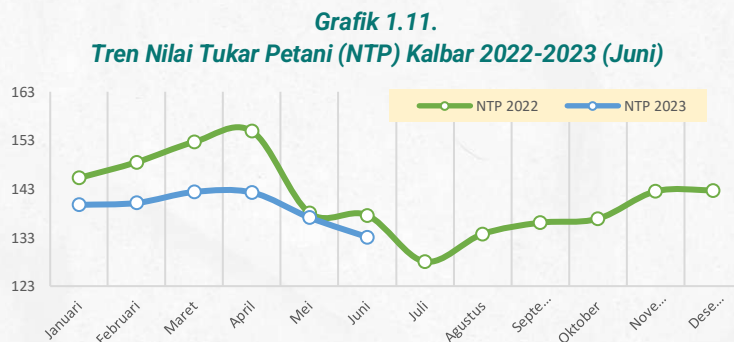
Sumber: BPS Kalbar (diolah)



Mengacu pada Bank Dunia tingkat ketimpangan di Kalimantan Barat dan Indonesia masih termasuk ke dalam kategori ketimpangan yang rendah. Namun demikian, meskipun sudah berada dibawah rata-rata nasional, Pemerintah Daerah terus melakukan upaya melalui pembangunan yang diprioritaskan pada daerah relatif tertinggal. Terutama dalam hal penyediaan pelayanan publik agar kesenjangan antar daerah kota dan kabupaten tidak semakin lebar. Orientasi pembangunan tidak semata berorientasi pada mengejar pertumbuhan yang tinggi tetapi juga harus mempertimbangkan pemerataan dan kesejahteraan.

1.2.4. Nilai Tukar Petani (NTP)

Sektor Pertanian merupakan penunjang utama perekonomian Kalimantan Barat, baik sebagai penghasil nilai tambah maupun sumber penghasilan atau penyedia lapangan kerja sebagian besar penduduk. Kondisi nilai tukar petani sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani (It),



Sumber: BPS Kalbar (diolah)

dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani (Ib) dari proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga. Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat Juni 2023 sebesar 133,10 poin atau turun 2,92% dibanding Mei 2023 (137,11). Penurunan NTP pada

Juni 2023 disebabkan oleh kenaikan indeks harga hasil produksi yang lebih rendah dibandingkan kenaikan pada indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun indeks harga biaya produksi dan penambahan barang modal.

Pada Juni 2023, Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It) turun sebesar 2,58% dibanding It Mei 2023, yaitu dari 159,83 poin menjadi 155,71 poin. Komoditas

yang menjadi penyumbang terbesar turunnya It yaitu kelapa sawit, karet, jeruk, dan kelapa. Sementara Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib) naik sebesar 0,36 persen bila dibandingkan Ib Mei 2023, yaitu dari 116,57 poin pada Mei 2023 menjadi 116,99 poin pada Juni 2023. Komoditas yang menjadi penyumbang terbesar naiknya Ib yaitu daging ayam ras, kacang panjang, rokok kretek filter, cabai rawit, dan ikan tongkol. Secara umum nilai NTP dapat diartikan, jika NTP >100 maka petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding

Tabel 1.3.
Perbandingan NTP Tahun 2023 di Pulau Kalimantan dan Nasional

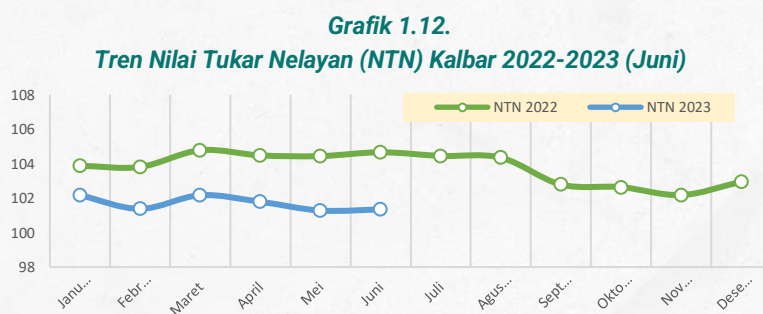
Regional	NTP 2023					
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Kalimantan Barat	139,72	140,12	142,38	142,27	137,11	133,10
Kalimantan Tengah	118,93	119,32	121,83	123,30	118,98	115,25
Kalimantan Selatan	107,94	109,19	110,12	108,78	107,27	107,38
Kalimantan Timur	129,77	131,87	133,01	131,08	127,81	125,50
Kalimantan Utara	112,50	113,47	113,34	112,59	111,41	111,37
Nasional	109,84	110,53	110,85	110,58	110,20	110,41

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

tingkat kesejahteraan petani sebelumnya. Sebaliknya jika nilai NTP <100, berarti petani mengalami defisit, dimana kenaikan harga produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya. Capaian NTP Kalimantan Barat yang berada jauh di atas 100 ini bisa dikatakan sangat tinggi bahkan tertinggi di antara regional Kalimantan dan secara Nasional. Namun demikian, apabila dicermati capaian NTP yang begitu tinggi di Kalbar ini tidak lepas dari sawit dan karet (Tanaman Perkebunan Rakyat) yang menjadi andalan petani atau masyarakat di Kalbar. Harga yang baik pada kedua komoditas tersebut membuat pendapatan petani tetap terjaga dan menjadi salah satu komoditas ekspor yang berperan strategis bagi perekonomian nasional maupun daerah.

1.2.5. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Menurut data yang dirilis oleh BPS Kalbar, Provinsi Kalimantan Barat tidak menghitung Nilai Tukar Nelayan, namun masuk dalam sub sektor perikanan (tangkap dan budidaya) pada perhitungan Nilai Tukar Petani. Jika diasumsikan NTN adalah perhitungan nilai tukar di sektor perikanan saja (Subsektor Perikanan Tangkap dan Subsektor Perikanan Budidaya), maka diperoleh NTN di Kalimantan Barat pada kurun waktu 2022-2023 sebagai berikut:

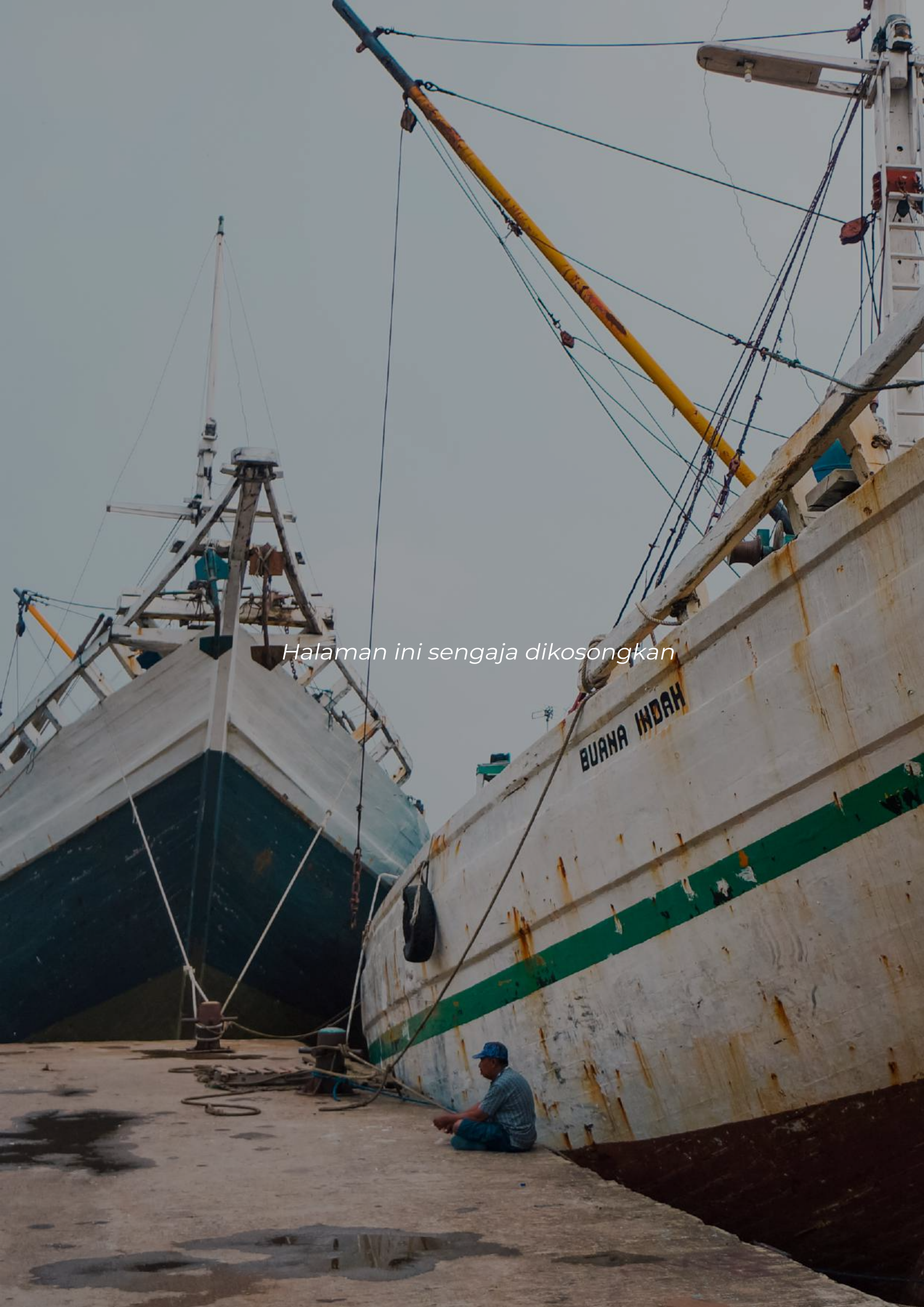


Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Pada Juni 2023, terjadi kenaikan NTNP sebesar 0,07% dari yang semula 101,28 (Mei 2023) menjadi 101,35 pada Juni 2023. Pada Juni 2023, terjadi kenaikan NTNP sebesar 0,07%. Hal ini terjadi karena It naik sebesar 0,33%,

sedangkan Ib hanya naik 0,27%. Kenaikan It disebabkan oleh naiknya harga dua kelompok penyusun Subsektor Perikanan, yaitu Kelompok Perikanan Tangkap sebesar 0,28% dan kelompok Perikanan Budidaya sebesar 0,61%. Secara total, perubahan It Subsektor Perikanan mengikuti arah perubahan It Subsektor Perikanan Tangkap.

Beberapa kebijakan pemerintah yang mempengaruhi NTP dan NTN sebagai diantaranya adalah melalui bantuan pemerintah untuk petani yang disalurkan melalui Kementerian Pertanian berupa bibit, alat dan mesin pertanian, pembagunan pelabuhan perikanan, bantuan sarana penangkap ikan (kapal, jaring, pancing, bubu) dan sarana pascapanen tanaman pangan, pembangunan irigasi dan bantuan kelompok tani. Untuk NTN, melalui bantuan pemerintah untuk nelayan yang disalurkan melalui KKP: BLT Nelayan, pembangunan pasar, dan sentra kuliner ikan, pelatihan nelayan, bantuan kapal dan sarpras pengolahan ikan, serta dengan pemberian subsidi pupuk dan subsidi energi. Program lainnya adalah melalui pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui KUR dan UMi KUR sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi dan jasa produksi) mendapat prioritas utama dalam pembiayaan.



Halaman ini sengaja dikosongkan



KFR
Triwulan II-2023



BAB II

Analisis Fiskal Regional



BAB II

Analisis Fiskal Regional



2.1. Analisis Laporan Realisasi Anggaran (APBN)

APBN masih menjadi instrumen utama dan penting dalam mengelola dan menstabilkan perekonomian, baik dalam situasi pandemi maupun instrumen untuk mendukung pemulihan ekonomi dalam menghadapi tantangan baru. Sejalan dengan pelaksanaan APBN di tingkat pusat, APBN di Kalimantan Barat juga terus didorong sebagai *shock absorber* untuk tetap menjaga pemulihan ekonomi agar tetap berlanjut dan semakin menguat. Selain itu, APBN juga berperan dalam menjaga penanganan kesehatan dan melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan dan menjaga agar pengelolaan fiskal lebih sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah.

Berdasarkan informasi dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat & Kanwil Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Barat, dalam APBN Kalimantan Barat TA 2023 target pendapatan yang ditetapkan adalah sebesar Rp12.082,96 miliar dan berdasarkan OM-SPAN, Pagu Belanja sebesar Rp30.835,76 miliar, sehingga terdapat rencana defisit sebesar Rp18.752,80 miliar. Secara umum apabila dibandingkan dengan realisasi APBN pada periode yang sama di tahun sebelumnya (Triwulan II 2022), realisasi pendapatan negara pada APBN Kalimantan Barat sampai dengan akhir Juni atau Triwulan II 2023 mengalami kontraksi sebesar 19,75% dengan realisasi sebesar Rp5.636,16 miliar dari total target pendapatan atau sebesar 46,65% dari target pendapatan negara. Seluruh pos penerimaan mengalami kontraksi kecuali pada Cukai, Pajak Lainnya, dan PNBP.

Sementara pada sisi Belanja Negara, tercatat pertumbuhan positif sebesar 2,22% dengan realisasi sebesar Rp 13.216,48 miliar dari total pagu belanja atau sekitar 42,86%. Belanja ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp4.514,53 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp8.701,95 miliar. Seluruh pos belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan serapan (yoy), sedangkan TKDD mengalami kontraksi kecuali pada DBH dan DAK Fisik. Beberapa langkah-langkah strategis terus dilakukan pada pelaksanaan anggaran tahun 2023 khususnya untuk mendorong realisasi Belanja Pemerintah Pusat (Belanja Kementerian/Lembaga) yaitu melalui perbaikan perencanaan, percepatan pelaksanaan program/kegiatan/proyek, percepatan pengadaan barang dan jasa, percepatan penyaluran dana bantuan sosial dan bantuan pemerintah yang tepat sasaran, dan peningkatan monitoring dan efektivitas belanja.

Tabel 2.1.

Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2023

URAIAN	Tahun 2022			Tahun 2023			% Growth	
	Target / Pagu	Realisasi	%real	Target / Pagu	Realisasi	%real	Pagu	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	11.410,30	7.023,54	61,55	12.082,96	5.636,16	46,65	5,90	(19,75)
Penerimaan Perpajakan	10.568,75	6.538,76	61,87	11.282,62	5.059,35	44,84	6,75	(22,63)
a. Pajak Dalam Negeri	8.897,07	5.399,93	60,69	10.727,21	4.822,09	44,95	20,57	(10,70)
i. Pajak Penghasilan	4.102,53	2.901,23	70,72	4.488,99	2.403,54	53,54	9,42	(17,15)
ii. Pajak Pertambahan Nilai	4.211,77	2.390,07	56,75	5.567,13	2.299,31	41,30	32,18	(3,80)
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	403,18	54,64	13,55	506,25	31,72	6,27	25,56	(41,95)
iv. Cukai	38,30	18,92	49,41	72,01	39,78	55,25	88,00	110,23
v. Pajak Lainnya	141,28	35,06	24,82	92,83	47,74	51,43	(34,30)	36,15
b. Pajak Perdagangan Internasional	1.671,68	1.138,83	68,13	555,42	237,27	42,72	(66,77)	(79,17)
i. Bea Masuk	36,11	24,46	67,73	29,89	21,34	71,40	(17,22)	(12,74)
ii. Bea Keluar/Pungutan Ekspor	1.635,56	1.114,37	68,13	525,52	215,92	41,09	(67,87)	(80,62)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	841,55	484,77	57,60	800,34	576,81	72,07	(4,90)	18,99
a. PNBP Lainnya	339,67	288,53	84,95	345,89	370,42	107,09	1,83	28,38
b. Pendapatan Badan Layanan Umum	501,89	196,24	39,10	454,44	206,38	45,41	(9,45)	5,17
c. Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Negara	30.268,51	12.929,79	42,72	30.835,76	13.216,48	42,86	1,87	2,22
Belanja Pemerintah Pusat	10.722,33	3.726,00	34,75	11.297,00	4.514,53	39,96	5,36	21,16
Belanja Pegawai	3.923,12	1.839,20	46,88	3.976,50	1.991,47	50,08	1,36	8,28
Belanja Barang	4.058,55	1.435,18	35,36	4.930,13	1.938,62	39,32	21,48	35,08
Belanja Modal	2.732,50	447,82	16,39	2.379,74	580,37	24,39	(12,91)	29,60
Belanja Bantuan Sosial	8,16	3,81	46,77	10,63	4,07	38,29	30,32	6,71
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	19.546,18	9.203,78	47,09	19.538,76	8.701,95	44,54	(0,04)	(5,45)
Dana Bagi Hasil	1.977,36	175,97	8,90	1.321,35	404,58	30,62	(33,18)	129,91
Dana Alokasi Umum	10.854,73	6.260,82	57,68	11.552,61	5.648,13	48,89	6,43	(9,79)
Dana Alokasi Khusus Fisik	1.664,02	108,37	6,51	1.706,79	204,63	11,99	2,57	88,83
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	2.996,26	1.676,59	55,96	3.075,85	1.511,80	49,15	2,66	(9,83)
Dana Otsus & DID	160,00	46,93	29,33	22,13	11,07	50,00	(86,17)	(76,42)
Dana Desa	1.893,81	935,09	49,38	1.860,03	921,75	49,56	(1,78)	(1,43)
Surplus/Defisit Anggaran	(18.858,21)	(5.906,25)	31,32	(18.752,80)	(7.580,32)	40,42	(0,56)	28,34

Sumber: OM SPAN, SIMTRADA, Kanwil DJP Kalbar, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat

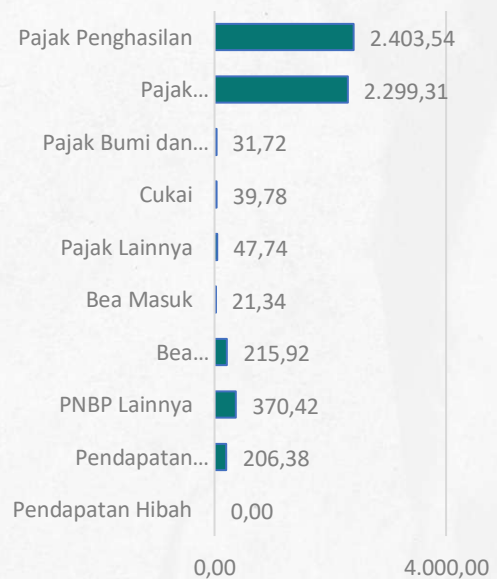
2.1.1. Pendapatan Negara

a. Analisa Kontribusi Pendapatan Negara dan Hibah

Berdasarkan data realisasi dari OM-SPAN, sampai dengan Triwulan II 2023, realisasi pendapatan regional Kalbar menunjukkan pencapaian sebesar Rp5.636,16 miliar atau sebesar 46,65% dari target yang ditetapkan, penerimaan ini didominasi oleh penerimaan perpajakan dari PPN dan PPh. Capaian ini mengalami kontraksi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Komposisi utama dari pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan mencakup pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional dengan jumlah realisasi sebesar Rp5.059,35 miliar atau 89,77% dari total pendapatan. Sedangkan pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp576,81 miliar atau 10,23% dari total pendapatan.

Grafik 2.1.

Komponen Pendapatan Negara Triwulan II 2023

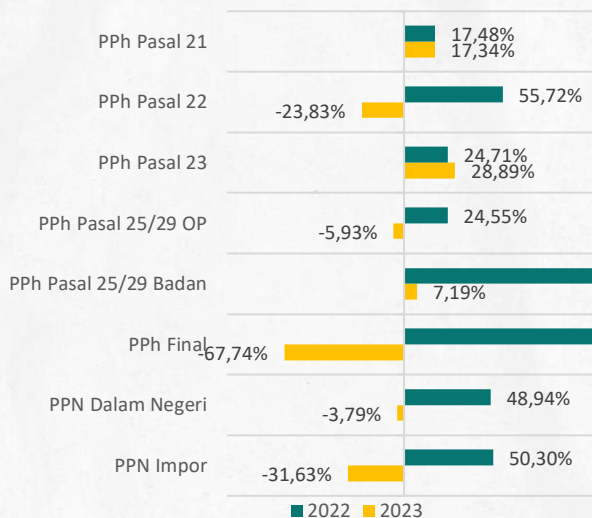


Sumber: OM SPAN, SIMTRADA, Kanwil DJP Kalbar, Kanwil DJBC Kalbagbar



b. Analisis Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan

Grafik 2.2.
Penerimaan Pajak Per Sektor sampai Triwulan II Tahun 2023



Sumber: Kanwil DJP Kalbar

1) Penerimaan Pajak

Berdasarkan penjelasan Kanwil DJP Kalimantan Barat, PPh 21 dan PPh 25/29 Badan mengalami penurunan pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. PPh 22, PPh 25/29 OP, PPh Final, PPN Dalam Negeri dan PPN impor dengan pertumbuhan negatif. Secara kumulatif, seluruh sektor dominan mencatat pertumbuhan negatif pada periode s.d 30 Juni 2023 sebesar 11,08%, turun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan 80,84%. Jumlah kontribusi atas 5 sektor unggulan sebesar 79,11% dari total penerimaan, menurun dari

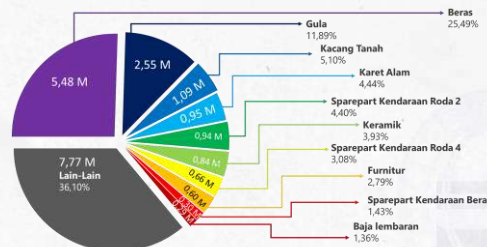
tahun lalu yang sebesar 78,64%. Sektor lainnya terdiri dari 16 sektor memberikan kontribusi sebesar 20,89% yang mengalami peningkatan dari kontribusi tahun sebelumnya yg sebesar 21,36 %

2) Penerimaan Bea Cukai

Secara lebih rinci total penerimaan dari Bea Cukai terdiri dari Pungutan Impor Rp232,85 miliar (secara lebih rinci: Bea Masuk Rp21,34 miliar, PPh Rp46,05 miliar, dan PPN Rp165,46 miliar), Pungutan Ekspor Rp686,95 miliar (secara lebih rinci: Bea Keluar Rp215,92 miliar, PPh Rp18,32 miliar, dan Dana Sawit Rp452,71 miliar), Pungutan Cukai Rp43,68 miliar (secara lebih rinci: cukai Rp39,78 miliar dan Pajak Rokok Rp3,9 miliar).

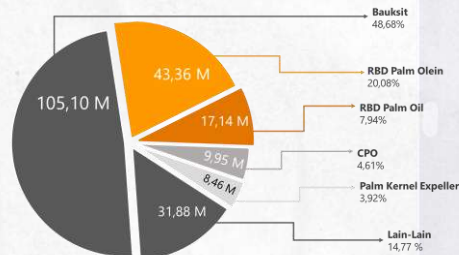
Top 10 Bea Masuk Komoditi Impor Kantor Wilayah DJBC Kalbagbar s.d. 30 Juni 2023 adalah Beras, Gula, Kacang Tanah, Karet Alam, Sparepart Kendaraan Roda 2, Keramik, Sparepart Kendaraan Roda 4, Furnitur, Sparepart Kendaraan Berat, dan Baja lembaran. Top 5 Bea Keluar Komoditi Ekspor Kantor Wilayah DJBC Kalbagbar s.d. 30 Juni 2023, yaitu Bauksit, RBD Palm Olein, RBD Palm Oil, CPO, dan Palm Kernel Expeller.

Grafik 2.3.
Top 10 Bea Masuk Komoditi Impor Kalimantan Barat



Sumber: Kanwil DJBC Kalbagbar

Grafik 2.4.
Top 5 Bea Keluar Komoditi Ekspor Kalimantan Barat



Sumber: Kanwil DJBC Kalbagbar

c. Analisis Komposisi PNBP

Meskipun belum ada realisasi pada komponen Pendapatan Hibah, namun total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan periode Triwulan II 2023 telah mencapai Rp576,81 miliar atau sebesar 72,07% dari target yang ditetapkan, angka ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 18,99% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan PNBP berasal dari PNBP Lainnya sebesar Rp370,42 miliar dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp206,38 miliar. Realisasi PNBP yang cukup tinggi ini didominasi oleh Satker Kepolisian dan Imigrasi serta perpanjangan waktu pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada BLU sektor pendidikan.

d. Analisa *tax ratio* terhadap PDRB

Tabel 2.2.
Rasio Penerimaan Perpajakan
terhadap PDRB di Kalbar
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan Triwulan II	PDRB ADHB Triwulan II	Rasio
2020	7.175,16	214.001,75	3,35%
2021	9.673,73	231.321,16	4,18%
2022	12.543,55	255.797,28	4,90%
2023 (TW II)	5.059,35	67.857,24	7,46%

Sumber: OMSPAN, DJP, DJBC dan BPS (diolah)

Tax Ratio Penerimaan Pajak terhadap PDRB wilayah Kalbar kurun waktu tahun 2020 sampai dengan Triwulan II 2022 cenderung mengalami kenaikan. Kegiatan perekonomian masyarakat yang naik signifikan sejak pandemi mulai mereda turut mendongkrak *tax ratio* di masa pandemi. Adapun faktor lain yang mempengaruhi secara tidak langsung adalah berbagai kebijakan di bidang perpajakan, utamanya insentif perpajakan yang masih berlangsung di beberapa sektor.

Sampai dengan Triwulan II-2023, *tax ratio* di Kalimantan Barat naik signifikan lebih dari 7% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, hal ini didorong implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mulai diterapkan pada tahun 2022 yang berpengaruh pada kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%, penambahan *tax bracket* pada PPh sebesar 35%, dan pajak karbon. Selain meningkatkan *tax ratio*, implementasi UU HPP juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pajak, dan mendorong terwujudnya sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, serta akuntabel.

2.1.2. Belanja Negara

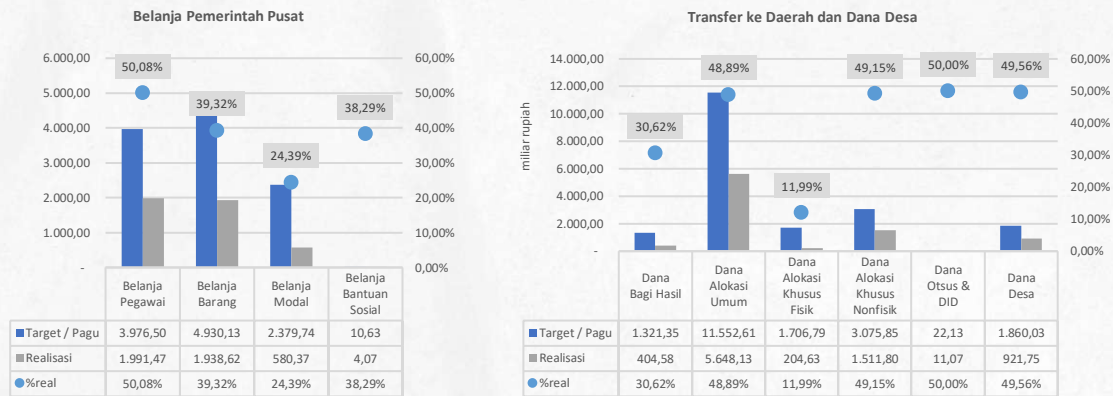
a. Analisis Kinerja Belanja Negara

Pada sisi belanja negara, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, capaian realisasi Belanja di APBN regional Kalbar adalah sebesar Rp13.216,48 miliar atau sebesar 42,86% dari total pagu anggaran, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp4.514,53 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp8.701,95 miliar. Seluruh pos belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan serapan (yoy), sedangkan TKDD mengalami kontraksi kecuali pada DBH dan DAK Fisik. 10 K/L dengan pagu terbesar terdiri dari: Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan, POLRI, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Perhubungan, Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Mahkamah Agung.



Grafik 2.5.

Pagu dan Realisasi Belanja Negara Triwulan II Tahun 2023



Sumber: OM SPAN dan SIMTRADA

Beberapa hambatan realisasi belanja Triwulan II Tahun 2023 diantaranya disebabkan oleh beberapa proyek strategis nasional yang belum terlaksana fisiknya dikarenakan kondisi cuaca & kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga terjadi hambatan dalam distribusi material, selain itu beberapa material juga masih menunggu kiriman dari perusahaan yang ada di Pulau Jawa. Tantangan pelaksanaan APBN awal tahun juga terjadi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa, persyaratan Kementerian Perindustrian terkait syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 25% untuk pengadaan sehingga satuan kerja perlu menyesuaikan pengadaan yang akan dilakukan, sedangkan beberapa barang tidak memiliki kualitas sesuai dengan pagu yang dianggarkan.

b. Analisis pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat dan TKDD

Tabel 2.3.

Kinerja APBN Berdasarkan 10 Kementerian/Lembaga Pagu Terbesar

Uraian (miliar Rp)	Pagu	Real s.d 23 Juni 2023	% terhadap pagu	Growth (%)	% terhadap total
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	3.041,17	1.017,82	33,47%	6380,49%	23,25%
KEMENTERIAN PERTAHANAN	1.625,09	775,33	47,71%	687,43%	17,71%
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.379,32	716,51	51,95%	508,02%	16,37%
KEMENTERIAN AGAMA	904,94	423,98	46,85%	179,45%	9,69%
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	907,30	308,53	34,01%	2892,30%	7,05%
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	609,97	211,35	34,65%	1701,20%	4,83%
KOMISI PEMILIHAN UMUM	368,84	193,73	52,53%	1446,38%	4,43%
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	249,05	118,46	47,56%	15,40%	2,71%
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	205,68	59,94	29,14%	544,64%	1,37%
MAHKAMAH AGUNG	179,08	88,79	49,58%	35,13%	2,03%

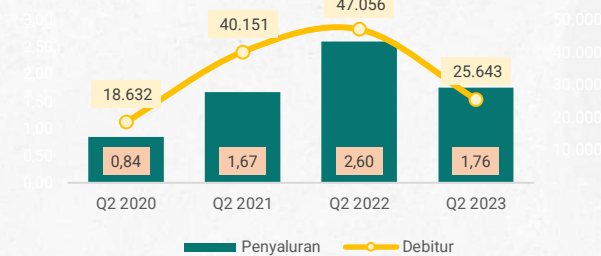
Sumber: MEBE, OM SPAN (diolah)

Dari total 511 satuan kerja (satker) di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat terdapat 10 satker yang total realisasi per Triwulan II Tahun 2023 telah menyumbang sebesar 89,44% dari total realisasi Belanja. Belanja tertinggi disumbang oleh satker Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu sebesar 52,53% atau Rp193,73 miliar dari pagu Rp368,84 miliar, mengalami peningkatan sebesar 1446,38% yoy disebabkan besarnya alokasi TA 2023 untuk kegiatan pelaksanaan

tahapannya pemilu, per 21 Juni 2023 KPU telah mendapatkan tambahan pagu sebesar Rp110,26 miliar. Tingginya realisasi KPU sebagian besar untuk operasional dan honor badan *ad hoc* di daerah. Belanja Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terendah dibanding K/L Besar lainnya yaitu sebesar Rp59,94 miliar atau 29,14% dari realisasi total. Hal ini disebabkan oleh sulitnya administrasi pencairan dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta menunggu arahan pusat untuk pelaksanaan kegiatan. Belanja terbesar disumbang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan realisasi sebesar Rp1.017,82 miliar dari total pagu Rp3.041,17 miliar, menyumbang 23,25% dari realisasi total seluruh K/L, didorong oleh realisasi Belanja Modal dari kontrak-kontrak yang telah dicairkan.

c. Manajemen Investasi Pemerintah (Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro)

Grafik 2.6.
Tren Penyaluran KUR Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2020-2023



Sumber: SIKP KUR (diolah)

Dalam perekonomian nasional, pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu prioritas pemerintah. UMKM menjadi tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan untuk mengurangi permasalahan kemiskinan dan dalam perkembangannya mampu memperluas basis ekonomi serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional. Melalui

kewirausahaan, UMKM berperan sangat penting dalam menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun karakter bangsa. Salah satu program pembiayaan UMKM yang diluncurkan pemerintah adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak bulan Agustus tahun 2015.

Pemerintah hadir melalui subsidi bunga dalam KUR sehingga pelaku usaha cukup membayar bunga sebesar 6% per tahun untuk debitur baru dan meningkat secara berjenjang sebesar 7%, 8%, dan 9% untuk debitur KUR berulang. Bahkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, suku bunga untuk KUR Super Mikro (plafon paling banyak Rp10 juta) hanya sebesar 3% per tahun. Subsidi bunga yang berasal dari pemerintah dalam program KUR tersebut diharapkan dapat membangkitkan semangat UMKM sehingga dapat memberikan *multiplier effect* dalam mendorong kebangkitan perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19.

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, penyaluran KUR di wilayah Kalimantan Barat mencapai Rp1,76 triliun. Penyaluran tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Penyaluran KUR triwulan II tahun 2022 telah disalurkan untuk 47.056 debitur



sementara pada triwulan II 2023 hanya mencapai 25.643 debitur. Kondisi trend penurunan penyaluran KUR tahun 2023 tersebut diakibatkan oleh beberapa hal antara lain:

- a. Perubahan kebijakan penyaluran KUR yang cukup berarti pada awal tahun 2023 melalui Permenko No. 1 Tahun 2023, seperti perubahan persyaratan kriteria calon debitur KUR baru, debitur yang pernah mengakses kredit investasi tidak diperbolehkan menerima KUR, pengenaan bunga berjenjang untuk debitur berulang, dan sanksi yang dikenakan kepada bank penyalur yang mengenakan agunan tambahan bagi KUR Mikro. Beberapa peraturan baru tersebut menyebabkan perbankan menjadi semakin selektif dalam menyalurkan KUR kepada debiturnya.
- b. *Shifting* pembiayaan ke pembiayaan *Fintech* (*Financial Technology*).
Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, penyaluran pinjaman *fintech* nasional mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 59,95% untuk periode triwulan II tahun 2023. Kenaikan pinjaman *fintech* juga terjadi di wilayah Kalimantan Barat dengan akumulasi penyaluran pada triwulan II ini mencapai Rp4,05 triliun, meningkat 70,37% dari tahun sebelumnya.
- c. UMKM masih memiliki pinjaman dari tahun-tahun sebelumnya.
- d. Masyarakat (Pelaku UMKM) membutuhkan pembiayaan yang bukan hanya untuk tujuan produktif.
- e. Adanya target dari perbankan yang tidak hanya menyalurkan produk KUR.

Untuk mengatasi kondisi tersebut baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bersikap pro aktif terhadap berbagai dinamika perubahan kebijakan yang terjadi. Sosialisasi serta pengambilan kebijakan dalam penyesuaian kebijakan penyaluran KUR 2023 telah dilakukan oleh pemerintah daerah di Kalimantan Barat yang juga tidak terlepas dari koordinasi yang baik dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Tabel 2.4.
Penyaluran KUR Kalimantan Barat per Sektor Triwulan II Tahun 2023

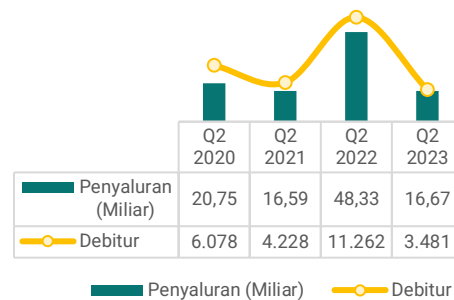
Sektor	Debitur	Penyaluran (Miliar)
PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN	11.259	709,59
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	9.286	676,61
JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL BUDAYA, HIBURAN DAN PERORANGAN LAINNYA	1.814	107,36
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	652	78,69
INDUSTRI PENGOLAHAN	1.223	77,16
PERIKANAN	864	48,33
TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI	414	39,91
REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN	83	12,09
KONSTRUKSI	15	3,55
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	19	1,68
JASA PENDIDIKAN	13	0,90
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	1	0,15
Grand Total	25.643	1.755,99

Sumber: SIKP KUR, 2023 (diolah)

Berdasarkan data SIKP KUR sampai dengan triwulan II, sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi sektor yang menggunakan pembiayaan KUR paling besar di wilayah Kalimantan Barat yaitu sebesar Rp709,59 miliar untuk 11.259 debitur. Banyaknya jumlah usaha termasuk UMKM yang jumlahnya semakin meningkat menyebabkan penyaluran KUR untuk sektor ini semakin besar. Penyaluran KUR yang diprioritaskan pada sektor produksi yaitu sektor yang menambah jumlah barang dan/atau jasa diharapkan dapat menambah kesejahteraan masyarakat dan juga semakin membaiknya perekonomian khususnya di Kalimantan Barat.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, terdapat 57 juta pelaku segmen usaha ultra mikro dan hanya 12 juta (20%) pelaku usaha ultra mikro yang telah memiliki pembiayaan yang cukup. Sementara itu 45 juta (80%) pelaku usaha ultra mikro masih membutuhkan tambahan pembiayaan. Dari total 45 juta tersebut 15 juta pelaku usaha telah mendapatkan pembiayaan yang dilayani oleh lembaga keuangan formal, 18 juta belum mendapatkan akses pendanaan, dan 12 juta pelaku

Grafik 2.7.
Tren Pembiayaan UMi Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2020-2023



Sumber: SIKP UMi (diolah)

usaha mendapatkan pembiayaan dari lembaga rentenir dan keluarga/kerabat. Untuk itu pemerintah hadir melalui Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dengan fokus utama kepada pelaku usaha yang belum mendapatkan akses pendanaan dan juga mengentas pembiayaan dari rentenir.

Masyarakat yang belum mampu mengakses pembiayaan perbankan dapat menjalankan kredit program berupa pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pembiayaan UMi merupakan program fasilitas pembiayaan kepada pengusaha Ultra Mikro baik dalam bentuk kredit konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah nonbankable. Sasaran Pembiayaan UMi adalah Usaha Ultra Mikro di lapisan bawah masyarakat yang belum bisa mendapat fasilitas perbankan. Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional semenjak masa pandemi Covid-19, pembiayaan kredit program terus dilakukan perbaikan dan pembaruan secara terus menerus dimana awalnya plafon pembiayaan UMi hanya sebesar 10 juta rupiah per nasabah kini menjadi maksimal 20 juta rupiah per nasabah.

Berbeda dengan penyaluran KUR yang cenderung mengalami kenaikan secara *year on year*, penyaluran Pembiayaan UMi cenderung fluktuatif, dapat dilihat dari perkembangan penyaluran UMi selama triwulan II secara *year on year*. Pada triwulan II 2021, penyaluran UMi hanya mencapai Rp16,59 miliar yang mengalami penurunan sebesar 20,05% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan II 2023 ini, penyaluran UMi di Kalimantan Barat kembali pada Kondisi normal sebelum masa Pandemi Covid-19 sehingga mengalami penurunan menjadi Rp16,67 miliar dibandingkan dengan triwulan II 2022 yang mencapai Rp48,33 miliar. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan penyaluran Pembiayaan UMi, lembaga penyalur semakin gencar untuk menyosialisasikan Pembiayaan UMi sampai ke pelosok daerah untuk dapat membantu pelaku usaha kecil yang masih membutuhkan permodalan. Selain itu selalu diadakannya pertemuan rutin dari lembaga penyalur bersama dengan nasabah/debitur yang berbentuk kelompok sehingga masyarakat semakin mengetahui Pembiayaan UMi.

2.1.3. Surplus/Defisit

Realisasi pendapatan APBN Provinsi Kalimantan Barat Triwulan II 2023 mencapai sebesar Rp5.636,16 miliar, sedangkan belanja APBN mencapai sebesar Rp13.216,48 miliar. Kondisi tersebut mengaki-



batkan terjadi defisit APBN regional sebesar Rp 7.580,32 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 (*year on year*) dengan besaran defisit sebesar Rp5.906,25 miliar terjadi kenaikan tingkat defisit Rp1.674,07 miliar atau naik sebesar 28,34%. Kebijakan anggaran di regional memang dirancang defisit dan merupakan suatu hal yang wajar terjadi karena tingginya belanja pada sisi Transfer ke Daerah, hal ini diperlukan guna memberi stimulus pada perekonomian di daerah.

2.1.4. Prognosis APBN

Perkiraan realisasi APBN sampai dengan akhir tahun 2023 diperoleh dengan menggunakan penghitungan rata-rata untuk penerimaan pendapatan dan belanja negara melalui data historis tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2.5.
Perkiraan Ralisasi APBN Lingkup Provinsi Kalbar s.d. Akhir Tahun 2023

URAIAN	Target / Pagu Tahun 2023	Realisasi s.d Triwulan II		Prognosis Realisasi s.d Triwulan IV	
		Rp (miliar)	% Realisasi terhadap Pagu	Rp (miliar)	% Prognosis Realisasi terhadap Target/Pagu
PENDAPATAN NEGARA	12.083,37	5.636,16	46,64%	12.061,06	99,82%
1 Penerimaan Pajak	10.655,20	4.782,30	44,88%	10.655,20	100,00%
2 PNPB	627,42	576,81	91,93%	627,42	100,00%
3 Bea dan Cukai	800,74	277,05	34,60%	778,44	97,21%
4 Hibah	-	-	-	-	-
BELANJA NEGARA	30.074,10	13.216,48	43,95%	27.765,76	92,32%
1 Belanja Pemerintah Pusat	10.488,86	4.514,53	43,04%	9.709,58	92,57%
2 Belanja TKDD	19.585,24	8.701,95	44,43%	18.056,19	92,19%
SURPLUS DEFISIT	-17.990,73	-7.580,32	42,13%	-15.704,70	87,29%

Sumber data: Laporan ALCo Regional Kalimantan Barat Periode Maret 2023

Berdasarkan data yang dihimpun dari Kanwil DJP, DJBC, dan DJPb Provinsi Kalimantan Barat, total target penerimaan negara lingkup Kalimantan Barat Tahun 2023 dengan total Rp12.083,37 miliar diproyeksikan akan tercapai sebesar Rp12.061,06 miliar atau sekitar 99,82%. Proyeksi ini terdiri dari capaian sebesar Rp10.655,20 miliar untuk penerimaan Perpajakan (DJP), Rp800,74 miliar untuk penerimaan Bea Cukai (DJBC), dan PNPB (DJPb) sebesar Rp627,42 miliar.

Sementara pada sisi belanja, dari total pagu belanja negara sebesar Rp30.074,10 miliar, hingga akhir tahun nanti diproyeksikan akan terealisasi sebesar Rp27.765,76 miliar atau sekitar 92,32%, angka ini terdiri dari proyeksi Belanja Pemerintah Pusat yang diproyeksikan akan terealisasi sebesar Rp9.709,58 miliar atau sekitar 92,57% dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp18.056,19 miliar atau sekitar 92,19%.

2.1.5. Analisis Capaian Output: Layanan Dasar Publik

APBN 2023 dirancang bersifat ekspansif untuk memastikan agar perekonomian terus bergerak untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur di tengah berbagai tantangan, termasuk sebagai *shock absorber* ketika Indonesia dihantam ketidakstabilan ekonomi akibat krisis global. Program dan kegiatan untuk layanan dasar publik serta output strategis menjadi prioritas unggulan.

Selain menjadi prioritas unggulan dalam layanan publik, beberapa capaian output juga merupakan bagian dari prioritas nasional seperti Priorita Nasional dalam rangka Meningkatkan Sumber Daya

Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; dan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tabel 2.6.
Pagu & Realisasi Anggaran pada Fungsi Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Berdasarkan Prioritas Nasional dan K/L

FUNGSI PENDIDIKAN	PAGU 2023	REALISASI TW II-2023
(NAMA KEMENTERIAN - PRIORITAS NASIONAL)	(dalam miliar rupiah)	
KEMENTERIAN AGAMA	172,47	191,79
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	118,49	132,30
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	53,98	59,50
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	52,55	21,94
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	45,06	19,59
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7,50	2,35
Grand Total	225,02	213,74
FUNGSI KESEHATAN	PAGU 2023	REALISASI TW II-2023
(NAMA KEMENTERIAN - PRIORITAS NASIONAL)	(dalam miliar rupiah)	
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)	26,91	25,52
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	26,53	25,45
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	0,38	0,07
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	12,65	13,70
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	0,11	0,13
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	12,54	13,57
KEMENTERIAN KESEHATAN	17,39	7,59
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	0,20	0,00
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	17,19	7,59
Grand Total	56,95	46,81
FUNGSI INFRASTRUKTUR	PAGU 2023	REALISASI TW II-2023
(NAMA KEMENTERIAN - PRIORITAS NASIONAL)	(dalam miliar rupiah)	
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1.660,10	1.528,34
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1.411,14	1.238,43
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	22,98	14,77
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	36,51	2,84
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	189,47	272,30
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	347,45	376,15
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	336,62	375,95
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	10,83	0,20
Grand Total	2.007,55	1.904,49

Sumber data: SINTESA (diolah)

Pagu belanja output strategis dan layanan dasar publik di Kalimantan Barat untuk bidang pendidikan mencapai Rp225,02 miliar dialokasikan di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Sampai dengan dengan Triwulan II 2023 telah terealisasi sebesar Rp213,74 miliar atau sekitar 94,99%. Pada bidang pendidikan, output strategis yang telah terealisasi antara lain berupa Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk 77.015 orang, Pelayanan Publik kepada masyarakat untuk 9.806 orang, Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat untuk 62.014 orang, dan Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah sebanyak 20 paket.

Pada bidang kesehatan pagu output strategis untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp56,95 miliar dialokasikan pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sampai dengan dengan Triwulan II



2023 telah terealisasi sebesar Rp46,81 miliar atau sekitar 82,20%. Pada bidang kesehatan, output yang telah terealisasi antara lain Fasilitas dan Pembinaan Keluarga untuk 27.975 keluarga, Pelatihan Bidang Kesehatan untuk 34.174 orang, Pengawasan dan Pengendalian Produk sebanyak 3.435 produk, dan Sarana Bidang Kesehatan sebanyak 35 paket.

Untuk bidang infrastruktur pagu output strategis untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.007,55 miliar dialokasikan pada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sampai dengan dengan Triwulan II 2023 telah terealisasi sebesar Rp1.904,49 miliar atau sekitar 94,87%. Pada bidang infrastruktur, output yang telah terealisasi antara lain Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) sepanjang 574 m, Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) sepanjang 119 km, Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman sebanyak 26.853 unit, serta Pelatihan Bidang Infrastruktur untuk 3.915 orang.

Capaian output selengkapnya terdapat pada lampiran.

2.2. Analisis Laporan Realisasi Anggaran (APBD Konsolidasi)

Tabel 2.7.
Realisasi APBD Lingkup Provinsi Kalimantan Barat
Triwulan II Tahun 2022 dan 2023

URAIAN	Triwulan II - 2022			Triwulan II - 2023			Growth (%)	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi
PENDAPATAN	24.319,63	9.022,53	37,10	25.988,89	8.558,01	32,93	6,86	(5,15)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.785,79	2.103,74	43,96	5.279,05	2.167,02	41,05	10,31	3,01
Pajak Daerah	3.454,83	1.525,09	44,14	3.758,11	1.441,84	38,37	8,78	(5,46)
Retribusi Daerah	151,71	40,33	26,58	152,60	39,31	25,76	0,59	(2,53)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	208,44	196,96	94,49	231,69	225,63	97,38	11,16	14,56
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	970,81	341,37	35,16	1.136,64	460,24	40,49	17,08	34,82
PENDAPATAN TRANSFER	19.282,73	6.892,40	35,74	20.541,83	6.382,49	31,07	6,53	(7,40)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	18.281,20	6.599,20	36,10	19.497,20	5.994,11	30,74	6,65	(9,17)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.001,53	293,20	29,28	1.044,62	388,39	37,18	4,30	32,46
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	251,11	26,39	10,51	168,01	8,49	5,05	(33,09)	(67,82)
Pendapatan Hibah	123,25	16,83	13,66	114,88	1,13	0,98	(6,79)	(93,31)
Pendapatan Lainnya	127,87	9,55	7,47	53,13	7,37	13,86	(58,45)	(22,89)
BELANJA DAERAH	25.398,77	6.412,46	25,25	26.905,36	6.817,60	25,34	5,93	6,32
BELANJA OPERASI	17.062,11	4.957,28	29,05	17.923,26	5.260,67	29,35	5,05	6,12
Belanja Pegawai	8.971,37	3.311,22	36,91	9.532,21	3.463,35	36,33	6,25	4,59
Belanja Barang	7.184,78	1.468,78	20,44	7.403,02	1.582,09	21,37	3,04	7,71
Belanja Bunga	21,37	3,00	14,03	33,57	9,69	28,86	57,08	223,19
Belanja Subsidi	1,50	0	0	1,50	0	0	0	0
Belanja Hibah	845,52	169,39	20,03	921,31	202,67	22,00	8,96	19,65
Belanja Bantuan sosial	37,57	4,89	13,02	31,65	2,87	9,08	(15,77)	(41,24)
BELANJA MODAL	4.150,99	232,90	5,61	4.673,21	411,54	8,81	12,58	76,70
Belanja Modal	4.150,99	232,90	5,61	4.673,21	411,54	8,81	12,58	76,70
BELANJA TAK TERDUGA	160,40	9,58	5,97	119,93	5,20	4,34	(25,23)	(45,71)
Belanja Tak Terduga	160,40	9,58	5,97	119,93	5,20	4,34	(25,23)	(45,71)
BELANJA TRANSFER	4.025,27	1.212,71	30,13	4.188,96	1.140,19	27,22	4,07	(5,98)
Transfer/Bagi Hasil Pendapatan	1.150,62	536,86	46,66	1.277,27	429,58	33,63	11,01	(19,98)
Belanja Bantuan Keuangan	2.874,65	675,85	23,51	2.911,69	710,60	24,41	1,29	5,14
SURPLUS/DEFISIT	(1.079,14)	2.610,07	(241,87)	(916,47)	1.740,41	(189,90)	(15,07)	(33,32)
PEMBIAYAAN	1.079,14	(57,67)	(5,34)	899,45	(48,11)	(5,35)	(16,65)	(16,58)
Penerimaan Pembiayaan	1.563,25	246,24	15,75	1.507,05	233,27	15,48	(3,59)	(5,27)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.167,26	246,24	21,10	1.238,40	233,27	18,84	6,10	(5,27)
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0	0	0
Hasil Penjualan KD yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
Penerimaan Pinjaman Daerah	395,94	0	0	0	0	0	(100,00)	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,05	0	0	268,65	0	0	537.200,00	0
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengeluaran Pembiayaan	484,11	303,91	62,78	607,61	281,38	46,31	25,51	(7,42)
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo	354,42	236,41	66,70	430,97	169,64	39,36	21,60	(28,24)
Penyertaan Modal Daerah	129,30	67,50	52,20	134,20	81,80	60,95	3,79	21,18
Pembentukan Dana Cadangan	0,39	0	0	42,44	29,94	70,55	10.836,08	0
Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0	2.552,40	0	(17,02)	1.692,30	0	0	(33,70)

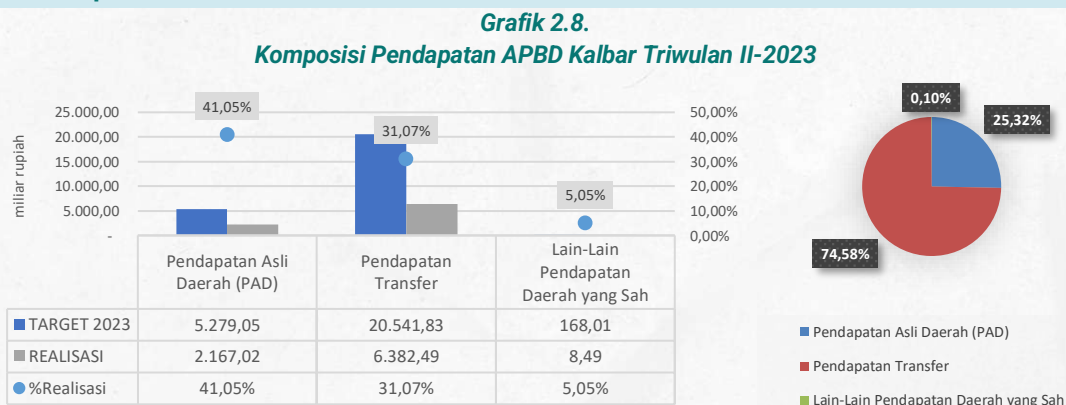
Sumber: Bidang PAKP Kanwil DJPb Kalbar, GFS Triwulan I-2023 & SIKRI (diolah)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, khususnya di masa pemulihan

ekonomi pasca pandemi yang melanda sejak awal tahun 2020. Jika dibandingkan tahun 2022, ekonomi Kalimantan Barat bergerak menuju ke arah yang positif dan fiskal daerah yang semakin kuat pada tahun anggaran 2023. Hal ini ditunjukkan dengan tumbuhnya realisasi belanja daerah meskipun pada sisi pendapatan justru mengalami penurunan.

Target pendapatan daerah dalam APBD Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp25.988,89 miliar dan Pagu Belanja sebesar Rp26.905,36 miliar, sehingga terdapat rencana defisit sebesar Rp916,47 miliar, dengan pembiayaan sebesar Rp899,45 miliar dan SiKPA sebesar Rp17,02 miliar. Berdasarkan data dari SIKRI atas LRA konsolidasi seluruh Pemda Kalimantan Barat, sampai dengan 30 Juni 2023, realisasi pendapatan daerah menunjukkan pencapaian sebesar Rp8.558,01 miliar, masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 74,58% dari total pendapatan. Pada sisi belanja, realisasi s.d. 30 Juni 2023 sebesar Rp6.817,60 miliar atau baru sebesar 25,34%. Dengan kondisi ini, maka APBD Kalbar masih surplus sebesar Rp1.740,41 miliar.

2.2.1. Pendapatan Daerah



Sumber: Bidang PAKP Kanwil DJPb Kalbar, GFS Triwulan I-2023 & SIKRI (diolah)

Pada sisi pendapatan, sampai dengan Triwulan II-2023, Pendapatan Transfer masih berkontribusi paling besar yaitu sebesar Rp6.382,49 miliar dari total pendapatan Rp8.558,01 miliar atau sekitar 74,58% dari total keseluruhan Pendapatan. Sementara PAD yang terealisasi sebesar Rp2.167,02 miliar atau sebesar 25,32% dari total pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada APBD Konsolidasi Kalimantan Barat. Namun apabila dirinci per masing-masing Pemda, untuk Provinsi rasio pendapatan transfer per total pendapatan berada dibawah 50%, yaitu sebesar 41,25%, sementara konsolidasi seluruh kabupaten/kota sebesar 86%.

Salah satu pilar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) adalah mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah dalam meminimumkan ketimpangan vertikal dan horizontal. Untuk mencapai tujuan ini maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kemandirian daerah. Tiga ukuran untuk mengukur tingkat kemandirian suatu daerah adalah melalui perhitungan derajat desentralisasi fiskal, derajat ketergantungan, dan rasio kemandirian fiskal.



Rasio Desentralisasi Fiskal

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

$$= \frac{\text{Rp2.167,02 miliar}}{\text{Rp8.558,01 miliar}} = 25,32\%$$

Tabel 2.8.

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal	Keterangan
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,00 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Hanafi, dkk (2005)

b. Derajat Ketergantungan

Rasio Derajat Ketergantungan adalah rasio yang menunjukkan perbandingan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dengan total penerimaan daerah. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan atas realisasi APBD Kalbar Triwulan I Tahun 2023, diperoleh hasil bahwa Kalbar termasuk ke dalam kategori Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah yang “sangat tinggi” dengan nilai ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat sebesar 74,58%.

Derajat Ketergantungan Kalbar:

$$= \frac{\text{Pendapatan Transfer dari Pempus}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

$$= \frac{\text{Rp6.382,49 miliar}}{\text{Rp8.558,01 miliar}} = 74,58\%$$

Tabel 2.9.

Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Ketergantungan (%)	Kategori
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,00 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup Tinggi
40,01 - 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Bangga (2017)

c. Rasio Kemandirian Fiskal

Rasio Kemandirian Fiskal:

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pempus dan Pinjaman}}$$

$$= \frac{\text{Rp2.167,02 miliar}}{\text{Rp6.382,49 miliar}} = 33,95\%$$

Tabel 2.10.

Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim (2007)

a. Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Berdasarkan perhitungan atas realisasi APBD Kalbar Triwulan II Tahun 2023, diperoleh hasil bahwa Kalbar termasuk kedalam golongan “sedang” dengan Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar 25,32%.

Rasio Kemandirian fiskal adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli daerah (PAD) dengan bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan atas realisasi APBD Kalbar Triwulan II Tahun 2023, diperoleh hasil bahwa Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah Kalbar masih rendah dengan perolehan angka kemampuan keuangan sebesar 33,95% atau termasuk ke dalam kategori pola hubungan “Konsultatif”.

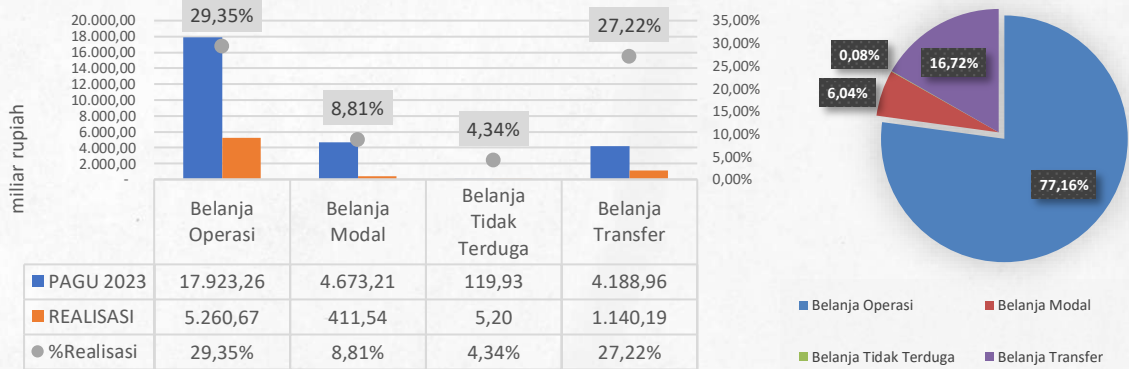
Meskipun secara konsolidasi (seluruh Pemda) belum mencapai tingkat kemandirian yang optimal, namun apabila dihitung berdasarkan LRA APBD masing-masing Pemerintah Daerah, maka beberapa daerah di Kalbar telah menunjukkan kemandirian yang lebih baik, misalnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kota Pontianak.

Kenaikan kemandirian fiskal suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri, selain itu naiknya kontribusi PAD juga merupakan indikasi kinerja keuangan daerah yang positif.

2.2.2. Belanja Daerah

Grafik 2.9.

Pagu, Realisasi, dan Komposisi Belanja APBD Kalbar Triwulan I-2023

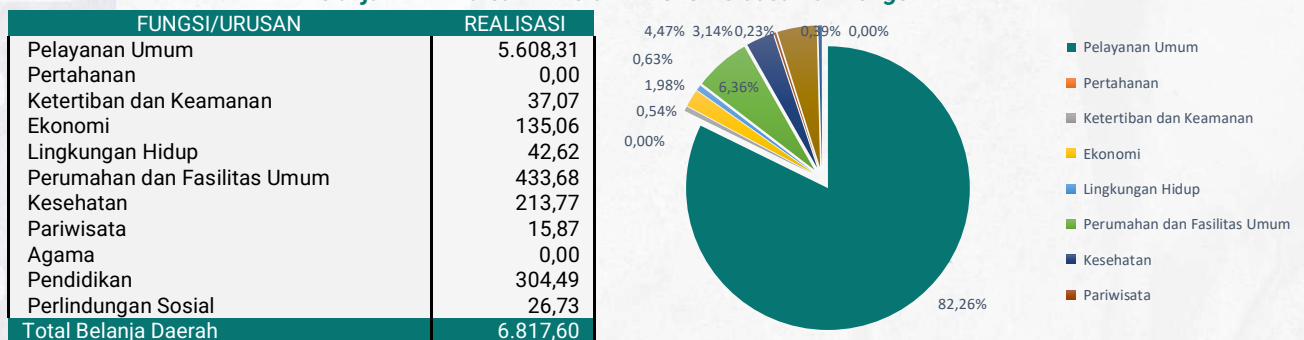


Sumber: Bidang PAPP Kanwil DJPb Kalbar, GFS Triwulan I-2022 & SIKRI (diolah)

Pada sisi belanja, sampai dengan Triwulan II-2023, secara kosolidasi realisasi belanja APBD Kalbar baru terealisasi sebesar 25,34% atau sebesar Rp6.817,60 miliar. Secara persentase, realisasi belanja daerah paling tinggi terdapat pada pos belanja operasional dengan realisasi sebesar 29,35% disusul urutan kedua ada pada pos belanja transfer dengan realisasi sebesar 27,22%. Realisasi Belanja Operasi ini berasal dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Perlu perhatian khusus dari Pemda untuk mendorong realisasi Belanja pada APBD Kalbar. Penyerapan realisasi anggaran sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi dan daya beli masyarakat. Namun demikian upaya percepatan realisasi belanja harus tetap memperhatikan *output* dan *outcome* yang harus dicapai. Dilihat dari komposisi realisasi belanja, Belanja APBD Kalbar tertinggi terdapat pada belanja operasi sebesar 77,16% dari total keseluruhan belanja, disusul belanja transfer sebesar 16,72%, dan belanja modal sebesar 6,04%.

Grafik 2.10.

Belanja APBD Kalbar Triwulan-II 2023 Berdasarkan Fungsi



Sumber: Bidang PAPP Kanwil DJPb Kalbar, GFS Triwulan I-2023 & SIKRI (diolah)

Berdasarkan klasifikasi belanja per fungsi, realisasi belanja terbesar ada pada Belanja Pelayanan Umum sebesar 82,26% (Rp5.608,31 miliar), disusul oleh Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum



sebesar 6,36%, (Rp433,68 miliar) dan Belanja Belanja Pendidikan yaitu sebesar 27,45% (Rp304,49 miliar) dari total realisasi belanja Triwulan II 2023. Belanja Pertahanan dan Belanja Agama tidak dianggarkan dalam APBD Kalimantan Barat karena merupakan urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat sehingga dibebankan dalam APBN.

2.2.3. Surplus/Defisit APBD

Dengan kondisi penyerapan belanja yang masih belum maksimal, kondisi APBD Kalbar hingga Triwulan II Tahun 2023 adalah surplus sebesar Rp1.692,30 miliar. Hal ini berbeda jauh dengan rencana anggaran dimana pagu menunjukkan kondisi defisit sebesar Rp17,02 miliar. Salah satu penyebab terjadinya surplus adalah karena rendahnya penyerapan pada Belanja Modal yang masih berada di bawah 10% yaitu sebesar Rp411,54 miliar dari total pagu Rp4.673,21 miliar atau hanya sekitar 8,81%.

2.2.4. Pembiayaan Daerah

Meskipun kondisi surplus yang terjadi berbanding terbalik dengan rencana pada pagu/anggaran, rencana anggaran untuk pembiayaan tetap berjalan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp233,27 miliar yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan, realisasi yang ada berasal dari Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo yaitu sebesar Rp169,64 miliar, Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp81,80 miliar, dan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp29,94 miliar. Sehingga sampai dengan Triwulan II 2023, pembiayaan netto pada APBD Kalbar sebesar negatif Rp48,11 miliar karena penerimaan pembiayaan melebihi pengeluaran pembiayaan.

2.2.5. Prognosis APBD

Realisasi APBD dalam lingkup Provinsi Kalbar sampai dengan akhir tahun 2023 untuk Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah diperkirakan sebagai berikut:

Tabel 2.11.
Perkiraan Realisasi APBD Kalbar s.d. Triwulan IV Tahun 2023 (dalam miliar rupiah)

Uraian	Tren Realisasi				Prognosis
	2019	2020	2021	2022	2023
PENDAPATAN	25.639,28	23.555,46	26.334,22	23.523,17	23.870,63
PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.046,71	3.814,30	4.441,58	4.978,25	5.175,69
PENDAPATAN TRANSFER	20.848,16	18.658,63	21.071,49	18.293,94	18.405,60
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	744,42	1.082,53	821,15	250,98	289,35
BELANJA DAERAH	25.106,34	23.751,12	25.760,09	22.596,04	22.922,91
BELANJA OPERASI	16.083,35	16.039,83	16.957,00	15.280,97	15.717,79
BELANJA MODAL	4.988,85	3.865,73	4.601,78	3.550,29	3.356,75
BELANJA TAK TERDUGA	6,25	422,03	81,86	43,69	81,49
BELANJA TRANSFER	4.027,89	3.423,53	4.119,45	3.721,09	3.766,87
SURPLUS/DEFISIT	532,95	-195,66	574,13	927,13	947,72
PEMBIAYAAN	950,84	1.541,99	1.340,62	501,02	695,91
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	1.483,78	1.346,33	1.914,75	1.428,15	1.643,63

Sumber: Bidang PPAK Kanwil DJPb Kalbar, GFS 2019-2023 & SIKRI (diolah)

Pendapatan Daerah sampai akhir tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp23.870,63 miliar, sementara itu Belanja Daerah diperkirakan sebesar Rp22.922,91 miliar, sehingga terjadi kondisi surplus sebesar Rp947,72 miliar, dengan pembiayaan sebesar Rp695,91 miliar, sehingga terjadi SiLPA sebesar Rp1.643,63 miliar.

2.2.6. Isu Strategis Pelaksanaan APBD

Salah satu penyebab capaian belanja daerah dalam APBD belum optimal adalah akibat rendahnya realisasi Belanja Modal yang disebabkan belum dapat dilaksanakannya kegiatan kontraktual, lantaran kegiatan fisik yang dianggarkan OPD masih menunggu selesainya kegiatan perencanaan atau *Detail Engineering Design* (DED). Penyebab lainnya yakni belum adanya tagihan pembayaran pengadaan barang/jasa dari pihak ketiga, sehingga pemerintah daerah juga belum dapat membayarkan tagihan dan cenderung menempatkan uangnya di Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Faktor lainnya dipicu oleh adanya sisa dana penghematan/pelaksanaan program kegiatan atas belanja tahun anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan, serta beberapa jenis belanja pengadaan konstruksi belum tercatat pada jurnal belanja.

Gubernur Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji mengatakan pada 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Kalbar akan berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan. Pembangunan infrastruktur menjadi penting mengingat saat ini Kalbar memiliki jalan provinsi sepanjang 1.534 kilometer. Pemerintah Provinsi Kalbar mempersiapkan anggaran sebesar Rp49 miliar untuk fokus melakukan pembangunan di beberapa ruas jalan misalnya Jalan Siduk-Sukadana, Teluk Melano, Teluk Batang. Selain itu terdapat proyek peningkatan Jalan Singkawang Bengkayang dengan alokasi dana sebesar Rp45 miliar dan Jalan Bodok Meliau sebesar Rp25 miliar, serta Jalan Tanjung Marau, Air Upas Manis Mata, Tumbang Titi Tanjung, Pak Mayam Nahaya, Batas Kota Pontianak-Kakap dengan anggaran sebesar Rp49 miliar. Selain jalan, Pemprov juga akan melakukan pembangunan lainnya yakni jembatan seperti jembatan Marsedan Kapuas Hulu dengan anggaran Rp20 miliar.

2.3. Analisis Neraca Pemerintah Pusat-Tingkat Wilayah

2.3.1. Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Berdasarkan data *Government Finance Statistics* (GFS) Triwulan II Tahun 2021-2023, Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) Kalimantan Barat menunjukkan total jumlah aset sebesar Rp101.088,04 miliar, kewajiban sebesar Rp606,59 miliar dan ekuitas sebesar Rp100.120,76 miliar.

Tabel 2.12.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW)
Triwulan II Tahun 2022-2023 (dalam miliar rupiah)

DESKRIPSI	Triwulan II 2022	Triwulan II 2023	%Growth (22-23)
ASET			
Jumlah Aset Lancar	5.542,62	5.383,18	-2,88%
Jumlah Aset Tetap	95.104,45	94.301,93	-0,84%
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)	0,05	0,05	0,00%
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)	440,92	435,61	-1,20%
JUMLAH ASET	101.088,04	100.120,76	-0,96%
KEWAJIBAN			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	606,59	569,63	-6,09%
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	-
JUMLAH KEWAJIBAN	606,59	569,63	-6,09%
EKUITAS	100.481,45	99.551,13	-0,93%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	101.088,04	100.120,76	-0,96%

Sumber: Bidang PAK Kanwil DJPb Kalbar, GFS Triwulan II Tahun 2022-2023 (diolah)

Apabila dicermati secara lebih rinci pertumbuhan aset dari tahun 2022 ke 2023, seluruh komponen aset mengalami pertumbuhan negatif, kecuali pada jumlah piutang jangka panjang yang tidak mengalami



perubahan. Sedangkan pada sisi kewajiban, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang mengalami pertumbuhan negatif yaitu turun sebesar 6,09% pada jumlah kewajiban jangka pendek. Sementara pada sisi Ekuitas, LKPP-TW Triwulan II 2023 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (*year on year*) tumbuh negatif sebesar 0,93%.

2.3.2. Kontribusi Belanja Pemerintah dalam Pembentukan Aset Tetap (Barang Milik Negara) dari Belanja Modal

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Kontribusi Belanja Pemerintah dalam Pembentukan Aset Tetap (Barang Milik Negara) dapat tercermin dari realisasi Belanja Modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi belanja ini meliputi berbagai jenis belanja yang menambah nilai maupun jumlah dari aset barang milik negara, seperti Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Pembebasan Tanah, Belanja Modal Peralatan Dan Mesin, Belanja Penambahan Nilai Peralatan Dan Mesin, Belanja Modal Gedung Dan Bangunan, Belanja Modal Bahan Baku Gedung Dan Bangunan, Belanja Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan, Belanja Modal Jalan Dan Jembatan, Belanja Modal Irigasi, Belanja Modal Jaringan, Belanja Penambahan Nilai Jalan Dan Jembatan, Belanja Modal Lainnya, dan masih banyak jenis belanja modal.

Tabel 2.13.

Kontribusi Belanja Pemerintah dalam Pembentukan Aset Tetap dari Belanja Modal

DESKRIPSI	Triwulan II 2022	Triwulan II 2023	%Growth
Realisasi Belanja Modal	447,82	580,37	29,60%
Total Aset Tetap (Triwulan II Tahun 2023)	95.104,45	94.301,93	-0,84%
Total Aset Tetap (tahun sebelumnya)	35.529,04	65.052,58	83,10%
Perubahan Aset Tetap	59.575,41	29.249,35	-50,90%
Kontribusi Belanja Pemerintah	0,75%	1,98%	163,97%

Sumber: Bidang PPK Kanwil DJPb Kalbar, GFS Triwulan II Tahun 2022-2023 (diolah)

Pada Triwulan II-2023, realisasi belanja modal mengalami peningkatan sebesar 29,60%, sedangkan total aset tetap mengalami penurunan nilai sebesar 0,84%. Selama triwulan II 2022, terdapat perubahan aset tetap (naik), sebesar Rp 59.575,41 miliar dari nilai aset pada akhir tahun 2021, sedangkan perubahan pada triwulan II 2023 jika dibandingkan total nilai aset akhir tahun sebelumnya (2022) yaitu sebesar Rp29.249,35 miliar. Sehingga kontribusi Belanja Pemerintah (Belanja Modal) pada pembentukan total nilai aset adalah sebesar 0,75% pada triwulan II 2022 dan 1,98% pada triwulan II 2023. Kontribusi belanja pemerintah ini naik sebesar 163,97% secara *year on year* (tahunan)

2.3.3. Realisasi dan Potensi PNBPN dari BMN

BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Selain dikenal sebagai aset negara/sumber daya yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi

seluruh satuan kerja di Kementerian/Lembaga. Sebagaimana amanat pada Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, setiap Kementerian/Lembaga memiliki tugas untuk mengelola Barang Milik Negara yang ada pada unit kerjanya secara optimal, efektif dan efisien. Barang Milik Negara (BMN) dapat pula dimanfaatkan secara optimal guna menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tabel 2.14.
Realisasi PNBP dari BMN Triwulan II Tahun 2023

No	Keterangan	Target (Rp)		Realisasi (Rp)		% Growth
		Tahun 2022	Tahun 2023	s.d. Juni 2022	s.d. Juni 2023	
1	Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	27.140.400.000,00	31.210.100.000,00	10.998.156.114,00	26.640.970.957,00	142,23%
2	PNBP Aset	18.000.000.000,00	21.600.000.000,00	7.498.126.126,00	22.254.311.582,00	196,80%
3	PNBP Lelang	9.100.000.000,00	9.600.000.000,00	3.496.224.256,00	4.365.450.705,00	24,86%
4	PNBP PN	40.400.000,00	10.100.000,00	3.805.732,00	21.208.670,00	457,28%
	Total	54.280.800.000	62.420.200.000	21.996.312.228	53.281.941.914	142,23%
5	Produktivitas Lelang (jumlah lelang)	2.073	1.168	639	487	-23,79%
6	Pokok Lelang (Rp)	325.000.000.000,00	341.600.000.000,00	144.239.407.500,00	165.774.597.640,00	14,93%
7	Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara (Rp)	504.000.000,00	380.000.000,00	883.678.786,00	912.435.110,00	3,25%
8	BMN Berupa Tanah yang Disertifikatkan (sertifikat)	30	950	14	424	2928,57%

Sumber: Kanwil DJKN Kalimantan Barat – ALCo Regional Juni 2023 (diolah)

Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Barat seluruh pos realisasi PNBP dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Triwulan II-2023 mengalami kenaikan secara tahunan (*y-on-y*) pada seluruh pos pendapatan. Sampai dengan triwulan II 2023 telah tercapai PNBP dari BMN sebesar Rp53,28 miliar atau sebesar 85,36 dari total target tahun 2023, capaian ini juga mengalami kenaikan sebesar 142,23% dibandingkan capaian tahun lalu. Selain PNBP dari BMN, sampai dengan triwulan II 2023, Kanwil DJKN Kalbar telah melaksanakan kegiatan lelang sebanyak 487 kali lelang dengan total pokok lelang sebesar Rp165,77 miliar. Pada periode tersebut, juga telah disertifikatkan bukti kepemilikan atas Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian/Lembaga dengan menghasilkan sebanyak 424 sertifikat, jumlah naik signifikan dibanding periode sebelumnya yang hanya 14 sertifikat.



Halaman ini sengaja dikosongkan



KFR
Triwulan II-2023



BAB III

Pengembangan Ekonomi Regional



BAB III

Pengembangan Ekonomi Daerah

3.1. Kondisi eksisting perkembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada Laporan Kajian Fiskal Regional Tahunan 2022, telah dilakukan analisis sektor unggulan dan sektor potensial dengan menggunakan metode LQ, *Shift Share*, Tipologi Klassen serta Model I-O. Berdasarkan analisis tersebut, diperoleh pemetaan sektor unggulan dan sektor potensial di Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Sektor Unggulan dan Sektor Potensial Berdasarkan Metode Klassen dan Model I-O

	Sektor Unggulan	Sektor Potensial
Metode Klassen Typology Method, Shift Share	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian, kehutanan dan perikanan 2. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 3. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 4. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambangan dan penggalian 2. Industri pengolahan 3. Pengadaan listrik dan gas
Model Input-Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri pengolahan 2. Pengadaan listrik 3. Konstruksi 4. Pertanian, kehutanan dan perikanan 5. Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi dan komunikasi 2. Jasa keuangan dan asuransi 3. Pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang 4. Transportasi dan pergudangan 5. Penyediaan akomodasi dan makan minum

Sumber: BPS (diolah)

Selama sepuluh tahun terakhir (2013-Juni 2023) struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Barat didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor; konstruksi; pertambangan dan penggalian. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kalimantan Barat tahun 2022.

Jika dilihat peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kalimantan Barat pada tahun 2022 masih dihasilkan oleh sektor primer, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 21,10 persen. Selanjutnya, sektor sekunder, yaitu sektor industri pengolahan yang mencapai angka 16,46 persen, kemudian disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,70 persen, kemudian diikuti oleh sektor konstruksi dengan capaian angka sebesar 12,53 persen, dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 6,56 persen. Sampai dengan Juni 2023,

belum terdapat pergeseran kontribusi sektor yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 19,73 persen. Selanjutnya, sektor sekunder, yaitu sektor industri pengolahan yang mencapai angka 15,42 persen, kemudian disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,87 persen, kemudian diikuti oleh sektor konstruksi dengan capaian angka sebesar 12,32 persen, dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 5,42 persen.

Tabel 3.2
Kontribusi Sektoral terhadap PDRB Kalimantan Barat Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut LU Tahun 2013-Juni 2023 (persentase)

SEKTOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023-TW II	Rata-Rata
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,77	21,56	20,54	20,21	20,30	20,18	20,09	20,92	21,24	21,10	19,73	20,79
Pertambangan dan Penggalian	5,03	4,79	4,90	5,61	5,45	5,63	5,73	7,00	7,02	6,56	5,42	5,74
Industri Pengolahan	16,33	16,48	15,78	16,12	16,15	16,12	16,34	16,22	16,49	16,46	15,42	16,17
Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,08	0,09	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,13	0,13	0,12	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Konstruksi	11,45	12,21	13,10	12,44	12,80	12,52	12,30	12,18	12,77	12,53	12,32	12,42
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,52	14,51	14,81	14,47	14,13	14,01	14,20	13,23	12,77	13,70	14,87	14,11
Transportasi dan Pergudangan	4,22	4,30	4,40	4,52	4,58	4,78	4,71	3,89	3,41	4,26	5,17	4,39
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,29	2,31	2,38	2,37	2,32	2,38	2,42	2,01	2,05	2,09	2,13	2,25
Informasi dan Komunikasi	3,30	3,30	3,36	3,43	3,70	3,75	3,80	4,13	4,11	4,01	4,20	3,74
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,61	3,63	3,56	3,64	3,69	3,78	3,45	3,40	3,43	3,34	3,33	3,53
Real Estat	3,08	3,04	3,01	2,96	2,88	2,90	2,86	2,88	2,72	2,52	2,70	2,87
Jasa Perusahaan	0,45	0,45	0,47	0,46	0,44	0,44	0,44	0,41	0,38	0,40	0,46	0,44
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,80	6,29	6,67	6,94	6,94	6,98	7,06	7,34	6,87	6,36	6,93	6,74
Jasa Pendidikan	4,44	4,42	4,30	4,20	4,02	3,94	3,93	3,49	3,43	3,34	3,56	3,92
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,49	1,49	1,51	1,45	1,40	1,40	1,44	1,84	2,36	2,35	2,71	1,77
Jasa Lainnya	1,03	1,03	1,01	0,99	0,98	0,98	1,01	0,81	0,71	0,76	0,80	0,92
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS (diolah)

Dari kelima sektor ekonomi tersebut, sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor berkontribusi fluktuatif meningkat, sedangkan empat sektor lainnya mengalami tren fluktuatif menurun yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; dan konstruksi. Sementara itu, kontribusi sektor ekonomi lainnya masing-masing berada pada kisaran kurang dari 7 persen.

Pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan perubahan struktur perekonomian. Transformasi struktural merupakan proses perubahan struktural perekonomian dari sektor tradisional (pertanian) yaitu sektor primer yang terdiri atas pertanian, kehutanan, dan perikanan ke sektor sekunder yang terdiri atas industri-industri seperti industri pengolahan, konstruksi, pertambangan atau perubahan ke sektor tersier yang terdiri atas bidang pengangkutan dan perhubungan, pemerintahan, perdagangan dan jasa-jasa perseorangan. Dengan demikian, pada analisis ini akan difokuskan pada salah satu sektor unggulan, yaitu **sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan** dan salah satu sektor potensial adalah **sektor informasi dan komunikasi**.



3.2. Dukungan pemerintah terhadap pengembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan

3.2.1. Dukungan fiskal (APBN dan APBD) terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan

Tabel 3.3

Kontribusi Sektoral terhadap PDRB Kalimantan Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lap Usaha Tahun 2013-Juni 2023 (dalam rupiah)

Fungsi/Program		Realisasi APBN	Fungsi/Program	Realisasi APBD
Fungsi Ekonomi		110.806.812.680,00	Fungsi Ekonomi	135.060.061.199,00
Program Dukungan Manajemen	59.862.772.666,00	Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	187.948.976,00	
Program Ketahanan Sumber Daya Air	20.178.862.513,00	Urusan Kehutanan	5.299.283.806,00	
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	9.062.718.126,00	Urusan Kelautan dan Perikanan	4.451.455.664,00	
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	3.485.567.375,00	Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	3.889.589.335,00	
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Bidang Pertanian)	2.069.464.200,00	Urusan Pangan	5.442.643.815,00	
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	3.381.754.013,00	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	24.293.131.784,00	
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	12.765.673.787,00	Urusan Penanaman Modal	3.433.189.497,00	
Fungsi Lingkungan Hidup	105.750.452.453,00	Urusan Perdagangan	4.664.230.379,00	
Program Dukungan Manajemen	72.170.672.124,00	Urusan Perhubungan	43.821.573.774,00	
Program Kualitas Lingkungan Hidup	6.486.975.766,00	Urusan Perindustrian	3.062.726.179,00	
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	13.433.515.524,00	Urusan Pertanian	29.734.162.254,00	
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	193.141.706,00	Urusan Tenaga Kerja	5.874.543.113,00	
Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	13.466.147.333,00	Urusan Transmigrasi	905.582.623,00	
		Fungsi Lingkungan Hidup	41.209.603.113,00	
		Urusan Lingkungan Hidup	41.209.603.113,00	

Sumber: MEBE, SIKRI (diolah)

Berdasarkan perhitungan alokasi APBN yang berkaitan dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, terdapat alokasi sebesar Rp785.958.790.000 atau 1,29% dari pagu sebesar Rp60.794.177.836.000.

Realisasi APBN maupun APBD yang berhubungan dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sama-sama berada pada fungsi ekonomi dan fungsi lingkungan hidup. Pada APBN, realisasi Fungsi Ekonomi sebesar Rp110.806.812.680 yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen; Program Ketahanan Sumber Daya Air; Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Bidang Pertanian); Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan; dan Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan. Pada Fungsi Lingkungan Hidup terealisasi sebesar Rp105.750.452.453 yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen; Program Kualitas Lingkungan Hidup; Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan; Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan; Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan.

Pada APBD, realisasi Fungsi Ekonomi sebesar Rp135.060.061.199 yang terdiri dari Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral; Urusan Kehutanan; Urusan Kelautan dan Perikanan; Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Urusan Pangan; Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Urusan Penanaman Modal; Urusan Perdagangan; Urusan Perhubungan; Urusan Perindustrian; Urusan Pertanian; Urusan Tenaga Kerja; dan Urusan Transmigrasi. Pada Fungsi Lingkungan Hidup terealisasi sebesar Rp41.209.603.113 yang terdiri dari Urusan Lingkungan Hidup.

3.2.2. Dukungan fiskal (APBN dan APBD) terhadap sektor informasi dan komunikasi

Realisasi APBN maupun APBD yang berhubungan dengan sektor informasi dan komunikasi berada pada fungsi ekonomi. Berdasarkan tabel 3.3 pada APBN, realisasi Fungsi Ekonomi sebesar Rp110.806.812.680 yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen; Program Ketahanan Sumber Daya Air; Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Bidang Pertanian); Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan; dan Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan. Pada APBD, realisasi Fungsi Ekonomi sebesar Rp135.060.061.199 yang terdiri dari Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral; Urusan Kehutanan; Urusan Kelautan dan Perikanan; Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Urusan Pangan; Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Urusan Penanaman Modal; Urusan Perdagangan; Urusan Perhubungan; Urusan Perindustrian; Urusan Pertanian; Urusan Tenaga Kerja; dan Urusan Transmigrasi.

3.2.3. Dukungan kebijakan yang pro peningkatan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan

Industri pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia termasuk bagi Kalimantan Barat. Selain sebagai penghasil bahan makanan, industri pertanian juga memberikan kontribusi besar terhadap lapangan kerja di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan industri pertanian sangatlah penting dalam mengatur keberlangsungan dan pengembangan sektor ini.

Beberapa kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap industri pertanian di Kalimantan Barat antara lain, program pengembangan desa dan pembangunan infrastruktur pertanian, peningkatan kualitas produk pertanian melalui bantuan teknologi dan pendidikan pertanian, serta program bantuan modal dan subsidi harga pupuk.

Program pengembangan desa dan pembangunan infrastruktur pertanian sangat penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan membantu petani dalam meningkatkan hasil panen mereka. Dengan adanya akses yang lebih mudah ke pasar dan infrastruktur transportasi yang memadai, petani dapat mempercepat proses distribusi hasil panen mereka ke pasar yang lebih luas. Selain itu, program ini juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat ekonomi lokal.

Peningkatan kualitas produk pertanian melalui bantuan teknologi dan pendidikan pertanian juga sangat penting dalam meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar internasional. Dalam era digital saat



ini, teknologi sangat diperlukan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Pemerintah juga memberikan bantuan pendidikan pertanian dan pelatihan kepada petani, sehingga mereka dapat menguasai teknik-teknik pertanian modern dan meningkatkan kualitas hasil panen mereka.

Program bantuan modal dan subsidi harga pupuk juga sangat penting dalam membantu petani meningkatkan produksi pertanian mereka. Bantuan modal dapat membantu petani membeli alat pertanian dan membiayai kegiatan pertanian lainnya, sedangkan subsidi harga pupuk membantu mengurangi biaya produksi pertanian.

3.2.4. Dukungan kebijakan yang pro peningkatan sektor informasi dan komunikasi

Provinsi Kalimantan Barat berupaya membangun ekosistem digital yang kuat dengan berkolaborasi dengan pihak terkait. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi diharapkan dapat menjadi salah satu kunci utama dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.

Melanjutkan kebijakan bidang TIK tahun 2022 antara lain: (1) membangun dan mengembangkan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses dan konektivitas *broadband* di seluruh wilayah Indonesia; (2) mendorong transformasi digital pada sektor ekonomi dan pemerintahan, serta mempersiapkan ekosistem digital dan SDM talenta digital; (3) membangun pusat data nasional dan implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE); dan (4) meningkatkan pengembangan SDM dalam industri TIK. Pada tahun 2023 sejalan dengan “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” sebagai tema Rencana Kerja Pemerintah, tahun 2023 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi Covid-19. Salah satu Prioritas Nasional yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dengan sasaran Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).

Pada tahun 2021 Presiden Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang bertujuan untuk mendukung tata kelola keuangan, keuangan inklusif, dan perekonomian nasional diperlukan percepatan dan perluasan digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk kegiatan transaksi belanja dan pendapatan daerah, serta pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital. Percepatan dan perluasan digitalisasi dilaksanakan untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik, sebagai upaya untuk mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan, guna mengoptimalkan pendapatan daerah dan kesehatan fiskal.

Sebagai turunan Keputusan Presiden diatas diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

dimana Pemerintah Daerah ditugaskan untuk membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang bertujuan untuk mendorong inovasi, mempercepat, dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 211 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, lahirnya Pergub ini dinilai sangat penting sebagai payung hukum yang telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar agar penyelenggaraan Inovasi Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Berdasarkan Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 yang lalu, Provinsi Kalbar merupakan daerah peringkat 13 se-Indonesia sebagai kategori Daerah Inovatif, dimana sebelumnya peringkat ke 33.

3.3. Analisis atas potensi pengembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan

3.3.1. Potensi pengembangan lebih lanjut atas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan

Sektor yang masuk dalam kuadran pertama adalah sektor yang memiliki nilai indeks BL dan Indeks $FL > 1$ sehingga sektor ini merupakan sektor yang dikategorikan unggul karena memiliki kemampuan besar untuk menggerakkan perekonomian baik dari segi sektor yang menjadi input maupun sektor yang Sektor yang masuk dalam kuadran kedua merupakan sektor yang memiliki nilai indeks *backward linkage* < 1 dan nilai indeks *forward linkage* > 1 sehingga sektor dalam kuadran ini memiliki kategori kemampuan dalam menggerakkan sektor yang menjadi input lebih rendah dibandingkan rata-rata total perekonomian namun memiliki kemampuan penyerapan output oleh sektor lainnya yang tinggi di atas rata-rata total perekonomian dan sektor ini masuk dalam kategori potensial unggul.

Sektor yang masuk dalam kuadran ketiga merupakan sektor yang memiliki nilai indeks *backward linkage* dan indeks *forward linkage* < 1 dimana artinya adalah sektor ini kemampuan untuk menggerakkan sektor yang menjadi input dan sektor yang memanfaatkan output sektor ini di bawah rata-rata total perekonomian sehingga sektor ini biasanya kurang diunggulkan.

Sektor yang masuk dalam kuadran keempat merupakan sektor yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan sektor dengan input di atas rata-rata total perekonomian atau nilai indeks *backward linkage* > 1 sedangkan kemampuan sektor yang memanfaatkan output dari sektor tersebut masih rendah dan di bawah rata-rata total perekonomian suatu wilayah atau nilai indeks *forward linkage* < 1 . Berdasarkan hasil nilai keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan disimpulkan 5 (lima) sektor unggulan yang berpotensi meningkatkan perekonomian Kalimantan Barat (sektor pertanian dengan FL terbesar dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan FL terbesar kedua) di antaranya: memanfaatkan output sektor tersebut sehingga masuk dalam kategori unggul.



Tabel 3.1
Pemetaan Sektor Unggulan dan Sektor Potensial Berdasarkan Metode Klasen dan Model I-O

	Sektor Unggulan	Sektor Potensial
Metode Klasen Typology Method, Shift Share	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian, kehutanan dan perikanan 2. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 3. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 4. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambangan dan penggalian 2. Industri pengolahan 3. Pengadaan listrik dan gas
Model Input-Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri pengolahan 2. Pengadaan listrik 3. Konstruksi 4. Pertanian, kehutanan dan perikanan 5. Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi dan komunikasi 2. Jasa keuangan dan asuransi 3. Pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang 4. Transportasi dan pergudangan 5. Penyediaan akomodasi dan makan minum

Sumber: BPS (diolah)

Sektor pertanian dengan sektor dengan nilai keterkaitan ke depan (*forward linkage*) terbesar merupakan sektor unggulan pendorong perekonomian pada Kalimantan Barat, mengingat adanya keterkaitan kedepan yang kuat untuk mendorong penggunaan outputnya pada sektor-sektor ekonomi lainnya maka kebijakan pemerintah daerah mendukung sektor ini dengan lebih efektif dan efisien.

Bonus geografi Kalimantan Barat menjadi salah satu potensi daerah terutama pada sektor ini. Berdasarkan RPJMD 2018-2023 Provinsi Kalimantan Barat, potensi pengembangan wilayah salah satunya diperuntukkan untuk pertanian tanaman pangan. Pengembangan kawasan peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat seluas sekitar 542.455 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dan kawasan perlindungan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebesar 460.000 hektar yang diarahkan tersebar diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas sektor-sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah jumlah SDM yang tersedia dan tingkat kualitas SDM. Tingkat kualitas ini meliputi penguasaan pada aspek teknologi, permodalan, serta pengairan sehingga produktivitas pertanian masih rendah jika dilihat dari rasio produksi sektor pertanian terhadap jumlah tenaga kerja di sektor pertanian.

Dukungan PMDN tahun 2022 pada sektor ini terbesar mencapai Rp 2.590.407,4 juta atau 40,38% dari total PMDN di Kalimantan Barat. Tidak hanya dukungan PMDN, melainkan dukungan dari swasta asing melalui PMA tahun 2021 pada sektor ini paling diminati, yaitu sebesar US\$ 243.148,4 ribu atau 52,47% dari total PMA di Kalimantan Barat. Kegiatan investasi agar diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan kelautan, industri pengolahan, dan industri manufaktur.

3.3.2. Potensi pengembangan lebih lanjut atas sektor informasi dan komunikasi

Sektor Informasi dan Komunikasi tidak memiliki pergeseran berarti dari tahun 2021 ke tahun 2022, dari Tabel 3.2 menunjukkan Sektor Informasi dan Komunikasi merupakan sektor yang memiliki nilai indeks *backward linkage* <1 dan nilai indeks *forward linkage* >1 sehingga sektor dalam kuadran ini memiliki kategori kemampuan dalam menggerakkan sektor yang menjadi input lebih rendah dibandingkan rata-rata total perekonomian namun memiliki kemampuan penyerapan output oleh sektor lainnya yang tinggi diatas rata-rata total perekonomian.

Tabel 3.2
Perbandingan Nilai Keterkaitan (Linkage) Antar Sektor Ekonomi
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dan 2022

Sektor	2021		2022	
	Nilai BL	Nilai FL	Nilai BL	Nilai FL
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,818239	1,5081549	0,8186057	2,0993575
Pertambangan dan Penggalian	0,8764495	0,9704924	0,8764853	0,9614245
Industri Pengolahan	1,0742629	1,51395	1,0750831	1,5045454
Pengadaan Listrik dan Gas	1,8628443	1,3222009	1,8568726	1,3091746
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,0245305	0,6684763	1,0235679	0,6670794
Konstruksi	1,1487826	1,0214517	1,1490257	1,0054124
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,8718716	1,5608891	0,8730038	1,6146725
Transportasi dan Pergudangan	1,0239163	0,8811139	1,0247551	0,9271825
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,1347421	0,7622718	1,1354803	0,7683815
Informasi dan Komunikasi	0,9210483	1,5169688	0,9211969	1,5138041
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,7650109	1,0706275	0,7654115	1,0436729
Real Estate	0,7832468	0,7490357	0,7833304	0,7388303
Jasa Perusahaan	0,9657479	0,7905184	0,9665902	0,8012714
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,9567289	0,7080851	0,9566943	0,7012066
Jasa Pendidikan	0,8234155	0,6317463	0,8237724	0,6316677
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,9563028	0,6385165	0,9567417	0,6383378
Jasa Lainnya	0,9928601	0,6855008	0,9933831	0,6885621

Sumber: BPS (Diolah)

Hasil Status Literasi Digital di Indonesia pada tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan Peringkat Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan dari peringkat 8 dengan indeks 3,28 pada tahun 2021 menjadi peringkat 2 dengan indeks 3,64 pada tahun 2022. Status Literasi Digital di Indonesia merupakan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan tingkat kecakapan dan pengetahuan digital, sekaligus memberikan gambaran kondisi dan peluang di setiap wilayah tanah air. Diharapkan dengan naiknya peringkat literasi digital masyarakat Kalimantan Barat ini juga menjadi peluang dan sekaligus tantangan untuk lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih cerdas dan memberikan ruang digital positif dalam kehidupan sehari-hari.



Tabel 3.4

15 Besar Indeks Literasi Digital berdasarkan Provinsi di Indonesia 2021-2022

Peringkat	Tahun 2022		Tahun 2021	
	Provinsi	Indeks	Provinsi	Indeks
1	DI Yogyakarta	3,64	DI Yogyakarta	3,71
2	Kalimantan Barat	3,64	Kepulauan Riau	3,68
3	Kalimantan Timur	3,62	Kalimantan Timur	3,62
4	Papua Barat	3,62	Sumatra Barat	3,61
5	Jawa Tengah	3,61	Gorontalo	3,61
6	Kalimantan Tengah	3,60	Papua Barat	3,61
7	Jawa Barat	3,60	Nusa Tenggara Timur	3,60
8	DKI Jakarta	3,59	Kalimantan Barat	3,68
9	Kep. Riau	3,59	Aceh	3,57
10	Jawa Timur	3,58	Kalimantan Utara	3,57
11	Sulawesi Tenggara	3,57	Sulawesi Barat	3,57
12	Papua	3,55	Kepulauan Bangka Belitung	3,57
13	Bengkulu	3,55	Jawa Timur	3,55
14	Maluku	3,54	Sulawesi Utara	3,53
15	Jambi	3,54	Lampung	3,52
	Skor Indeks 2022	3,54	Skor Indeks 2021	3,49

Berdasarkan hasil Status Literasi Digital di Indonesia, potensi peningkatan sektor Informasi dan komunikasi pada Provinsi Kalimantan Barat masih terbuka luas, mengutip hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2015-2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, Proporsi Individu Yang Menggunakan Internet pada Provinsi Kalimantan barat mengalami peningkatan sejak tahun 2015 sebesar 16,14% menjadi 38,38% pada tahun 2019.

3.3.3. Peningkatan dukungan pemerintah dalam rangka pengembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan

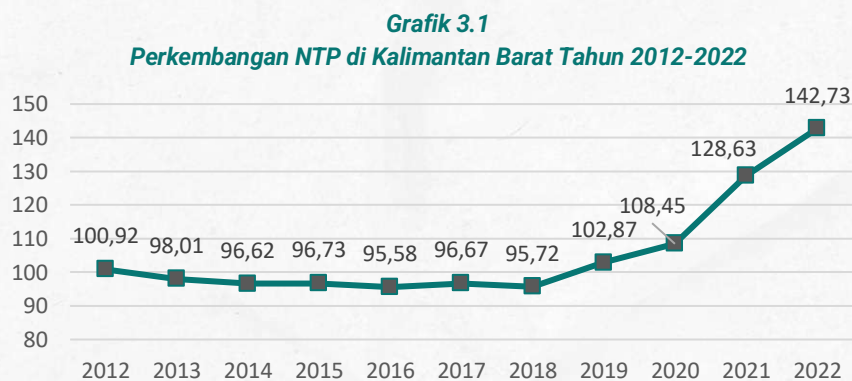
Lapangan usaha pertanian di Kalimantan Barat sampai saat ini masih menjadi sektor yang sangat potensial jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Hal tersebut bisa ditunjukkan dari daya serap tenaga kerja dan kontribusi lapangan usaha pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kalimantan Barat.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut bahwa jumlah penduduk yang bekerja per Agustus 2020 sebanyak 128,45 juta orang. Dari angka tersebut, terbanyak bekerja di sektor pertanian dengan 38,23 juta orang tenaga kerja atau sekitar 29,76% (data nasional). Selanjutnya terbanyak bekerja di sektor perdagangan dan industri pengolahan dengan porsi masing-masing sebesar 19,23% dan 13,61% dari total jumlah penduduk bekerja. Paling sedikit bekerja di sektor pengadaan listrik & gas dengan persentase 0,24%. Sama halnya dengan daya serap tenaga kerja, kontribusi tahunan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Kalimantan Barat pada tahun 2022 juga menempati posisi tertinggi jika dibandingkan dengan usaha lainnya, yaitu mencapai 21,10 persen.

Cakupan lapangan usaha pertanian menurut konsep dan definisi Badan Pusat Statistik (BPS) tidak hanya terbatas pada subsektor tanaman pangan seperti pengguna lahan padi dan palawija, namun juga mencakup subsektor perkebunan, kehutanan, hortikultura, perikanan, peternakan, serta jasa pertanian. Jika melihat cakupan lapangan usaha pertanian tersebut, Kalimantan Barat menjadi provinsi paling potensial jika dibandingkan dengan empat provinsi lainnya di Pulau Kalimantan. Pada subsektor

tanaman pangan, Kalimantan Barat memiliki luas panen dan produksi padi terbesar kedua setelah Kalimantan Selatan (BPS, 2021). Luas panen dan produksi padi di Kalimantan Barat adalah sebesar 223,16 ribu hektar. Dengan luasan tersebut, Kalimantan Barat pada mampu menghasilkan sebanyak 711,90 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG) atau sebanyak 421,15 ton beras.

Melihat data-data tersebut, maka pemerintah sudah seharusnya pemerintah memberikan intervensi yang dapat mendorong sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan bertumbuh pesat serta mendorong para petani agar lebih sejahtera. Erat kaitannya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Berikut ini adalah perkembangan data NTP di Kalimantan Barat:



Sumber: BPS (diolah)

Arti angka NTP adalah sebagai berikut:

- NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Dari Indeks Harga yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. Dari Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi



harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.

NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.

Berdasarkan Grafik 3.1, NTP di Kalimantan Barat sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 sangat fluktuatif namun cenderung naik mulai tahun 2019. Pada tahun 2012, NTP sebesar 100,92 yang artinya petani mengalami surplus, dalam artian harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya (pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya). Sedangkan pada tahun 2013 sampai dengan 2018 NTP di Kalimantan Barat cenderung turun pada angka kisaran 90-100 poin yang artinya petani mengalami impas, kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi (pendapatan petani sama dengan pengeluarannya). Kemudian mulai tahun 2018 sampai tahun 2023, NTP di Kalimantan Barat terus naik dan selalu di atas 100 poin, yang artinya petani mengalami surplus, dalam artian harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya (pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya).

Namun apabila dirinci lebih jauh, terdapat beberapa subsektor penyusun NTP yaitu:

1. Subsektor Sub Sektor Tanaman Pangan, seperti padi dan palawija
2. Sub Sektor Hortikultura, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan
3. Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR), seperti kelapa, kopi robusta, cengkeh, tembakau, dan kapuk odolan. Jumlah komoditas ini juga bervariasi antara daerah.
4. Sub Sektor Peternakan, seperti ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi, dll), unggas (ayam, itik, dll), hasil-hasil ternak (susu sapi, telur, dll).
5. Sub Sektor Perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

Berikut ini adalah data rincian Nilai Tukar Petani:

Tabel 3.4
Perkembangan NTP per Subsektor di Kalimantan Barat Tahun 2012-2022

Sub Keolompok NTP	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Tukar Petani	100,92	98,01	96,62	96,73	95,58	96,67	95,72	102,87	108,45	128,63	142,73
Nilai Tukar Petani Palawija (NTPP)	96,82	95,28	96,21	98,7	97,34	94,4	95,42	100,11	96,92	94,26	92,36
Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)	103,93	103,08	96,4	103,31	103,04	101,09	100,76	99,44	99,05	104,83	102,78
Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)	113,95	106,58	97,01	93,38	91,46	97,89	94,44	104,45	114,66	146,95	170
Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	80,59	79,19	97,46	95,49	95,38	93,95	94,26	99,11	97,55	99,06	102,1
Nilai Tukar Petani Perikanan (NTPN)	104,18	103,14	97,05	100,01	102,59	102,03	104,91	102	98,22	105,1	102,95

Sumber: BPS (diolah)

Rincian data NTP yang bersumber dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa semua subsektor penyusun nilai NTP yang memberikan kontribusi nilai besar (lebih dari 100 poin) kecuali subsektor tanaman pangan seperti padi dan palawija. Subsektor perkebunan memiliki kontribusi yang paling tinggi karena komoditas sawit menjadi salah satu komponennya. Komoditas sawit memang merupakan komoditas unggulan di Kalimantan Barat. Namun hal ini berkebalikan dengan subsektor tanaman pangan. Selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2022, Nilai NTP subsektor tanaman pangan selalu di bawah 100, artinya petani mengalami impas, kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi (pendapatan petani sama dengan pengeluarannya).

Berdasarkan diskusi yang telah dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dengan berbagai pihak seperti *Local Expert* serta BPS, terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab nilai NTP subsektor tanaman pangan selalu di bawah 100 poin. Salah satu kendalanya adalah karena petani tanaman pangan yang ada saat ini hanya fokus menanam untuk memenuhi ketahanan pangan rumah tangganya sendiri. Hasil panen subsektor tanaman pangan belum merambah ke dunia bisnis dengan skala pasar yang besar. Selain kurangnya informasi pasar tanaman pangan, kondisi geografis Kalimantan Barat, serta *skill* SDM dari para petani belum kompeten untuk merambah ke dunia bisnis tanaman pangan. Hampir seluruh lahan yang ada di Kalimantan Barat merupakan lahan gambut, namun bukan berarti para petani di Kalbar tidak bisa menanam tanaman pangan sama sekali.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada subsektor tanaman pangan, Kalimantan Barat memiliki luas panen dan produksi padi terbesar kedua setelah Kalimantan Selatan (BPS, 2021). Luas panen dan produksi padi di Kalimantan Barat adalah sebesar 223,16 ribu hektar. Dengan luasan tersebut, Kalimantan Barat pada mampu menghasilkan sebanyak 711,90 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG) atau sebanyak 421,15 ton beras.

Oleh karena itu, Pemerintah perlu memberikan upaya untuk menjaga nilai NTP agar tetap stabil di atas 100 poin. Pemerintah Daerah perlu memberikan himbuan kepada para petani tanaman pangan di Kalbar untuk dapat menanam tanaman pangan sesuai dengan perkiraan data cuaca. Misalnya Pemerintah Daerah dapat mendorong percepatan penanaman padi pada musim hujan karena ketersediaan air masih sangat cukup serta curah hujan masih merata dan sedang. Petani diharapkan bisa menyikapi datangnya kondisi baik iklim kering maupun basah. Diharapkan kepada seluruh petani dan penyuluh pertanian di jajaran pemerintah daerah sudah mempersiapkan strategi dalam rangka menjaga ketersediaan air. Selain itu, diperlukan adanya perbaikan perlakuan dan peningkatan teknologi budidaya tanaman. Diperlukan juga adanya jaminan produk pertanian lahan rawa untuk dapat dipasarkan dengan mudah oleh petani.

3.3.4. Peningkatan dukungan pemerintah dalam rangka pengembangan sektor informasi dan komunikasi



Dukungan anggaran TIK pada sejumlah Kementerian Lembaga (antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, dan lain-lain) yang terus meningkat setiap tahunnya hal ini terlihat pada Grafik 3.2 dibawah ini.

Grafik 3.2
Perkembangan Anggaran TIK Belanja K/L 2017-2022 (triliun Rupiah)



Sumber: Buku Nota Keuangan dan RABPN 2022

Pada tahun 2023 untuk mendukung pengembangan ekonomi digital, diperlukan juga pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung transformasi digital. Tantangan pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) antara lain belum meratanya penyediaan teknologi digital dan jaringan telekomunikasi, serta perlu optimalisasi layanan digital pada sektor publik, industri, pariwisata, dan jasa. Untuk menghadapi tantangan dimaksud salah satu arah kebijakan pada tahun 2023 anggaran bidang infrastruktur diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru yaitu mendukung pemerataan akses terhadap infrastruktur TIK dalam mendukung aktivitas ekonomi.

3.3.5. Potensi meningkatkan keterlibatan di luar pemerintahan

Penguatan sektor pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan ketahanan pangan dengan mendorong produktivitas hasil pertanian melalui mekanisme modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan).

Terlebih juga untuk menghadapi ancaman perubahan iklim dan dinamika geopolitik global yang berdampak pada krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial. Kredit Usaha Rakyat bidang pertanian (KUR Pertanian) merupakan upaya pemerintah untuk memajukan sektor pertanian Indonesia. Pertanian menjadi sektor penting, apalagi Indonesia menjadi negara agraris terbesar ketiga di dunia.

Pertanian yang maju, mandiri, dan modern mustahil tanpa intervensi penguatan modal. Dengan intervensi permodalan ini, dimungkinkan tercapai peningkatan hasil yang bermuara pada peningkatan pendapatan petani. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka penguatan permodalan bagi petani

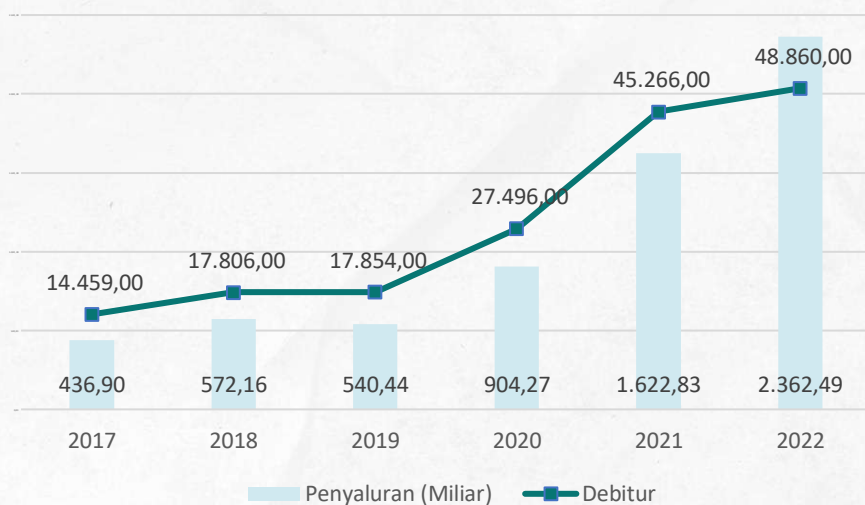
yaitu dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bidang pertanian. Melalui program ini, petani dapat terbantu dalam mengembangkan budidaya pertanian dari hulu hingga hilir.

Pemerintah telah memberikan payung hukum untuk memperkuat sektor pertanian agar mendapat pembiayaan modal melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian.

Tujuan pemberian KUR pada sektor pertanian adalah:

1. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan kecil pada sektor pertanian dan menjaga ketahanan pangan nasional serta penyerapan tenaga kerja;
2. Memberikan insentif kepada petani yang mampu mempertahankan lahan budi daya pertanian yang salah satunya berupa penyediaan sarana budi daya pertanian dan prasarana budi daya pertanian serta penyediaan bantuan modal atau kredit usaha;
3. Meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Grafik 3.3
Perkembangan Penyaluran KUR sektor Pertanian



Sumber: SIKP (diolah)

Berdasarkan Grafik 3.2, dapat dilihat bahwa baik jumlah debitur maupun jumlah penyaluran KUR sektor pertanian terus meningkat. Perbankan yang merupakan BUMN selaku penyalur KUR perlu tetap melakukan usaha untuk meningkatkan penyaluran KUR, misalnya melalui sosialisasi kepada komunitas petani atau bekerja sama dengan pemerintah desa yang mayoritas penduduk desanya merupakan petani tanaman pangan. Selain itu, pemerintah daerah dapat membentuk BUMD yang bergerak di bidang penyewaan alat dan mesin pertanian. Pemerintah Daerah juga dapat menjadi jembatan agar

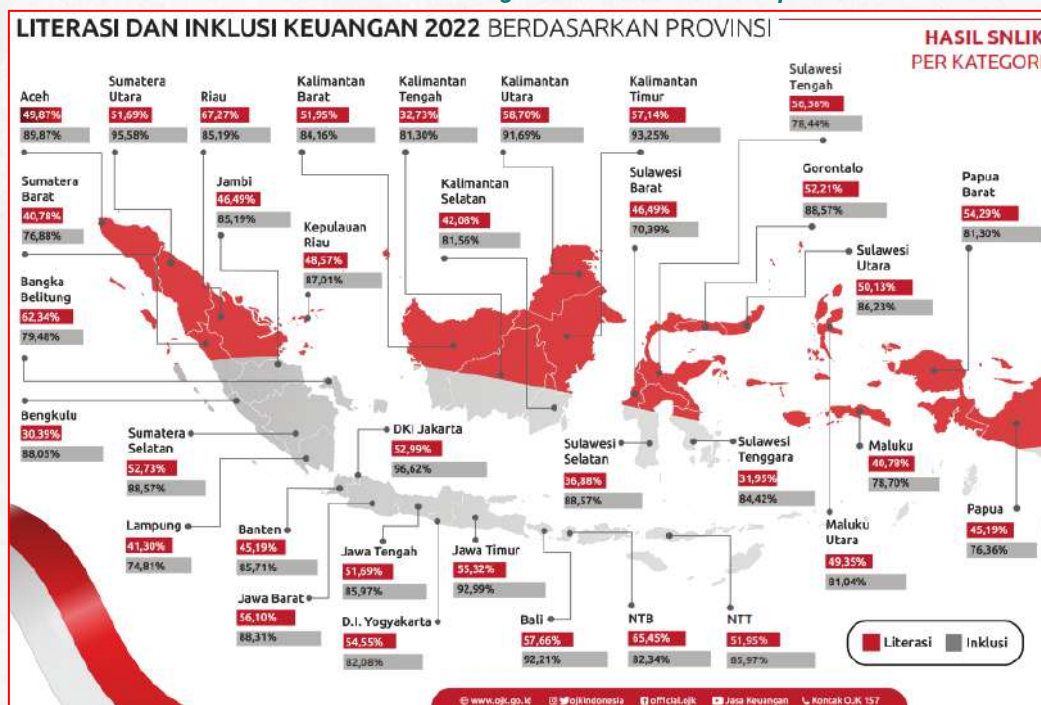


UMKM dapat berkolaborasi dengan para petani tanaman pangan. Sebagai contoh, untuk tanaman perkebunan sektor kopi, Kanwil DJPb Prov. Kalbar telah melaksanakan FGD Kopi Liberika dalam rangka kegiatan UMKM Week Kemenkeu Satu Kalimantan Barat Tahun 2023 pada 11 Agustus 2023. Pada FGD tersebut, Pemerintah Desa menjadi jembatan bagi para petani kopi liberika sambas dan UMKM 101 Coffee House untuk bekerja sama. UMKM 101 Coffee House menampung hasil panen petani kopi liberika sambas untuk selanjutnya dijual menjadi produk kopi *roasted*, bubuk kopi, atau bahkan kopi siap minum. Hal ini mungkin bisa menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menjembatani UMKM agar dapat memasarkan produk hasil panen para petani tanaman pangan.

Penguatan pada sektor informasi dan komunikasi terus diupayakan, Pemerintah meningkatkan infrastruktur TIK, sehingga peran APBN dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pada beberapa sektor untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengurangi ketimpangan dapat terwujud.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022 menunjukkan Provinsi Kalimantan Barat memperoleh Indeks Literasi Keuangan sebesar 51,95% di atas rata-rata nasional sebesar 49,68% dan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 84,16% dibawah rata-rata nasional sebesar 85,10%. Hasil survei ini menunjukkan banyak penduduk Kalimantan Barat yang sudah mengakses fasilitas perbankan tetapi kekurangan pengetahuan mengenai keuangan (literasi keuangan).

Grafik 3.4
Literasi dan Inklusi Keuangan 2022 Berdasarkan Propinsi



Sumber : OJK

Literasi Keuangan diartikan sebagai pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*, keyakinan (*confidence*) yang mempengaruhi sikap (*attitude*), dan perilaku keuangan (*behaviour*) seseorang untuk

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Sedangkan Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Guna mendorong pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada 2024, Pemerintah harus terus gencar melakukan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia sebagai dukungan terhadap sektor informasi dan komunikasi dapat tercapai.

3.4. Rekomendasi kebijakan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada Laporan Kajian Fiskal Regional Tahunan 2022, telah dilakukan analisis sektor unggulan dan sektor potensial dengan menggunakan metode LQ, *Shift Share*, Tipologi Klassen serta Model I-O. Dari analisis tersebut, dipilih sektor sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan salah satu sektor potensial adalah sektor informasi dan komunikasi untuk dianalisis lebih lanjut terkait potensi pengembangannya. Hal-hal yang menjadi rekomendasi dalam rangka pengembangan sektor unggulan dan sektor potensial terpilih antara lain:

- Pemerintah perlu memberikan bantuan pendidikan pertanian dan pelatihan kepada petani, sehingga mereka dapat menguasai teknik-teknik pertanian modern dan meningkatkan kualitas hasil panen mereka. Peningkatan kualitas produk pertanian melalui bantuan teknologi dan pendidikan pertanian juga sangat penting dalam meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar internasional. Dalam era digital saat ini, teknologi sangat diperlukan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian.
- Kegiatan investasi agar diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan kelautan, industri pengolahan, dan industri manufaktur.
- Memberikan himbauan kepada para petani tanaman pangan di Kalbar untuk dapat menanam tanaman pangan sesuai dengan perkiraan data cuaca, misalnya Pemerintah Daerah dapat mendorong percepatan penanaman padi pada musim hujan karena ketersediaan air masih sangat cukup serta curah hujan masih merata dan sedang.
- Diperlukan perbaikan perlakuan dan peningkatan teknologi budidaya tanaman.
- Diperlukan adanya jaminan produk pertanian lahan rawa untuk dapat dipasarkan dengan mudah oleh petani.
- Saat ini pemerintah sudah memberikan alternatif pembiayaan untuk bantuan modal kepada para petani melalui mekanisme kredit KUR. Selanjutnya menjadi peluang bagi perbankan untuk meningkatkan penyaluran KUR kepada para petani melalui sosialisasi.
- Pemerintah Daerah dapat membentuk BUMD yang bergerak di bidang penyewaan alat dan mesin pertanian.
- Pemerintah Daerah juga dapat menjadi jembatan agar UMKM dapat berkolaborasi dengan para petani tanaman pangan.



- Kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan melalui edukasi keuangan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung literasi keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat. Edukasi Keuangan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, lokakarya, pendampingan, pelatihan komunitas, program penjangkauan, dan/atau permainan.
- Pengembangan sarana dan prasarana dapat berbentuk: a) pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi; b) penyediaan materi Edukasi Keuangan yang dapat diakses oleh Konsumen dan/atau masyarakat; c) pelatihan sumber daya manusia.
- Kegiatan untuk meningkatkan inklusi keuangan mencakup perencanaan dan pelaksanaan atas: a) perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan kepada target Konsumen; b) penyediaan produk dan/atau layanan; dan/atau c) keberlangsungan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan untuk tetap dapat dimanfaatkan oleh konsumen dan/atau masyarakat dalam bentuk fisik atau digital.
- Penyediaan infrastruktur terkait inklusi keuangan dapat dilakukan dalam bentuk: a) penambahan jaringan kantor; b) penambahan kerja sama dengan pihak lain; c) pengembangan saluran distribusi produk dan/atau layanan; d) penyediaan sarana khusus kepada Konsumen dan/atau masyarakat penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia; e) dukungan terhadap program pemerintah atau otoritas untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; dan/atau f) infrastruktur lainnya.



Halaman ini sengaja dikosongkan



KFR
Triwulan II-2023

BAB IV

Analisis Tematik

BAB IV

Analisis Tematik



4.1. Pendahuluan

4.1.1. Latar Belakang

Kanwil DJPb sebagai *Regional Chief Economist* dan *Financial Advisor* turut mengawal implementasi UU HKPD yang telah diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022. Salah satu kontribusi pengawalan implementasi UU HKPD tersebut adalah penguatan *Local Taxing Power* untuk meningkatkan kemandirian daerah dan optimalisasi PAD. *Taxing power* atau yurisdiksi pemajakan sendiri merupakan kewenangan pemerintah untuk mengenakan pajak di dalam wilayah kekuasaannya atau *the power to tax*. Dalam konteks *Local Taxing Power* hal ini menunjukkan penguatan dasar kewenangan suatu daerah dalam memungut pajak dan retribusi daerah kepada seseorang atau suatu badan terutama mengenai kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, diantaranya yang berkenaan dengan orang, barang, atau objek yang berada di wilayah kekuasaan daerahnya.

Semangat dalam UU HKPD adalah sinergi antara Pusat dan daerah. Adapun sinergi Pusat dan daerah dari aspek perpajakan yang sudah diinisiasi dalam UU HKPD akan diperkuat melalui kebijakan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum PDRD (RPP KUPDRD) sebagai peraturan pelaksanaan UU HKPD yang saat ini masih dalam proses penyusunan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut antara lain penyalarsan KUPDRD dengan UU KUP (dan penyesuaiannya dalam UU HPP) dan pengaturan mengenai kerja sama optimalisasi pemungutan pajak antara Pemda dengan Pemerintah, Pemda lain, dan pihak ketiga.

Selain itu, penguatan *Local Taxing Power* sebagai salah satu pilar penopang kesejahteraan masyarakat, sebagaimana telah dirumuskan dalam UU HKPD dan yang akan diperkuat dalam RPP KUPDRD hanya dapat berhasil optimal jika didukung oleh pengelolaan dan pemanfaatan data yang baik, serta terjalannya sinergi yang efektif dan selaras tidak hanya antar pemda provinsi dan kabupaten/kota, tetapi juga dengan Pemerintah Pusat dan pihak ketiga terkait, sehingga kedua hal tersebut kiranya dapat menjadi atensi dan prioritas bersama untuk ditingkatkan.

Dalam UU HKPD, penguatan *Local Taxing Power* merupakan salah satu pilar utama implementasi HKPD untuk mendukung reformasi pendapatan daerah melalui kebijakan antara lain berupa:

1. **Restrukturisasi pajak daerah** yang dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);



2. **Kewenangan pemungutan Opsen Pajak** yang merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi tanpa menambah beban wajib pajak;
3. **Perluasan basis pajak daerah** melalui sinergi pajak pusat dan daerah seperti valet parkir, objek rekreasi, persewaan sarpras olahraga, dan sebagainya;
4. **Penyerdahanaan retribusi daerah** melalui rasionalisasi jumlah retribusi yang diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam implementasinya, terdapat hal-hal yang perlu di perhatikan oleh Pemerintah Daerah:

1. Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD menegaskan bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi **ditetapkan dalam 1 (satu) Perda** dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.
2. Pasal 187 UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD menegaskan bahwa Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah **masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (05 Januari 2022).
3. Tahun 2023 merupakan tahun politik menyongsong dilaksanakannya Pemilu serentak sehingga para peserta pemilu akan disibukkan dengan penggalangan suara pemilih. Raperda PDRD yang sudah disesuaikan dengan UU 1 Tahun 2022 sudah diajukan ke Kemendagri untuk **dievaluasi paling lama pertengahan 2023**.

Sebagaimana diketahui bahwa selain melalui intervensi secara langsung dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, ada beberapa hal yang termasuk dalam *beyond* pajak dan tidak bisa diintervensi, misalnya *trust/kepercayaan publik*. Untuk meningkatkan hal tersebut pemerintah dalam melakukan beberapa hal diantaranya melalui *enforcement* (regulasi yang jelas), memberikan kemudahan membayar pajak, dan membangun kepercayaan publik melalui upaya pemberantasan korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sehubungan dengan implementasi UU HKPD yang baru berjalan sejak ditetapkan tanggal 5 Januari 2022, saat ini Pemerintah Daerah sedang dalam proses penyesuaian Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sesuai amanat UU HKPD, yakni dalam tempo 2 tahun atau s.d. 5 Januari 2024 untuk menyesuaikan ketentuan perpajakan dan retribusi daerahnya. Perubahan ketentuan PDRD tersebut tujuannya antara lain adalah dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD. Oleh karena itu, analisis tematik akan mereviu progres implementasi penguatan *Local Taxing Power* oleh Pemerintah Daerah.

4.1.2. Tujuan dan Ruang Lingkup

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus berupaya meramu kebijakan fiskalnya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan salah satunya melalui terbitnya UU HKPD yang memungkinkan adanya

Local Taxing Power. Pada kajian ini, dilakukan analisis tematik yang akan mereviu progres implementasi penguatan *Local Taxing Power* oleh Pemerintah Daerah. Analisis ini bertujuan untuk:

- a. Mendorong kualitas perencanaan dan penganggaran di daerah;
- b. Meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kemandirian fiskal daerah;
- c. Meningkatkan kualitas belanja di daerah;
- d. Mendorong ekonomi desa yang maju melalui pendampingan dan pengawasan terintegrasi;
- e. Menjadi bahan perumusan strategi pembiayaan yang efektif dan efisien untuk akselerasi pembangunan daerah.

Selain itu, pada laporan KFR kali ini akan dibahas pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Analisis ini dilakukan untuk melihat jenis pajak yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan PDRB pada Kalimantan Barat sehingga dapat mengetahui potensi *Local Taxing Power*.

4.1.3. Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dimana akan dikumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

4.2. Analisis Kemandirian Fiskal Daerah

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan atau rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan. Oleh karena itu, reviu atas kemandirian fiskal daerah dipandang perlu untuk dilakukan agar kemandirian fiskal daerah bisa dipetakan dan diketahui kondisi kemandirian fiskal tiap-tiap daerah.

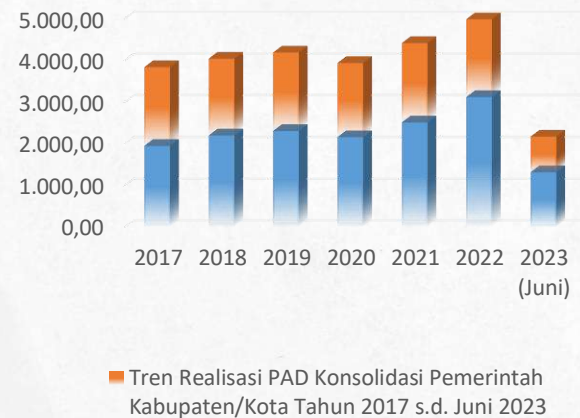
4.2.1. Perkembangan Total PAD Pemerintah Provinsi dan Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota

Berbicara mengenai PAD Pemerintah Daerah, tentunya Pemerintah Provinsi jauh memiliki PAD yang lebih besar daripada Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat. Hal ini berpengaruh terhadap Indeks Kemandirian Fiskal. Mengutip dari Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019 oleh BPK RI, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat termasuk kategori Menuju Kemandirian. Sedangkan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat termasuk dalam kategori Belum Mandiri.



Berdasarkan data yang telah dihimpun dari LKPD Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Provinsi, tren realisasi PAD baik Pemerintah Provinsi maupun Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terdapat pada kenaikan dari 2021 ke tahun 2022 dimana pada PAD Pemerintah Provinsi mengalami kenaikan hingga 24,20% sedangkan PAD Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota mengalami kenaikan hingga 7,02%. Realisasi PAD Pemerintah Provinsi sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp1.314,05 milyar sedangkan realisasi PAD Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp852,97 milyar.

Grafik 4.1.
Tren Realisasi Total PAD Pemerintah Provinsi dan Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota



Sumber: LKPD Pemda

Adanya kenaikan yang cukup signifikan ini karena pada tahun 2022 merupakan tahun *recovery* dari dampak pandemi Covid-19 pada berbagai sektor sehingga mempengaruhi PAD pada Pemerintah Daerah. Pada tahun 2022 telah banyak pelanggaran aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk aktivitas masyarakat. Dengan demikian, capaian perolehan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan tahun 2021.

4.2.2. Perkembangan Realisasi Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi dan Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota

Konsep desentralisasi erat kaitannya dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan dan pelaksanaan proses pembangunan. Pelaksanaan desentralisasi yang berwujud pada otonomi daerah merupakan suatu gejala yang tidak terhindarkan dan diimplementasikan oleh hampir seluruh negara yang ada di seluruh dunia dengan segala variasinya sesuai dengan kondisi dan karakteristiknya masing-masing. Di sejumlah negara berkembang, pemerintah-pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan pendapatannya. Beragam langkah ditempuh untuk mewujudkan perolehan penerimaan yang cukup substansial untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang diemban oleh pemerintah daerah otonom. Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah otonom adalah meningkatkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dengan jalan secara terus menerus mengoptimalkan penerimaan pajak yang telah ada seraya menggali peluang serta potensi pajak daerah baru yang dapat diperoleh.

Grafik 4.2.
*Perkembangan Realisasi Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi
Dan Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota*



Sumber: BPS Kalbar dan Nasional

Berdasarkan grafik di atas, tren realisasi jenis pajak dan retribusi Pemerintah Provinsi maupun konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2017 s.d. Juni 2023 cenderung mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2020, realisasi jenis pajak dan retribusi Pemerintah Provinsi berkontraksi sebesar 7,94% dengan realisasi Rp1.846,11 milyar sedangkan, realisasi jenis pajak dan retribusi Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota berkontraksi sebesar 11,36% dengan realisasi Rp894,08 milyar.

Seperti yang kita tahu, pandemi Covid-19 mulai terjadi pada Maret 2020. Semakin berkembangnya Pandemi Covid-19 khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah membuat berbagai kebijakan. Pada masa pandemi ini, terdapat peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang membatasi berbagai aktivitas masyarakat. Kebijakan tersebut juga berlaku terhadap aspek-aspek yang dikenakan pajak daerah seperti aturan jam operasional restoran dan pembatasan jumlah kunjungan yang berdampak terhadap pemasukan restoran, sehingga memengaruhi jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. "Penurunan pajak terjadi akibat diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan pariwisata merupakan sektor yang sangat terdampak oleh Covid-19" (Muliati (2019)). Hal ini juga didukung oleh Soehardi,dkk (2020) pendapatan tempat wisata merupakan indikator dalam perolehan pajak daerah. Dalam bidang pariwisata pajak yang dihasilkan seperti pajak hiburan dan pajak restoran. Dengan adanya PSBB yang berlangsung berakibat menurunnya tingkat mobilisasi masyarakat dalam bepergian untuk berwisata. Hal ini berdampak terhadap penurunan perolehan pajak daerah, misalnya pajak parkir dan pajak hotel. Hal ini juga didukung oleh Syamsuddin (2021) mengungkapkan jika pajak hotel dan pajak restoran mengalami penurunan di saat Pandemi Covid-19.

Selain itu, menurunnya tingkat pendapatan masyarakat yang mengalami PHK atau pengurangan karyawan di tempat kerja berimbas terhadap menurunnya daya beli masyarakat di masa Pandemi



Covid-19, sehingga pelaku usaha membuat strategi-strategi agar usahanya tidak gulung tikar dengan menggunakan layanan periklanan agar dapat menarik konsumen. Selain berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat, pengurangan karyawan yang berdampak terhadap pengurangan produksi memiliki pengaruh terhadap penurunan penggunaan listrik pada tempat industri serta adanya kebijakan stimulus yang diberikan oleh PLN berakibat terhadap penurunan perolehan pajak penerangan jalan. Selain itu dapat juga berpengaruh terhadap pengurangan produksi bahan mineral bukan logam dan batuan akibat rendahnya permintaan konsumen karena perekonomian yang mengalami lesu di masa Pandemi Covid-19.

Penurunan tingkat permintaan produk berpengaruh juga terhadap penggunaan air tanah untuk keperluan industri di masa Pandemi Covid-19, tetapi perolehan pajak air tanah dapat juga mengalami peningkatan apabila tarif pungutan pajak air tanah mengalami penyesuaian dan terdapat objek baru yang dikenakan pajak air bawah tanah.

Pemerintah memberikan keringanan terhadap wajib pajak agar perolehan pajak PBB tidak mengalami penurunan seperti pembebasan denda pajak daerah di tahun-tahun sebelumnya, memberikan diskon, dan menunda pembayaran dengan waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan agar wajib pajak dapat patuh untuk membayar PBB yang terutang.

Tren realisasi jenis pajak dan retribusi Pemerintah Provinsi maupun konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota kembali terangkat pada tahun 2022, tahun *recovery* dari dampak Pandemi Covid-19. Kebijakan PSBB sudah dicabut pada tahun 2022 sehingga aktivitas masyarakat kembali normal dan mendorong perekonomian untuk tumbuh kembali. Tumbuhnya perekonomian ini memberikan dampak positif pada penerimaan Pemerintah Daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah. Pada tahun 2022, realisasi jenis pajak dan retribusi Pemerintah Provinsi naik sebesar 24,71% dengan realisasi Rp2.686,22 milyar sedangkan, realisasi jenis pajak dan retribusi Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota naik sebesar 13,10% dengan realisasi Rp1.084,23 milyar.

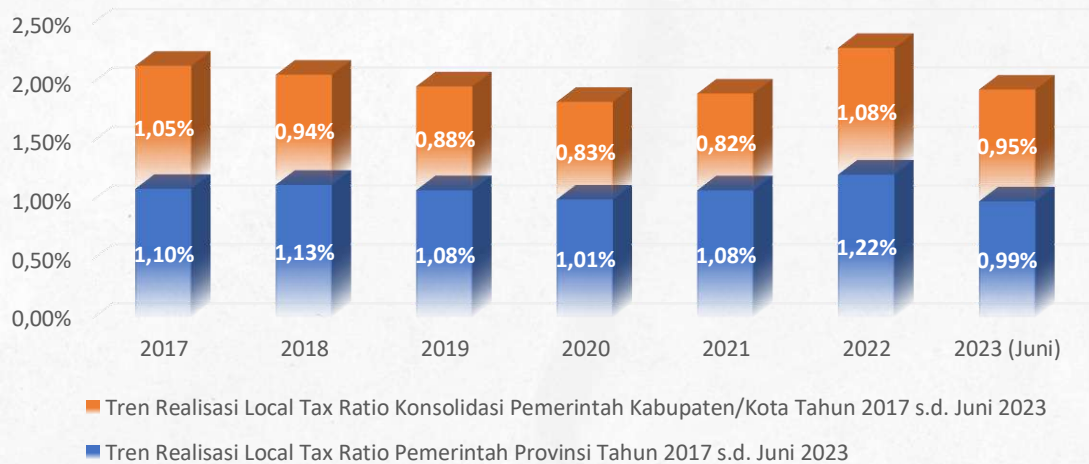
4.2.3. Perkembangan *Local Taxing Ratio* Pemerintah Provinsi dan Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota

Tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak yang dikumpulkan pada suatu masa dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga *Local Taxing Ratio* secara sederhana adalah perbandingan antara penerimaan pajak daerah pada periode tertentu dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). *Local Taxing Ratio* merupakan suatu ukuran kinerja penerimaan pajak dalam suatu daerah. Namun, *Local Taxing Ratio* bukanlah satu-satunya indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja pajak daerah.

Menurut aturan dasar perpajakan di Indonesia pada UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat rasio pajak, yaitu faktor-faktor yang bersifat makro dan faktor-faktor yang bersifat mikro. Faktor-faktor yang bersifat makro di antaranya adalah tarif pajak, tingkat pendapatan per kapita, dan tingkat optimalisasi tata

laksana pemerintahan yang baik. Sedangkan, faktor-faktor yang bersifat mikro antara lain adalah tingkat kepatuhan wajib pajak, komitmen dan koordinasi antar-lembaga negara, serta kesamaan persepsi antara wajib pajak dan petugas pajak

Grafik 4.3.
Perkembangan Local Taxing Ratio Pemerintah Provinsi dan Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota



Sumber: BPS Kalbar dan Nasional

Berdasarkan Grafik 3.3 di atas, tren *local taxing ratio* dari tahun 2017 sampai dengan Juni 2023 masih fluktuatif. Namun bila dihitung rata-rata, tren *local taxing ratio* dari tahun 2017 sampai dengan Juni 2023 rata-rata mengalami kenaikan 2,38% setiap tahunnya. Kontraksi paling dalam selama 6 tahun terakhir terdapat pada tahun 2020 sebesar 7,20%. Hal ini tidak lepas dari adanya Pandemi Covid 19 seperti penjelasan pada bagian sebelumnya. *Local taxing ratio* Pemerintah Provinsi Kalbar paling tinggi pada tahun 2022 sebesar 1,22; sedangkan *local taxing ratio* Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota paling tinggi pada tahun 2022 sebesar 1,08%.

Semakin tinggi nilai *local taxing ratio*, semakin besar penerimaan pajak dan semakin leluasa pemerintah membiayai penerimaannya. Beberapa cara untuk meningkatkan *local taxing ratio* adalah dengan melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah terutama dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meminimalisasi kebocoran penerimaan pajak dengan terus menggali potensi-potensi pajak daerah.

4.3. **Reviu Kesiapan Daerah dalam Penguatan *Local Taxing Power***

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan audiensi pada 12 Mei 2023 di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Barat. Pembahasan ini bertema “Analisis Kinerja dan Potensi Peningkatan *Local Taxing Power* pada Penerimaan Negara dan Daerah”. Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Nomor S-1109/WPB.17/2023 tanggal 11 Mei 2023 hal Permohonan Audiensi terkait “Analisis Kinerja dan Potensi Peningkatan *Local Taxing Power* pada Penerimaan Negara dan Daerah”. Selain itu, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat juga melakukan audiensi dengan BPKAD



Kabupaten Bengkayang pada tanggal 3 Agustus 2023 serta BKD Kota Singkawang pada tanggal 4 Agustus 2023. Kabupaten Bengkayang dipilih untuk mewakili sampel kabupaten sedangkan Kota Singkawang dipilih sebagai sampel untuk daerah kota. Berdasarkan forum diskusi yang telah dilaksanakan, progres kesiapan daerah dalam penguatan *Local Taxing Power* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Reviu Kesiapan Daerah dalam Penguatan
Local Taxing Power pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

No.	Komponen checklist	Status Progres	Target Implementasi	Tantangan	Strategi Implementasi
1.	Raperda PDRD sesuai dengan UU HKPD	Sampai dengan bulan 17 Maret 2023 masih berada dalam pembahasan di anggota dewan (DPRD).	Sesuai aturan paling lambat 1 Januari 2024, dikecualikan untuk: 1. PKB dan BBNKB beserta opsen berlaku paling lambat 1 Januari 2025 atau 3 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. 2. Pada saat Raperda ditetapkan untuk Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA).	1. Peraturan Pemerintah (RPP) belum tersedia, sehingga apabila Raperda yang telah disahkan menjadi Perda bisa saja tidak sesuai dengan PP/RPP. 2. Peraturan harus dalam satu Peraturan (untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam satu Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah) namun dengan belum ditetapkannya PP menyebabkan Pemda masih ragu untuk menetapkan Perdanya.	1. Penyusunan Raperda lebih awal. 2. Pembahasan Raperda telah dilaksanakan sejak tahun 2022. 3. Perlunya ruang kompromi antara Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah.
2.	Skenario Opsen Pajak Daerah dan Dampaknya terhadap PAD APBD Provisi dan Kabupaten/Kota	Sampai dengan bulan 17 Maret 2023 masih berada dalam pembahasan di anggota dewan (DPRD).	Sesuai aturan paling lambat 1 Januari 2024, dikecualikan untuk: 1. PKB dan BBNKB beserta opsen berlaku paling lambat 1 Januari 2025 atau 3 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. 2. Pada saat Raperda ditetapkan untuk Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA).	1. Dilema dalam penentuan tarif pajak oleh pemerintah provinsi agar tidak menambah beban wajib pajak dan juga tidak menurunkan pendapatan daerah. 2. Penurunan penyediaan infrastruktur pemerintah daerah karena terjadi penurunan pendapatan daerah. 3. Kemungkinan terjadi keberatan dari Wajib Pajak terhadap pokok pajak karena terjadi kenaikan pokok pajak.	1. Sudah dilaksanakan pertemuan awal, namun teknis opsen pajak kepada pemerintah kab/kota belum dibahas secara lebih lanjut. 2. Penerimaan opsen pajak (bagi hasil pajak kepada kab/kota) setiap Wajib Pajak akan langsung disetorkan kepada pemerintah kab/kota melalui sistem (by sistem). 3. Sudah dilakukan skenario opsen pajak telah ditetapkan 66% (sesuai dengan peraturan pemerintah pusat). Mekanisme tersebut

No.	Komponen checklist	Status Progres	Target Implementasi	Tantangan	Strategi Implementasi
				4. Masih perlunya penyesuaian dalam kesiapan terhadap sistem/infrastruktur mekanisme opsen pajak.	menyebabkan penyesuaian dalam penerapan pajak kepada wajib pajak agar pendapatan pemerintah daerah tidak mengalami penurunan. 4. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota mengenai opsen pajak mengenai pembagian hasil pajak daerah perlu dilakukan sehingga masing-masing pemda secara aktif dapat mengembangkan pendapatannya (adanya mekanisme reward and punishment).
3.	Skenario Perluasan Basis Pajak Daerah	Sampai dengan bulan 17 Maret 2023 masih berada dalam pembahasan di anggota dewan (DPRD).	Sesuai aturan paling lambat 1 Januari 2024, dikecualikan untuk: 1. PKB dan BBNKB beserta opsen berlaku paling lambat 1 Januari 2025 atau 3 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. 2. Pada saat Raperda ditetapkan untuk Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA).	1. Perluasan basis pajak daerah (jenis pajak) dibatasi oleh Undang-Undang yang mengatur. 2. Database objek yang dapat dikenakan pajak yang ada di seluruh Kalbar kurang update. 3. Penguatan peran petugas pajak daerah (kapasitas dan kompetensi) masih perlu ditingkatkan.	1. Perlunya koordinasi dengan dinas terkait untuk perbaikan database dan pengecekan lapangan perlu dilakukan untuk pendataan ulang aset yang dikenakan pajak seperti alat berat. 2. Perlunya peningkatan kapabilitas (kapasitas dan kompetensi) pemungut pajak daerah (kerja sama dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan).E5
4.	Skenario Penyederhanaan Retribusi Daerah	Sampai dengan bulan 17 Maret 2023 masih berada dalam pembahasan di anggota dewan (DPRD).	Sesuai aturan paling lambat 1 Januari 2024, dikecualikan untuk: 1. PKB dan BBNKB beserta opsen berlaku paling lambat 1 Januari 2025 atau 3 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. 2. Pada saat Raperda ditetapkan untuk Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA).	1. Hilangnya jenis Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan, dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair karena tidak tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD) terbaru. 2. Berdasarkan Undang-Undang HKPD, Objek Pajak juga turut dibatasi	Penyesuaian dengan Undang- Undang baru yang berlaku.



No.	Komponen checklist	Status Progres	Target Implementasi	Tantangan	Strategi Implementasi
				sehingga tidak fleksibel dalam penerapannya.	
5.	Isu Strategis Lainnya terkait penguatan <i>Local Taxing Power</i>	Sampai dengan bulan 17 Maret 2023 masih berada dalam pembahasan di anggota dewan (DPRD).	Sesuai aturan paling lambat 1 Januari 2024, dikecualikan untuk: 1. PKB dan BBNKB beserta opsen berlaku paling lambat 1 Januari 2025 atau 3 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. 2. Pada saat Raperda ditetapkan untuk Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA).	Kompetensi petugas pajak daerah pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota belum cukup sehingga masih mengalami kesulitan dalam melakukan pemungutan pajak daerah.	1. Perlu adanya penambahan opsen pajak untuk kabupaten/kota maupun Pemprov. 2. Daerah diberikan ruang untuk mengusulkan pengembangan jenis retribusi daerah khususnya terkait dengan ciri khas lokal daerah. Contoh: Arwana Merah di Kapuas Hulu. Apakah karna sudah diambil pajaknya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, retribusi tidak dapat ditarik oleh Pemerintah Daerah, sementara yang diperjualbelikan di pasar merupakan Arwana Merah hasil budidaya dari daerah itu sendiri. 3. Kolaborasi untuk meningkatkan pajak daerah melalui fasilitasi sharing data maupun sharing knowledge antara petugas pajak pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah sehingga saling menguntungkan kedua belah pihak.

Sumber: Audiensi dengan BKAD Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 4.2.

Reviu Kesiapan Daerah dalam Penguatan
Local Taxing Power pada Pemerintah Kota Singkawang

No.	Komponen Check List	Status Progress	Target Implementasi	Tantangan	Strategi Implementasi
1.	Raperda PDRD sesuai dengan UU HKPD	Sudah disahkan pada tanggal 28 Juli 2023 bersama DPRD, saat ini sedang dalam tahap evaluasi oleh Pemerintah Provinsi. Sudah dilakukan harmonisasi dengan Kanwil Kemenkumham Kalbar.	5 Januari 2024, PKB dan Opsen 1 Januari 2025.	1. Kekurangan data potensi retribusi dan pajak daerah; 2. Terdapat perbedaan pendapat dalam penetapan tarif;	1. Telah dilakukan koordinasi terkait penyesuaian NJOP (terutama pada lokasi-lokasi dengan aktivitas ekonomi yang tinggi) bekerja sama dengan Untan (Fakultas Ekonomi); 2. Telah dilakukan kerja sama dengan perbankan agar pembayaran dapat dilakukan melalui indomaret untuk mempermudah transaksi pajak oleh WP, selain itu ada layanan "jemput pajak daerah" di daerah kelurahan yang jaraknya jauh ke pusat kota (lapangan kerja perkebunan) dengan mobil sesuai dengan jadwal.
2.	Skenario Oспен Pajak Daerah dan Dampaknya terhadap PAD APBD Provisi dan Kabupaten/Kota	Sudah disahkan pada tanggal 28 Juli 2023 bersama DPRD, saat ini sedang dalam tahap evaluasi oleh Pemerintah Provinsi. Sudah dilakukan harmonisasi dengan Kanwil Kemenkumham Kalbar.	5 Januari 2024, PKB dan Opsen 1 Januari 2025.	1. Skill SDM terkait operasional sistem aplikasi penerimaan opsen; 2. Kendala anggaran untuk pelaksanaan kerja sama.	1. Adanya kerja sama dengan Samsat terkait penerimaan opsen (sistem dan SDM); 2. Koordinasi secara intens dengan Pemprov Kalbar; 3. Sosialisasi baik melalui media spanduk maupun media sosial terkait himbauan untuk bayar pajak.
3.	Skenario Perluasan Basis Pajak Daerah	Sudah disahkan pada tanggal 28 Juli 2023 bersama DPRD, saat ini sedang dalam tahap evaluasi oleh Pemerintah Provinsi. Sudah dilakukan harmonisasi dengan Kanwil Kemenkumham Kalbar.	5 Januari 2024, PKB dan Opsen 1 Januari 2025.	1. Terdapat potensi perluasan retribusi, namun jumlah SDM belum cukup untuk melaksanakan; 2. Pemanfaatan aset daerah masih dengan status retribusi sehingga PAD tidak maksimal seperti status pemanfaatan sewa aset BMD;	1. Akan dilakukan pembahasan dan dituangkan kedalam Perwako terkait pemanfaatan BMD; 2. Sedang dilakukan proses pencatatan aset agar dasar kepemilikan jelas; 3. Akan dilakukan perluasan penarikan pajak untuk pengusaha UMKM dengan omzet lebih dari 2jt/bulan; 4. Dilakukan pelatihan juru sita kerja sama



No.	Komponen Check List	Status Progress	Target Implementasi	Tantangan	Strategi Implementasi
				3. Karena Kota Singkawang merupakan hasil pemekaran, banyak aset daerah yang dasarnya kepemilikannya tidak kuat.	dgn BPSDM Pemprov; 5. Sudah ada MoU dengan KPP Pratama Singkawang untuk dilakukan pelaporan potensi pajak sebagai tinjau MoU; 6. Sudah ada MoU dengan Bea Cukai terkait dengan pemungutan cukai di daerah Kota Singkawang
4.	Skenario Penyederhanaan Retribusi Daerah	Sudah disahkan pada tanggal 28 Juli 2023 bersama DPRD, saat ini sedang dalam tahap evaluasi oleh Pemerintah Provinsi. Sudah dilakukan harmonisasi dengan Kanwil Kemenkumham Kalbar.	5 Januari 2024, PKB dan Opsen 1 Januari 2025.	Terdapat beberapa jasa misal jasa retribusi sedot wc yang jasa nya masih ada namun tidak bisa dilakukan pemungutan.	Diusulkan menjadi pemanfaatan aset, retribusi dihapus.
5.	Isu Strategis Lainnya terkait penguatan <i>Local Taxing Power</i>	Sudah disahkan pada tanggal 28 Juli 2023 bersama DPRD, saat ini sedang dalam tahap evaluasi oleh Pemerintah Provinsi. Sudah dilakukan harmonisasi dengan Kanwil Kemenkumham Kalbar.	5 Januari 2024, PKB dan Opsen 1 Januari 2025.	Sedang dilakukan pemutakhiran database pajak daerah, selama ini hanya di komputer saja sehingga tidak fleksibel.	1. Sudah diberikan anggaran belanja modal untuk dibelikan server baru untuk database pajak daerah, rencana akan di migrasi berbasis web; 2. Sudah dibentuk OPD baru agar Pendapatan Daerah maksimal

Sumber: Audiensi dengan BKD Kota Singkawang

Tabel 4.3.
Reviu Kesiapan Daerah dalam Penguatan
Local Taxing Power pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang

No.	Komponen Check List	Status Progress	Target Implementasi	Tantangan	Strategi Implementasi
1.	Raperda PDRD sesuai dengan UU HKPD	Sedang dilakukan pembahasan sejak Bulan Desember, juga diundang SKPD terkait. Saat ini sedang proses di bagian Hukum sebelum dibahas dengan DPRD. Apabila sudah selesai, akan disusun Perkada.	Awal September 2023 Perda sudah selesai.	Harus ada studi banding sehingga diperlukan waktu lebih lama oleh DPRD didampingi oleh SKPD teknis terkait. Setelah itu disesuaikan dengan kondisi di daerah sesuai dengan UU. Baru bisa dilaksanakan kalau sudah ada Perkada.	Selain berupa surat, akan dilakukan komunikasi personal untuk mempercepat proses penetapan Perda. Dilakukan ttd kepala daerah se-Kalbar terkait dengan komitmen bersama terkait penyelesaian Perda.

No.	Komponen Check List	Status Progress	Target Implementasi	Tantangan	Strategi Implementasi
2.	Skenario Oopen Pajak Daerah dan Dampaknya terhadap PAD APBD Provisi dan Kabupaten/Kota	Selain berupa surat, akan dilakukan komunikasi personal untuk mempercepat proses penetapan Perda. Dilakukan ttd kepala daerah se-Kalbar terkait dengan komitmen bersama terkait penyelesaian Perda.	Sebelum 1 Januari 2025.	Sistem dan SDM belum siap. Perlu dilakukan koordinasi dengan Dinas terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar membayar pajak.	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi dengan Pemprov terkait dengan opsen pajak; Penerimaan Oopen Pajak akan langsung diterima oleh Pemda melalui sistem.
3.	Skenario Perluasan Basis Pajak Daerah	Banyak pekerja asing yang bekerja di Bengkayang, akan digali potensi retribusi baru untuk Kab. Bengkayang.	Sebelum 1 Januari 2025.	Data terkait tenaga asing masih belum valid.	Koordinasi dengan dinas terkait untuk validasi data tenaga kerja asing;
4.	Skenario Penyederhanaan Retribusi Daerah	Sedang dilakukan pembahasan dengan DPRD.	Sebelum 1 Januari 2025.	Sejak 2017 RSUD Bengkayang sudah menjadi BLUD, dengan terbitnya UU HKPD, Penerimaan BLUD harus menjadi retribusi sehingga pihak BLUD merasa keberatan. Di Bengkayang sendiri terdapat 18 BLUD dengan rincian 17 Puskesmas, dan 1 Rumah Sakit.	Akan dikomunikasikan dengan pihak BLUD bahwa yang diakui sebagai retribusi hanya pencatatan saja.
5.	Isu Strategis Lainnya terkait penguatan <i>Local Taxing Power</i>	Sedang dilakukan pembahasan retribusi penggunaan alat berat di Bengkayang.	Sebelum 1 Januari 2025.	<ol style="list-style-type: none"> Kapasitas SDM terkait pajak daerah perlu ditingkatkan; Kesulitan memungut pajak penerangan jalan karena data dari PLN tidak valid; 	Peningkatan <i>skill</i> SDM melalui pelatihan dan peningkatan validitas data pajak daerah.

Sumber: Audiensi dengan BPKAD Kabupaten Bengkayang

Berdasarkan tabel di atas, komponen-komponen *checklist* kesiapan daerah dalam penguatan *local taxing power* masih dalam progres pembahasan di DPRD. Setiap komponen memiliki tantangan dan strategi implementasi masing-masing sesuai dengan kondisinya.

Sesuai dengan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dengan *Local Expert* Regional Kalimantan Barat yang dilakukan pada 28 Agustus 2023, UU HKPD memang harus segera diterapkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus segera menetapkan peraturan turunan UU HKPD tentang aturan Pajak Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah harus melakukan analisis mendalam terkait dengan opsen pajak dan melakukan identifikasi terhadap jenis-jenis pajak yang akan mengalami penurunan untuk kemudian dicari solusi atau substitusinya.



Fenomena yang terjadi di daerah adalah ketika kemandirian fiskal tinggi maka akan diikuti oleh ketergantungan fiskal yang rendah. Hal ini terjadi di Provinsi Kalimantan Barat dimana kemandirian fiskal yang semakin tinggi diikuti ketergantungan semakin rendah, sementara untuk konsolidasi Kabupaten/Kota di lingkup Kalimantan Barat justru sebaliknya, kemandirian fiskal semakin rendah dan ketergantungan fiskal semakin tinggi. Pendekatan yang digunakan dalam peningkatan *Local Taxing Power* (LTP) bertumpu pada kondisi riil masyarakat di lapangan, Pemerintah tidak akan dapat menaikkan LTP apabila tidak diikuti oleh kemauan untuk membayar pajak dari masyarakat.

Pada kasus Kalimantan Barat, salah satu penyebab rendahnya pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) juga disebabkan karena basis penerimaan pajak yang sedikit, hanya sekitar 40% dari basis penerimaan yang tersedia. Bahkan pada beberapa Kabupaten/Kota, salah satu penyumbang terbesar dari PAD justru bukan dari PDRD melainkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPADyS), sebagai contoh Kabupaten Mempawah, Landak, Sambas, Bengkayang, dimana LLPADyS yang ada hampir mendekati 63%.

Penyebab lain dari rendahnya penerimaan dari PDRD di daerah adalah tren penurunan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kalbar akibat masih banyaknya objek yang berada di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang sebesar Rp10 juta sehingga tidak bisa dikenakan pajak. Selain mengatur kembali NJOP sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan, pemerintah juga perlu melakukan ekstensifikasi perpajakan. Namun ekstensifikasi pajak daerah sendiri memerlukan upaya aktif dari Pemerintah Daerah serta seluruh perangkat kerjanya. Ekstensifikasi dilakukan dalam rangka mengupayakan pengawasan kepada wajib pajak yang sudah melengkapi syarat sebagai subjektif dan objektif tetapi belum mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Selain fokus pada aturan objek pajak, pada sisi regulasi Perda turunan dari UU HKPD tentang aturan Pajak Daerah juga harus memperhatikan daerah yang sebelumnya memiliki potensi PKB rendah agar tidak mendapatkan opsen yang rendah. Perlu juga ditinjau ulang terkait pengalihan beberapa jenis retribusi dari 36 jenis menjadi 12 jenis pada retribusi pelayanan kesehatan.

UU HKPD didesain untuk melakukan upaya reformasi menyeluruh tidak hanya dari sisi *fiscal resource allocation*, namun juga memperkuat belanja daerah agar lebih efisien, fokus, dan sinergis dengan pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pada sisi pendapatan, UU HKPD memberikan penguatan sistem pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) melalui restrukturisasi dan konsolidasi jenis PDRD, sumber pajak daerah baru, dan penyederhanaan jenis retribusi daerah.

Pada sisi belanja, UU HKPD mengatur penguatan perencanaan belanja daerah melalui penganggaran belanja daerah, simplifikasi dan sinkronisasi program prioritas daerah dengan prioritas nasional, serta penyusunan anggaran yang berdasarkan standar harga. Penguatan disiplin belanja daerah dan pengendalian belanja juga dilakukan melalui pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dan belanja infrastruktur minimal 40% dari APBD. Pengaturan ini sebagai wujud *aggregate fiscal*



control untuk menjaga efektivitas dan kesinambungan sumber daya fiskal nasional, namun dengan tetap memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menentukan eksekusi belanjanya. Upaya penguatan juga dilakukan melalui peningkatan kualitas penganggaran belanja daerah, peningkatan kualitas pengalokasian belanja daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengawasan internal.

Selain penguatan pada belanja, perlu juga dilakukan pemanfaatan transfer ke daerah dan dana desa yang belum optimal karena sebagian besar dana alokasi umum (DAU) digunakan untuk belanja pegawai dan ketergantungan daerah terhadap dana alokasi khusus (DAK) sebagai salah satu sumber belanja modal. DAK dinilai lebih mendorong perekonomian dibandingkan DAU, maka untuk Pemerintah Daerah yang tata kelola pemerintahnya masih perlu ditingkatkan bisa diberikan opsi untuk memindahkan alokasi DAU ke alokasi DAK.



KFR
Triwulan II-2023



BAB V

Kesimpulan & Rekomendasi

BAB V

Kesimpulan & Rekomendasi



5.1. Kesimpulan

Analisis Ekonomi Makro Regional

1. Ekonomi Indonesia dan Kalimantan Barat masih tumbuh konsisten di atas 4% hingga Triwulan II-2023, hal ini menandakan ketahanan dan prospek ekonomi tetap baik. Ekonomi Kalimantan Barat triwulan II-2023 terhadap triwulan I-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 1,59% (q-to-q), serta mengalami pertumbuhan 4,00% (year-on-year), dan 4,32% (secara kumulatif).
2. Perekonomian Kalimantan Barat berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) triwulan II-2023 mencapai Rp67.857,24 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp38.387,99 miliar.
3. Secara triwulanan, struktur PDRB triwulan II-2023 menurut lapangan usaha 74,69% perekonomian Provinsi Kalimantan Barat dikuasai oleh 6 sektor lapangan usaha, yaitu Pertanian, Industri, Perdagangan, Konstruksi, dan Administrasi Pemerintahan, dan Pertambangan.
4. Nilai neraca perdagangan Kalimantan Barat Juni 2023 surplus US \$163,33 juta, sedangkan secara kumulatif Januari - Juni 2023 juga surplus US \$776,49 juta. Neraca perdagangan Juni 2023 dibandingkan terhadap Mei 2023, naik 101,05 persen.
5. Berdasarkan hasil pemantauan BPS gabungan 3 kota IHK di Kalimantan Barat pada Juni 2023 terjadi inflasi year-on-year sebesar 4,10% atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 116,14 pada Mei 2022 menjadi 116,45 pada Juni 2023. Tingkat inflasi month to month (mtm) dan tingkat inflasi year to date (ytd) Juni 2023 sebesar 0,27 persen dan 1,46 persen.
6. Penyumbang utama inflasi bulanan di antaranya adalah komoditas daging ayam ras, bawang putih, dan cabai rawit dengan andil masing-masing sebesar 0,1662%; 0,0661%, dan 0,0482%. Penyumbang utama inflasi tahunan di antaranya adalah komoditas bensin, rokok kretek filter, dan beras dengan andil masing-masing sebesar 1,0264%; 0,4030%; dan 0,2526%.
7. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 6,71%, turun 0,10% poin terhadap September 2022 dan menurun 0,02% poin terhadap Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 353,35 ribu orang, turun 3,2 ribu orang terhadap September 2022 dan meningkat 3,1 ribu orang terhadap Maret 2022.
8. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Barat yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,321. Angka ini naik 0,01 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* September 2022 yang sebesar 0,311 dan naik 0,007 poin dibandingkan dengan *Gini Ratio* Maret 2022 yang sebesar 0,314.



9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalbar pada Februari 2023 sebesar 4,52%. Jumlah angkatan kerja menurun sebanyak 5,55 ribu orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 4,6 ribu orang, sementara pengangguran turun sebanyak 10,14 ribu orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Februari 2023 sebesar 68,45 persen, turun 1,29 persen poin dibanding Februari 2022.
10. Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat Juni 2023 sebesar 133,10 poin atau turun 2,92% dibanding Mei 2023 (137,11). Capaian NTP Kalimantan Barat yang berada jauh di atas 100 ini bisa dikatakan sangat tinggi bahkan tertinggi di antara regional Kalimantan dan secara Nasional. Sementara NTN yang dihitung dari nilai tukar di sektor perikanan saja (Subsektor Perikanan Tangkap dan Subsektor Perikanan Budidaya) mengalami kenaikan sebesar 0,07% dari yang semula 101,28 (Mei 2023) menjadi 101,35 pada Juni 2023.

Analisis Fiskal Regional

1. Pada APBN Kalimantan Barat TA 2023, target pendapatan yang ditetapkan adalah sebesar Rp12.082,96 miliar dan Pagu Belanja sebesar Rp30.835,76 miliar, sehingga terdapat rencana defisit sebesar Rp18.752,80 miliar.
2. Realisasi pendapatan negara pada APBN Kalimantan Barat sampai dengan akhir Juni atau Triwulan II 2023 mengalami kontraksi yang sebesar 19,75% dengan realisasi sebesar Rp5.636,16 miliar dari total target pendapatan atau sebesar 46,65% dari target pendapatan negara. Seluruh pos penerimaan mengalami kontraksi kecuali pada Cukai, Pajak Lainnya, dan PNBPN.
3. Pada sisi Belanja Negara, tercatat pertumbuhan positif sebesar 2,22% dengan realisasi sebesar Rp13.216,48 miliar dari total pagu belanja atau sekitar 42,86%. Belanja ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp4.514,53 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp8.701,95 miliar. Seluruh pos belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan serapan (yoy), sedangkan TKDD mengalami kontraksi kecuali pada DBH dan DAK Fisik.
4. Target pendapatan daerah dalam APBD Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp25.988,89 miliar dan Pagu Belanja sebesar Rp26.905,36 miliar, sehingga terdapat rencana defisit sebesar Rp916,47 miliar, dengan pembiayaan sebesar Rp899,45 miliar dan SiKPA sebesar Rp17,02 miliar.
5. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, realisasi pendapatan daerah dalam APBD Kalbar menunjukkan pencapaian sebesar Rp8.558,01 miliar, masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 74,58% dari total pendapatan. Pada sisi belanja, realisasi s.d. 30 Juni 2023 sebesar Rp6.817,60 miliar atau baru sebesar 25,34%. Dengan kondisi ini, maka APBD Kalbar masih surplus sebesar Rp1.740,41 miliar.
6. Berdasarkan perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal atas realisasi APBD Kalbar Triwulan II Tahun 2023, diperoleh hasil bahwa Kalbar termasuk kedalam golongan “sedang” dengan Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar 25,32%, sementara untuk Rasio Derajat Ketergantungan Kalbar termasuk ke dalam kategori Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah yang “sangat tinggi” dengan nilai ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat sebesar 74,58%. Dan untuk Rasio Kemandirian Fiskal, diperoleh hasil bahwa Pola Hubungan dan Tingkat

Kemampuan Daerah Kalbar masih rendah dengan perolehan angka kemampuan keuangan sebesar 33,95% atau termasuk ke dalam kategori pola hubungan “Konsultatif”.

7. Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2023 menunjukkan total jumlah aset sebesar Rp101.088,04 miliar, kewajiban sebesar Rp606,59 miliar dan ekuitas sebesar Rp100.120,76 miliar. Pada sisi kewajiban, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang mengalami pertumbuhan negatif yaitu turun sebesar 6,09% pada jumlah kewajiban jangka pendek. Sementara pada sisi Ekuitas, LKPP-TW Triwulan II 2023 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (*year on year*) tumbuh negatif sebesar 0,93%.

Pengembangan Ekonomi Regional

1. Berdasarkan analisis sektor unggulan dan sektor potensial dengan menggunakan metode LQ, *Shift Share*, Tipologi *Klassen* serta Model I-O. Dari analisis tersebut, dipilih sektor unggulan yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan salah satu sektor potensial yaitu sektor informasi dan komunikasi untuk dianalisis lebih lanjut terkait potensi pengembangannya.
2. Selama sepuluh tahun terakhir (2013-Juni 2023) struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Barat didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu; sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, pertambangan dan penggalian.
3. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kalimantan Barat pada tahun 2022 masih dihasilkan oleh sektor primer, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 21,10 persen. Dengan demikian, pada analisis ini akan difokuskan pada salah satu sektor unggulan, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sedangkan untuk salah satu sektor potensial yaitu sektor informasi dan komunikasi yang mengalami trend kenaikan dari tahun ke tahun.
4. Berdasarkan perhitungan alokasi APBN yang berkaitan dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, terdapat alokasi sebesar Rp785.958.790.000 atau 1,29% dari pagu sebesar Rp60.794.177.836.000. Pada APBN, realisasi Fungsi Ekonomi sebesar Rp110.806.812.680 sedangkan pada APBD, realisasi Fungsi Ekonomi sebesar Rp135.060.061.199. Demikian halnya untuk mendukung sektor informasi dan komunikasi pada APBN, realisasi Fungsi Ekonomi sebesar Rp110.806.812.680 sedangkan pada APBD, realisasi Fungsi Ekonomi sebesar Rp135.060.061.199.
5. Penguatan pada sektor informasi dan komunikasi terus diupayakan Pemerintah dengan meningkatkan infrastruktur TIK, sehingga peran APBN dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pada beberapa sektor untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengurangi ketimpangan dapat terwujud.
6. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022 menunjukan Provinsi Kalimantan Barat memperoleh Indeks Literasi Keuangan sebesar 51,95% diatas rata-rata nasional sebesar 49,68% dan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 84,16% dibawah rata-rata nasional sebesar 85,10%.



Hasil survei ini menunjukkan banyak penduduk Kalimantan Barat yang sudah mengakses fasilitas perbankan tetapi kekurangan pengetahuan mengenai keuangan (literasi keuangan).

Analisis Tematik

1. Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya meramu kebijakan fiskal untuk dapat meningkatkan kesejahteraan salah satunya melalui terbitnya UU HKPD yang memungkinkan adanya *Local Taxing Power*. Salah satu kontribusi pengawalan implementasi UU HKPD adalah penguatan *Local Taxing Power* untuk meningkatkan kemandirian daerah dan optimalisasi PAD.
2. Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat.
3. Realisasi PAD Pemerintah Provinsi sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp1.314,05 miliar sedangkan realisasi PAD Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp852,97 miliar.
4. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat termasuk kategori Menuju Kemandirian. Sedangkan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat termasuk dalam kategori Belum Mandiri.
5. Tumbuhnya perekonomian memberikan dampak positif pada penerimaan Pemerintah Daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah. Pada tahun 2022, realisasi jenis pajak dan retribusi Pemerintah Provinsi naik sebesar 24,71% dengan realisasi Rp2.686,22 miliar sedangkan, realisasi jenis pajak dan retribusi Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota naik sebesar 13,10% dengan realisasi Rp1.084,23 milyar.
6. *Local taxing ratio* Pemerintah Provinsi Kalbar paling tinggi pada tahun 2022 sebesar 1,22%; sedangkan *local taxing ratio* Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota paling tinggi pada tahun 2022 sebesar 1,08%. Semakin tinggi nilai *local taxing ratio*, semakin besar penerimaan pajak dan semakin leluasa pemerintah membiayai penerimaannya.
7. Untuk melihat kesiapan daerah dalam penguatan *Local Taxing Power*, selain Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang dipilih untuk mewakili sampel kabupaten sedangkan Kota Singkawang dipilih sebagai sampel untuk daerah kota.
8. Raperda PDRD Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan UU HKPD masih dalam pembahasan DPRD. Raperda PDRD Kota Singkawang sudah disahkan pada 28 Juli 2023 dan sedang dalam tahap evaluasi oleh Pemerintah Provinsi serta sudah dilakukan harmonisasi dengan Kanwil Kemkumham Kalbar. Raperda PDRD Kabupaten Bengkayang sedang dalam tahap pembahasan dan targetnya pada awal September 2023 Perda sudah selesai.
9. Implementasi Perda PDRD masing-masing pemerintah daerah ditargetkan sebelum 1 Januari 2024.
10. Kemandirian fiskal Pemerintah Provinsi Kalbar semakin tinggi diikuti ketergantungan yang semakin rendah, sementara untuk konsolidasi Kabupaten/Kota di lingkup Kalimantan Barat justru sebaliknya.

11. Penyebab rendahnya pungutan PDRD disebabkan karena basis penerimaan pajak yang sedikit, hanya sekitar 40% dari basis penerimaan yang tersedia. Penyebab lainnya adalah tren penurunan dari BPHBTB di Kalbar akibat masih banyaknya objek yang berada di bawah NJOP yang sebesar Rp10 juta sehingga tidak bisa dikenakan pajak.
12. UU HKPD memberikan penguatan sistem pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) melalui restrukturisasi dan konsolidasi jenis PDRD, sumber pajak daerah baru, dan penyederhanaan jenis retribusi daerah pada sisi pendapatan.
13. Pada sisi belanja, UU HKPD mengatur penguatan perencanaan belanja daerah melalui penganggaran belanja daerah, simplifikasi dan sinkronisasi program prioritas daerah dengan prioritas nasional, serta penyusunan anggaran yang berdasarkan standar harga.
14. Perlunya pemanfaatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang belum optimal karena sebagian besar DAU digunakan untuk belanja pegawai dan ketergantungan daerah terhadap DAK sebagai salah satu sumber belanja modal.

5.2. Rekomendasi

Terkait Ekonomi dan Fiskal Regional

1. Rendahnya realisasi Belanja APBD mengindikasikan perlunya langkah-langkah strategis untuk akselerasi penyerapan APBD yang optimal sampai dengan akhir tahun 2023. Tingginya SiLPA mencerminkan perencanaan yang kurang akurat atau bahkan masih adanya *idle cash* karena penyerapan yang belum optimal. Manajemen kas yang lebih efektif dapat memberikan solusi terhadap tingginya SiLPA di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak di antaranya identifikasi dan penggalian potensi Wajib Pajak sektor pertambangan, optimalisasi penggalian potensi pajak, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Bendahara Pemerintah Pusat maupun Daerah, dan salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan adanya regulasi untuk melakukan Rekonsiliasi penerimaan pajak antara DJP dengan pemerintah daerah.
3. Pemerintah dapat memberikan dukungan anggaran melalui sisi penerimaan negara, yaitu dengan mendorong terjadinya perubahan basis penerimaan yang berasal dari sumber daya alam khususnya dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menuju industrialisasi yang menciptakan barang jadi atau setengah jadi dan meningkatkan penerimaan negara. Langkah strategis lainnya yang bisa dilakukan adalah dengan cara memperluas basis pajak dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
4. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah diperlukan penyesuaian dengan Undang- Undang baru yang berlaku akibat hilangnya jenis Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan, dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair karena tidak lagi tercantum dalam UU HKPD. Selain itu diperlukan kolaborasi untuk meningkatkan pajak daerah melalui fasilitasi *sharing data* maupun *sharing knowledge* antara petugas pajak pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, serta perlunya peningkatan kapabilitas (kapasitas dan kompetensi) pemungut pajak daerah (kerja sama dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan).



5. Melalui sisi belanja negara, pemerintah dapat mengarahkan kepada belanja yang dapat meningkatkan produktivitas serta diarahkan untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki daya beli yang baik. Misalnya dari pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga yang menangani bidang pertanian atau melalui TKDD dengan memberikan alokasi pada DAK Fisik khususnya pada bidang pertanian.
6. Pada sisi pembiayaan, dapat diarahkan agar pembiayaan pemerintah memberi dampak positif bagi perekonomian, misalnya melalui utang yang diarahkan untuk pembiayaan produktif seperti pembiayaan infrastruktur yang dapat menunjang mobilisasi sumber daya pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
7. Dalam rangka penanggungan inflasi, diperlukan langkah-langkah penanganan yang tidak hanya dilakukan pada daerah penghitung inflasi, namun dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Strategi pengendalian jangka menengah/panjang perlu terus dilakukan terus diinisiasikan oleh Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) serta perlu peningkatan ketahanan pangan daerah.
8. Untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat yang membutuhkan program Pembiayaan Ultra Mikro perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif dan informasi yang dapat disebarluaskan ke masyarakat dalam rangka membantu masyarakat lapis bawah yang memerlukan pembiayaan sebagai modal usaha. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) memerlukan peran serta dari pemerintah daerah (Dinas UMKM) dan lembaga penyalur dan juga partisipasi masyarakat.

Pengembangan Ekonomi Regional

1. Kegiatan investasi agar diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan kelautan, industri pengolahan, dan industri manufaktur.
2. Beberapa kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap industri pertanian di Kalimantan Barat antara lain, program pengembangan desa dan pembangunan infrastruktur pertanian, peningkatan kualitas produk pertanian melalui bantuan teknologi dan pendidikan pertanian, serta program bantuan modal dan subsidi harga pupuk.
3. Pemerintah perlu memberikan upaya untuk menjaga nilai NTP agar tetap stabil di atas 100 poin. Pemerintah Daerah perlu memberikan himbauan kepada para petani tanaman pangan di Kalbar untuk dapat menanam tanaman pangan sesuai dengan perkiraan data cuaca.
4. Pemerintah Daerah dapat mendorong percepatan penanaman padi pada musim hujan karena ketersediaan air masih sangat cukup serta curah hujan masih merata dan sedang. Petani diharapkan bisa menyikapi datangnya kondisi baik iklim kering maupun basah. Diharapkan kepada seluruh petani dan penyuluh pertanian di jajaran pemerintah daerah sudah mempersiapkan strategi dalam rangka menjaga ketersediaan air. Selain itu, diperlukan adanya perbaikan perlakuan dan peningkatan teknologi budidaya tanaman. Diperlukan juga adanya jaminan produk pertanian lahan rawa untuk dapat dipasarkan dengan mudah oleh petani.

5. Selain Pemerintah, Perbankan yang merupakan BUMN selaku penyalur KUR perlu tetap melakukan usaha untuk meningkatkan penyaluran KUR. pemerintah daerah dapat membentuk BUMD yang bergerak di bidang penyewaan alat dan mesin pertanian. Pemerintah Daerah juga dapat menjadi jembatan agar UMKM dapat berkolaborasi dengan para petani tanaman pangan.
6. Perlu diselenggarakannya kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan melalui Edukasi Keuangan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung Literasi Keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat. Sedangkan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan mencakup perencanaan dan pelaksanaan atas: a) perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan kepada target Konsumen; b) penyediaan produk dan/atau layanan; dan/atau c) keberlangsungan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan untuk tetap dapat dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat dalam bentuk fisik atau digital.

Analisis Tematik

1. Selain melalui intervensi secara langsung dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, terdapat beberapa hal yang termasuk dalam *beyond* pajak dan tidak bisa diintervensi, salah satunya yaitu *trust* atau kepercayaan publik. Untuk meningkatkan hal tersebut pemerintah dalam melakukan beberapa hal diantaranya melalui *enforcement* (regulasi yang jelas), memberikan kemudahan membayar pajak, upaya pemberantasan korupsi, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Untuk mengoptimalkan penerimaan perlu diatur kembali NJOP, selain itu perlu dilakukan ekstensifikasi perpajakan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah beserta seluruh perangkat kerjanya dalam rangka mengupayakan pengawasan kepada wajib pajak yang sudah melengkapi syarat sebagai subjektif dan objektif tetapi belum mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak.
3. Selain fokus pada aturan objek pajak, pada sisi regulasi Perda turunan dari UU HKPD tentang aturan Pajak Daerah juga harus memperhatikan daerah yang sebelumnya memiliki potensi PKB rendah agar tidak mendapatkan opsen yang rendah.
4. Perlu peninjauan ulang terkait pengalihan beberapa jenis retribusi dari 36 jenis menjadi 12 jenis pada retribusi pelayanan kesehatan.
5. Pemanfaatan transfer ke daerah dan dana desa yang belum optimal karena sebagian besar dana alokasi umum (DAU) digunakan untuk belanja pegawai dan ketergantungan daerah terhadap dana alokasi khusus (DAK) sebagai salah satu sumber belanja modal. DAK dinilai lebih mendorong perekonomian dibandingkan DAU, maka untuk pemerintah daerah yang tata kelola pemerintahnya masih perlu ditingkatkan bisa diberikan opsi untuk memindahkan alokasi DAU ke alokasi DAK.



DAFTAR PUSTAKA



- Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 2023. "Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2023", Jakarta (tidak dipublikasikan).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. 2023. *Berita Resmi Statistik*. Pontianak: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2023. *Berita Resmi Statistik*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas. 2019. "Kelautan dan Perikanan", <http://dpmpstsp.sambas.go.id/index.php/peluang-investasi/2015-12-01-03-10-13/2015-12-01-04-32-04>, diakses pada 29 Agustus 2023 pukul 10.28.
- Hikmatullah, dkk. 2008. "Potensi Sumberdaya Lahan Untuk Pengembangan Komoditas Pertanian di Provinsi Kalimantan Barat". Bogor: Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian.
- Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Barat. 2023. *GFS Preliminary Kantor Wilayah Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2023*. Pontianak: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat. 2023. *Data dan Realisasi Penerimaan Bea Cukai di Provinsi Kalimantan Barat s.d. Triwulan II Tahun 2023*. Pontianak: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
- Kanwil DJP Kalimantan Barat. 2023. *Data dan Realisasi Perpajakan di Provinsi Kalimantan Barat s.d. Triwulan II Tahun 2023*. Pontianak: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Lingkup Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Kalimantan Barat.
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kementerian Keuangan.
- Mansuri. 2016. "Analisis Regresi Linier Berganda Menggunakan Eviews, *Workshop Ekonometrika*". Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur.
- OECD. 2024. "Tax Revenue Trends 1990-2012, Revenue Statistics in Asian Countries 2014: Trends in Indonesia and Malaysia", OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. "Potensi Pertumbuhan Ekonomi ditinjau dari Penyaluran Kredit Perbankan kepada Sektor Prioritas Ekonomi Pemerintah", <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Potensi-Pertumbuhan-Ekonomi-ditinjau-dari-Penyaluran-Kredit-Perbankan-Kepada-Sektor-Prioritas/Kajian%20Kredit%20>



[%20Pertumbuhan%20Eko%20\(final\).pdf](#), diakses pada 30 Agustus 2023 pukul 21.08 pada 25 Agustus 2023 pukul 10.08.

Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 3 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Alat Dan Mesin Pertanian*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jakarta.

Republik Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat*. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Koordinator Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jakarta.

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 2022. "Sekda Kalbar Harapkan Inovasi Daerah Terus Digenjot", <https://kalbarprov.go.id/berita/sekda-kalbar-harapkan-inovasi-daerah-terus-digenjot.html>, diakses 25 Agustus 2023 pukul 14.46.

Sekretariat Jenderal DPR-RI. 2014. "Meningkatkan Tax Ratio Indonesia", https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Meningkatkan_Tax_Ratio_Indonesia2014_0602100259.pdf diakses 25 Agustus 2023 pukul 14.57.

Tefilah Modes, Jeberta dkk. 2021. "Analisis Sektor Unggulan di Provinsi Kalimantan Barat 1(1):33-45". Pontianak: Forum Analisis Statistik Juni 2021.

A nighttime photograph of a waterfront promenade. In the foreground, there are lush green trees and a paved walkway. In the middle ground, a Ferris wheel is visible on the left, and a large, multi-decked boat is docked on the right. The water reflects the lights from the Ferris wheel and the boat. The sky is dark blue, and the overall scene is illuminated by warm, golden lights.

LAMPIRAN



LAMPIRAN



Capaian Output Bidang Pendidikan Triwulan II Tahun 2023

NAMA KEMENTERIAN - PRIORITAS NASIONAL - OUTPUT - SUBOUTPUT - SATUAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REAL. FISIK
KEMENTERIAN AGAMA	172.468.434.000,00	191.794.958.816,00	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	118.485.013.000,00	132.299.603.175,00	80.175
Akreditasi Lembaga	200.000.000,00	-	-
Akreditasi Prodi/lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Negeri	200.000.000,00	-	-
Lembaga	200.000.000,00	-	-
Bantuan Lembaga	3.108.400.000,00	8.577.150.000,00	725
Bantuan Pengembangan Peningkatan Mutu UKS/M	23.000.000,00	-	-
Lembaga	23.000.000,00	-	-
Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang diberikan Bantuan	862.000.000,00	2.932.800.000,00	295
Lembaga	862.000.000,00	2.932.800.000,00	295
Lembaga Pendidikan Keagamaan Hindu yang diberikan bantuan	420.000.000,00	1.290.000.000,00	-
Lembaga	420.000.000,00	1.290.000.000,00	-
Lembaga Pendidikan Keagamaan yang diberikan bantuan	47.400.000,00	94.800.000,00	16
Lembaga	47.400.000,00	94.800.000,00	16
Lembaga POKJAWAS/KKG/MGMP Kristen Penerima Bantuan	50.000.000,00	27.000.000,00	22
Lembaga	50.000.000,00	27.000.000,00	22
Pesantren Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)	725.000.000,00	1.435.730.000,00	210
Lembaga	725.000.000,00	1.435.730.000,00	210
POKJAWAS/ KKM/ KKG/ MGMP Agama Buddha Penerima Bantuan	230.000.000,00	-	18
Lembaga	230.000.000,00	-	18
POKJAWAS/KKM/KKG/MGMP penerima bantuan	751.000.000,00	2.796.820.000,00	164
Lembaga	751.000.000,00	2.796.820.000,00	164
Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	78.145.812.000,00	95.373.017.433,00	77.015
BOP Nava Dhammasekha	33.000.000,00	17.100.000,00	270
Orang	33.000.000,00	17.100.000,00	270
Guru Agama Non PNS Penerima Insentif	804.000.000,00	412.000.000,00	381
Orang	804.000.000,00	412.000.000,00	381
Guru Agama Non PNS penerima Tunjangan Profesi	624.720.000,00	564.892.500,00	39
Orang	624.720.000,00	564.892.500,00	39
Guru Non-PNS penerima Tunjangan Profesi	30.649.622.000,00	24.275.954.800,00	4.149
Orang	30.649.622.000,00	24.275.954.800,00	4.149
Guru Pendidikan Agama Buddha Non PNS Penerima Insentif	771.000.000,00	695.250.000,00	989
Orang	771.000.000,00	695.250.000,00	989
Guru Pendidikan Agama Buddha Non PNS Penerima Tunjangan Khusus (3T)	72.000.000,00	66.000.000,00	16
Orang	72.000.000,00	66.000.000,00	16
Guru Pendidikan Agama Buddha Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	72.000.000,00	84.000.000,00	20
Orang	72.000.000,00	84.000.000,00	20
Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non PNS Penerima Insentif	675.000.000,00	543.500.000,00	676
Orang	675.000.000,00	543.500.000,00	676
Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	1.206.000.000,00	1.067.939.100,00	167
Orang	1.206.000.000,00	1.067.939.100,00	167
Guru SMAK Non PNS Penerima Insentif	180.000.000,00	53.250.000,00	130
Orang	180.000.000,00	53.250.000,00	130
Siswa MA Penerima BOS	13.031.710.000,00	23.485.658.217,00	16.101
Orang	13.031.710.000,00	23.485.658.217,00	16.101
Siswa MI Penerima BOS	10.892.860.000,00	14.897.517.318,00	18.078
Orang	10.892.860.000,00	14.897.517.318,00	18.078
Siswa MTs Penerima BOS	13.809.880.000,00	23.753.548.998,00	26.617
Orang	13.809.880.000,00	23.753.548.998,00	26.617
Siswa SDTK Penerima BOS	315.410.000,00	392.365.000,00	620
Orang	315.410.000,00	392.365.000,00	620
Siswa SDTK Penerima PIP	147.150.000,00	91.575.000,00	471
Orang	147.150.000,00	91.575.000,00	471
Siswa SMPTK Penerima BOS	352.680.000,00	407.360.000,00	610
Orang	352.680.000,00	407.360.000,00	610
Siswa SMPTK Penerima PIP	189.750.000,00	165.250.000,00	2.311
Orang	189.750.000,00	165.250.000,00	2.311
Siswa SMTK/SMAK Penerima BOS	1.183.780.000,00	1.949.275.000,00	2.713
Orang	1.183.780.000,00	1.949.275.000,00	2.713
Siswa SMTK/SMAK Penerima PIP	595.000.000,00	791.400.000,00	2.139
Orang	595.000.000,00	791.400.000,00	2.139
Tunjangan Profesi Guru PAI Non PNS	2.232.000.000,00	1.350.931.500,00	240
Orang	2.232.000.000,00	1.350.931.500,00	240
Ustadz pada Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Penerima Insentif	308.250.000,00	308.250.000,00	278
Orang	308.250.000,00	308.250.000,00	278
Bantuan Pendidikan Tinggi	10.071.000.000,00	15.093.800.000,00	33
Dosen PTK Katolik penerima Beasiswa gelar S3	375.000.000,00	300.000.000,00	8
Orang	375.000.000,00	300.000.000,00	8
Mahasiswa Penerima Bidik Misi	521.400.000,00	2.085.600.000,00	6
Orang	521.400.000,00	2.085.600.000,00	6
Mahasiswa penerima KIP Kuliah PTK Katolik	555.000.000,00	89.000.000,00	13
Orang	555.000.000,00	89.000.000,00	13
Mahasiswa PTKI Penerima KIP Kuliah	8.619.600.000,00	12.619.200.000,00	6
Orang	8.619.600.000,00	12.619.200.000,00	6
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	74.640.000,00	-	-
Lembaga Pendidikan agama dan keagamaan Hindu yang ditingkatkan mutunya	74.640.000,00	-	-
Lembaga	74.640.000,00	-	-



KAJIAN FISKAL REGIONAL

Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2023



NAMA KEMENTERIAN - PRIORITAS NASIONAL - OUTPUT - SUBOUTPUT - SATUAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REAL. FISIK
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	275.000.000,00	-	-
Santri Berprestasi	150.000.000,00	-	-
Orang	150.000.000,00	-	-
Siswa Madrasah Berprestasi	125.000.000,00	-	-
Orang	125.000.000,00	-	-
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	88.179.000,00	-	-
kurikulum dan Bahan ajar yang dikembangkan	88.179.000,00	-	-
Rekomendasi Kebijakan	88.179.000,00	-	-
Pelatihan Bidang Pendidikan	932.600.000,00	1.586.585.200,00	1.823
Guru PAI yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	100.000.000,00	42.805.200,00	2
Orang	100.000.000,00	42.805.200,00	2
Guru Pendidikan Agama Buddha yang Ditingkatkan Kompetensinya	89.100.000,00	353.600.000,00	396
Orang	89.100.000,00	353.600.000,00	396
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Buddha yang ditingkatkan Kompetensinya	97.500.000,00	191.250.000,00	415
Orang	97.500.000,00	191.250.000,00	415
Pendidik dan Tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	646.000.000,00	998.930.000,00	1.010
Orang	646.000.000,00	998.930.000,00	1.010
Pendidikan Menengah	2.072.000.000,00	3.871.925.000,00	532
Penyelenggaraan Madrasah Unggulan	2.072.000.000,00	3.871.925.000,00	532
Orang	2.072.000.000,00	3.871.925.000,00	532
Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	70.000.000,00	-	-
Madrasah yang mendapat Supervisi Pembelajaran	70.000.000,00	-	-
Lembaga	70.000.000,00	-	-
Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	22.369.017.000,00	6.258.961.069,00	20
Prasarana Madrasah Pemenuhan SPM	1.000.000.000,00	-	-
unit	1.000.000.000,00	-	-
Prasarana Madrasah yang ditingkatkan (SBSN)	21.369.017.000,00	6.258.961.069,00	20
unit	21.369.017.000,00	6.258.961.069,00	20
Sarana Bidang Pendidikan	319.620.000,00	1.267.385.000,00	26
Sarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha	319.620.000,00	1.267.385.000,00	26
Paket	319.620.000,00	1.267.385.000,00	26
Sosialisasi dan Diseminasi	85.000.000,00	82.330.000,00	-
Siswa yang mendapat pendidikan karakter dan kewarganegaraan	85.000.000,00	82.330.000,00	-
Orang	85.000.000,00	82.330.000,00	-
Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	673.745.000,00	188.449.473,00	1
Madrasah Yang Ditingkatkan Mutunya (PHLN)	673.745.000,00	188.449.473,00	1
Lembaga	673.745.000,00	188.449.473,00	1
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	53.983.421.000,00	59.495.355.641,00	186.058
Akreditasi Lembaga	75.000.000,00	25.920.000,00	-
Lembaga Zakat yang Terakreditasi	75.000.000,00	25.920.000,00	-
Lembaga	75.000.000,00	25.920.000,00	-
Bantuan Kelompok Masyarakat	170.000.000,00	56.909.600,00	25
Bantuan Sertifikasi Tanah Wakaf	170.000.000,00	56.909.600,00	25
Kelompok Masyarakat	170.000.000,00	56.909.600,00	25
Bantuan Lembaga	1.778.450.000,00	3.107.789.937,00	108
Bantuan Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha	8.300.000,00	14.940.000,00	15
Lembaga	8.300.000,00	14.940.000,00	15
Bantuan Operasional BAZNAS	60.000.000,00	60.000.000,00	-
Lembaga	60.000.000,00	60.000.000,00	-
Bantuan Operasional BWI	175.000.000,00	300.000.000,00	-
Lembaga	175.000.000,00	300.000.000,00	-
Bantuan operasional lembaga agama dan keagamaan Katolik	250.000.000,00	909.099.997,00	35
Lembaga	250.000.000,00	909.099.997,00	35
Bantuan Ormas dan Lembaga Keagamaan Islam	587.000.000,00	173.780.000,00	-
Lembaga	587.000.000,00	173.780.000,00	-
Lembaga agama dan keagamaan Hindu yang dibantu	40.000.000,00	130.000.000,00	2
Lembaga	40.000.000,00	130.000.000,00	2
Rumah ibadah Agama Hindu yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan	30.000.000,00	120.000.000,00	5
Lembaga	30.000.000,00	120.000.000,00	5
Rumah ibadah agama Islam yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan	190.000.000,00	209.219.940,00	-
Lembaga	190.000.000,00	209.219.940,00	-
Rumah ibadah Agama Katolik yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan	250.000.000,00	1.000.000.000,00	20
Lembaga	250.000.000,00	1.000.000.000,00	20
Rumah Ibadah agama Kristen yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan	150.000.000,00	80.000.000,00	20
Lembaga	150.000.000,00	80.000.000,00	20
SMAK yang mendapat Bantuan pendidikan karakter dan kewarganegaraan	38.150.000,00	110.750.000,00	11
Lembaga	38.150.000,00	110.750.000,00	11
Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	804.250.000,00	2.021.118.400,00	6.139
Siswa beragama katolik pada sekolah umum yang mendapat pembinaan keagamaan	804.250.000,00	2.021.118.400,00	6.139
Orang	804.250.000,00	2.021.118.400,00	6.139
Bantuan Peralatan / Sarana	164.200.000,00	402.480.000,00	102.371
Kitab suci dan sarana peribadatan Agama Katolik yang disediakan	114.200.000,00	342.480.000,00	1.860
unit	114.200.000,00	342.480.000,00	1.860
Kitab Suci dan Sarana Peribadatan agama Kristen yang disediakan	50.000.000,00	60.000.000,00	100.511
unit	50.000.000,00	60.000.000,00	100.511
Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1.498.560.000,00	1.349.564.112,00	681
Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama dan Moderasi Beragama Islam	396.200.000,00	330.437.552,00	-
Kelompok Masyarakat	396.200.000,00	330.437.552,00	-
Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama dan moderasi beragama Katolik	112.500.000,00	154.465.000,00	540
Kelompok Masyarakat	112.500.000,00	154.465.000,00	540
Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama dan Moderasi Beragama Kristen	60.000.000,00	59.770.000,00	100
Kelompok Masyarakat	60.000.000,00	59.770.000,00	100
Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha dan Moderasi Beragama Buddha	79.860.000,00	121.242.000,00	16
Kelompok Masyarakat	79.860.000,00	121.242.000,00	16
Kelompok Kategorial Katolik yang diberikan Fasilitasi dan Pembinaan	65.000.000,00	325.000.000,00	25
Kelompok Masyarakat	65.000.000,00	325.000.000,00	25
Kelompok Masyarakat yang diberdayakan Melalui Zakat, Wakaf dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	595.000.000,00	92.726.560,00	-
Kelompok Masyarakat	595.000.000,00	92.726.560,00	-
Konflik Intra Umat Beragama Islam yang ditindaklanjuti	190.000.000,00	265.923.000,00	-
Kelompok Masyarakat	190.000.000,00	265.923.000,00	-
Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	1.865.349.000,00	2.356.319.688,00	3.688
Bimbingan Keluarga Hitta Sukkhaya	78.000.000,00	162.000.000,00	396
Keluarga	78.000.000,00	162.000.000,00	396
Bimbingan Keluarga Kristiani	112.500.000,00	80.000.000,00	188
Keluarga	112.500.000,00	80.000.000,00	188
Keluarga Islam yang Memperoleh Bimbingan Perkawinan dan Keluarga Sakinah	1.424.840.000,00	1.603.059.688,00	2.640
Keluarga	1.424.840.000,00	1.603.059.688,00	2.640
Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia	250.000.000,00	511.260.000,00	464
Keluarga	250.000.000,00	511.260.000,00	464
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2.221.566.000,00	6.277.623.160,00	351
Forum Kerukunan Umat Beragama Yang Terfasilitasi	970.000.000,00	2.960.000.000,00	60
Lembaga	970.000.000,00	2.960.000.000,00	60
Lembaga Keagamaan Buddha yang Dibina	88.150.000,00	285.925.000,00	75



NAMA KEMENTERIAN - PRIORITAS NASIONAL - OUTPUT - SUBOUTPUT - SATUAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REAL. FISIK
Lembaga	88.150.000,00	285.925.000,00	75
Lembaga Keagamaan Kristen Yang Dibina	125.000.000,00	280.525.000,00	108
Lembaga	125.000.000,00	280.525.000,00	108
Lembaga Penyelenggara Ibadah Umrah yang Terbina	101.706.000,00	104.852.660,00	24
Lembaga	101.706.000,00	104.852.660,00	24
Lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina	394.000.000,00	307.130.500,00	16
Lembaga	394.000.000,00	307.130.500,00	16
Rumah Ibadah Agama Buddha yang Difasilitasi untuk Meningkatkan Layanan	542.710.000,00	2.339.190.000,00	68
Lembaga	542.710.000,00	2.339.190.000,00	68
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	28.296.769.000,00	33.070.024.088,00	62.014
Aktor Kerukunan Yang Berkualitas	350.080.000,00	174.398.600,00	125
Orang	350.080.000,00	174.398.600,00	125
Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama dan Moderasi Beragama Khonghucu	50.000.000,00	-	-
Orang	50.000.000,00	-	-
Jemaah Haji Reguler yang Terbina	304.009.000,00	443.514.900,00	6.907
Orang	304.009.000,00	443.514.900,00	6.907
Layanan Harmonisasi Kerukunan Umat Beragama	140.000.000,00	202.242.680,00	-
Orang	140.000.000,00	202.242.680,00	-
Penghulu yang Ditingkatkan Kompetensinya	495.000.000,00	205.561.258,00	65
Orang	495.000.000,00	205.561.258,00	65
Penyuluh Agama Buddha Non PNS Penerima Tunjangan	1.056.000.000,00	1.218.000.000,00	381
Orang	1.056.000.000,00	1.218.000.000,00	381
Penyuluh Agama Buddha yang Ditingkatkan Kompetensinya	107.710.000,00	491.545.000,00	468
Orang	107.710.000,00	491.545.000,00	468
Penyuluh Agama Hindu Non PNS Penerima Tunjangan	240.000.000,00	280.000.000,00	-
Orang	240.000.000,00	280.000.000,00	-
Penyuluh Agama Islam Non PNS Penerima Tunjangan	15.528.000.000,00	18.902.000.000,00	43.561
Orang	15.528.000.000,00	18.902.000.000,00	43.561
Penyuluh Agama Islam yang ditingkatkan Kompetensinya	860.000.000,00	519.504.000,00	714
Orang	860.000.000,00	519.504.000,00	714
Penyuluh Agama Katolik Non PNS Penerima Tunjangan	6.096.000.000,00	6.519.000.000,00	1.091
Orang	6.096.000.000,00	6.519.000.000,00	1.091
Penyuluh Agama Katolik yang ditingkatkan kompetensinya	175.000.000,00	393.879.400,00	1.614
Orang	175.000.000,00	393.879.400,00	1.614
Penyuluh Agama Khonghucu Non PNS Penerima Tunjangan	120.000.000,00	140.000.000,00	-
Orang	120.000.000,00	140.000.000,00	-
Penyuluh Agama Kristen Non PNS Penerima Tunjangan	2.520.000.000,00	2.776.000.000,00	720
Orang	2.520.000.000,00	2.776.000.000,00	720
Penyuluh Agama Kristen yang ditingkatkan kompetensinya	105.000.000,00	236.090.000,00	702
Orang	105.000.000,00	236.090.000,00	702
Petugas Haji yang Profesional	149.970.000,00	568.288.250,00	5.665
Orang	149.970.000,00	568.288.250,00	5.665
Komunikasi Publik	489.000.000,00	328.036.000,00	8
Layanan Syariah dan Hisab Rukyat	489.000.000,00	328.036.000,00	8
layanan	489.000.000,00	328.036.000,00	8
Konferensi dan Event	1.026.000.000,00	496.496.200,00	73
Event Keagamaan dan Seni Budaya bernafaskan Agama Islam	750.000.000,00	128.496.200,00	18
Kegiatan	750.000.000,00	128.496.200,00	18
Event Keagamaan dan seni budaya bernafaskan agama Katolik	26.000.000,00	8.000.000,00	16
Kegiatan	26.000.000,00	8.000.000,00	16
Event Keagamaan dan Seni Budaya Bernafaskan Agama Kristen	250.000.000,00	360.000.000,00	39
Kegiatan	250.000.000,00	360.000.000,00	39
Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat	278.000.000,00	87.940.000,00	1
Layanan Advokasi Aset Wakaf	278.000.000,00	87.940.000,00	1
Kelompok Masyarakat	278.000.000,00	87.940.000,00	1
Pelayanan Publik kepada lembaga	85.000.000,00	106.911.496,00	-
Perpustakaan Masjid yang dibina	85.000.000,00	106.911.496,00	-
Lembaga	85.000.000,00	106.911.496,00	-
Pelayanan Publik kepada masyarakat	4.513.456.000,00	6.684.557.968,00	9.806
Layanan Administrasi Haji Dalam Negeri	294.950.000,00	412.591.800,00	7.933
Orang	294.950.000,00	412.591.800,00	7.933
Layanan Nikah dan Rujuk	4.218.506.000,00	6.271.966.168,00	1.873
Orang	4.218.506.000,00	6.271.966.168,00	1.873
Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	9.954.330.000,00	2.436.094.150,00	13
KUA yang direvitalisasi	794.330.000,00	490.716.450,00	4
Lembaga	794.330.000,00	490.716.450,00	4
KUA yang ditingkatkan sarana dan prasarana	9.110.000.000,00	1.945.377.700,00	9
Lembaga	9.110.000.000,00	1.945.377.700,00	9
Pusat Observasi Bulan yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya	50.000.000,00	-	-
Lembaga	50.000.000,00	-	-
Sosialisasi dan Diseminasi	763.500.000,00	687.570.842,00	779
Mahasiswa Katolik yang mendapat pendidikan karakter dan kewarganegaraan	600.000.000,00	401.695.842,00	169
Orang	600.000.000,00	401.695.842,00	169
Siswa Agama Buddha yang Mendapat Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan	163.500.000,00	285.875.000,00	610
Orang	163.500.000,00	285.875.000,00	610
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, Riset, dan TEKNOLOGI	52.554.727.000,00	21.943.935.222,00	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	45.055.858.000,00	19.589.822.894,00	5.647
Bantuan Lembaga	1.746.000.000,00	-	-
Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi untuk Menyelenggarakan PPG (Revitalisasi LPTK)	1.746.000.000,00	-	-
Lembaga	1.746.000.000,00	-	-
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	11.046.304.000,00	2.188.189.974,00	5.647
Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	9.887.359.000,00	2.188.189.974,00	5.447
Lembaga	9.887.359.000,00	2.188.189.974,00	5.447
Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	1.158.945.000,00	-	200
Lembaga	1.158.945.000,00	-	200
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	7.036.466.000,00	2.104.995.310,00	-
Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran	7.036.466.000,00	2.104.995.310,00	-
Orang	7.036.466.000,00	2.104.995.310,00	-
Pelatihan Bidang Pendidikan	25.227.088.000,00	15.296.637.610,00	-
Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi	705.244.000,00	382.017.002,00	-
Orang	705.244.000,00	382.017.002,00	-
Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru	24.521.844.000,00	14.914.620.608,00	-
Orang	24.521.844.000,00	14.914.620.608,00	-
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7.498.869.000,00	2.354.112.328,00	1.200
Data dan Informasi Publik	850.643.000,00	165.426.400,00	1
Data dan Informasi Warisan Budaya	708.364.000,00	-	-
layanan	708.364.000,00	-	-
Produk Kodifikasi Bahasa	142.279.000,00	165.426.400,00	1
dokumen	142.279.000,00	165.426.400,00	1
Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	457.008.000,00	-	-
Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya	457.008.000,00	-	-
Kelompok Masyarakat	457.008.000,00	-	-
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	105.000.000,00	52.800.000,00	26



KAJIAN FISKAL REGIONAL

Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2023



NAMA KEMENTERIAN - PRIORITAS NASIONAL - OUTPUT - SUBOUTPUT - SATUAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REAL. FISIK
Lembaga Terfasilitasi Program BIPA	105.000.000,00	52.800.000,00	26
Lembaga	105.000.000,00	52.800.000,00	26
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1.575.125.000,00	2.045.499.928,00	1.172
Generasi muda terbina program literasi	502.326.000,00	87.218.400,00	78
Orang	502.326.000,00	87.218.400,00	78
Partisipan perlindungan bahasa dan sastra	80.000.000,00	188.560.000,00	76
Orang	80.000.000,00	188.560.000,00	76
Penutur bahasa terbina	891.071.000,00	1.651.727.528,00	975
Orang	891.071.000,00	1.651.727.528,00	975
Penutur bahasa teruji	101.728.000,00	117.994.000,00	43
Orang	101.728.000,00	117.994.000,00	43
Konferensi dan Event	2.801.183.000,00	28.844.000,00	1
Giati Warisan Budaya	2.801.183.000,00	28.844.000,00	1
Kegiatan	2.801.183.000,00	28.844.000,00	1
OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	1.709.910.000,00	61.542.000,00	1
Cagar Budaya, ODCB dan OPK Yang Dilestarikan unit	1.709.910.000,00	61.542.000,00	1
Grand Total	225.023.161.000,00	213.738.894.038,00	

Sumber: Sistem Informasi Terpadu Pelaksanaan Anggaran (SINTESA)
Status data terakhir s.d. 30 Juni 2023

Capaian Output Bidang Kesehatan Triwulan II Tahun 2023

NAMA KEMENTERIAN - PRIORITAS NASIONAL - OUTPUT - SUBOUTPUT - SATUAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REAL. FISIK
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)	26.909.872.000,00	25.523.170.718,00	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	26.528.871.000,00	25.443.424.896,00	72.626
Bantuan Lembaga	2.033.306.000,00	4.034.344.700,00	600
Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	2.033.306.000,00	4.034.344.700,00	600
Lembaga	2.033.306.000,00	4.034.344.700,00	600
Data dan Informasi Publik	4.009.197.000,00	98.234.526,00	-
Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)	3.155.337.000,00	98.234.526,00	-
layanan	3.155.337.000,00	98.234.526,00	-
Penguatan kualitas dan sistem data keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan stunting	119.880.000,00	-	-
layanan	119.880.000,00	-	-
verifikasi dan validasi data keluarga sasaran konvergensi di 12 provinsi	733.880.000,00	-	-
layanan	733.880.000,00	-	-
Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	3.389.010.000,00	872.079.270,00	1.102
Kelompok BK yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam pendukung percepatan penurunan stunting	1.294.782.000,00	-	-
Kelompok Masyarakat	1.294.782.000,00	-	-
Kelompok BK yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	326.800.000,00	306.348.660,00	243
Kelompok Masyarakat	326.800.000,00	306.348.660,00	243
PK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1.167.569.000,00	530.582.010,00	794
Kelompok Masyarakat	1.167.569.000,00	530.582.010,00	794
Rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di kampung KB	599.859.000,00	35.148.600,00	65
Kelompok Masyarakat	599.859.000,00	35.148.600,00	65
Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	524.108.000,00	262.518.368,00	27.975
Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK	524.108.000,00	262.518.368,00	27.975
Keluarga	524.108.000,00	262.518.368,00	27.975
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	222.013.000,00	428.627.450,00	745
Faskes yang mendapatkan Intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting dan mendukung penurunan AKI	222.013.000,00	428.627.450,00	745
Lembaga	222.013.000,00	428.627.450,00	745
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	328.000.000,00	438.656.760,00	7.959
Remaja usia 15-19 tahun yang mendapatkan edukasi gizi dan anemia dalam mendukung percepatan penurunan stunting	328.000.000,00	438.656.760,00	7.959
Orang	328.000.000,00	438.656.760,00	7.959
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	2.275.100.000,00	1.189.937.000,00	34
Bimbingan teknis intensifikasi dan Ekstensifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)	496.000.000,00	118.977.000,00	1
Daerah (Prov/Kab/Kota)	496.000.000,00	118.977.000,00	1
Fasilitasi dan koordinasi pendampingan perguruan tinggi/mahasiswa kepada pemda pemprov kab/kota	580.500.000,00	53.800.000,00	-
Kab/Kota	580.500.000,00	53.800.000,00	-
Pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan stunting	585.500.000,00	183.955.000,00	14
Daerah (Prov/Kab/Kota)	585.500.000,00	183.955.000,00	14
Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan	271.600.000,00	796.381.000,00	18
Kab/Kota	271.600.000,00	796.381.000,00	18
Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi pengembangan DASHAT di Kampung KB pada 12 provinsi prioritas	341.500.000,00	27.824.000,00	1
Kab/Kota	341.500.000,00	27.824.000,00	1
Kebijakan Bidang Kesehatan	150.000.000,00	-	-
Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi	150.000.000,00	-	-
Rekomendasi Kebijakan	150.000.000,00	-	-
Komunikasi Publik	3.975.000.000,00	4.892.830.840,00	6
Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota	3.975.000.000,00	4.892.830.840,00	6
layanan	3.975.000.000,00	4.892.830.840,00	6
Koordinasi	3.373.080.000,00	3.343.893.570,00	24
Kegiatan penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Provinsi	687.470.000,00	1.042.827.480,00	4
kegiatan	687.470.000,00	1.042.827.480,00	4
Penyelenggaraan koordinasi intensifikasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota pada 12 Provinsi prioritas	693.000.000,00	228.119.306,00	7
kegiatan	693.000.000,00	228.119.306,00	7
Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	1.992.610.000,00	2.072.946.784,00	13
kegiatan	1.992.610.000,00	2.072.946.784,00	13
Pelatihan Bidang Kesehatan	5.860.843.000,00	9.136.437.200,00	34.174
Pelatihan bagi pelaksana PPKS dalam percepatan penurunan stunting	1.042.796.000,00	5.586.300,00	-
Orang	1.042.796.000,00	5.586.300,00	-
Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	4.818.047.000,00	9.130.850.900,00	34.174
Orang	4.818.047.000,00	9.130.850.900,00	34.174
Pelayanan Publik Lainnya	131.250.000,00	260.968.783,00	3
Layanan Humas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi	131.250.000,00	260.968.783,00	3
layanan	131.250.000,00	260.968.783,00	3
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	200.000.000,00	430.770.229,00	3
Laporan Monitoring dan evaluasi TPkTPPS SATGAS percepatan penurunan stunting provinsi kab/kota	200.000.000,00	430.770.229,00	3
Laporan	200.000.000,00	430.770.229,00	3
Pengawasan dan Pengendalian Layanan	57.964.000,00	68.126.000,00	1
Layanan Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting tk provinsi	57.964.000,00	68.126.000,00	1
layanan	57.964.000,00	68.126.000,00	1
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	381.001.000,00	74.746.022,00	14
Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	381.001.000,00	74.746.022,00	14
Kelompok UPPKA di Kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	381.001.000,00	74.746.022,00	14
Kelompok Masyarakat	381.001.000,00	74.746.022,00	14
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	12.652.204.000,00	13.702.732.691,00	
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	110.540.000,00	130.478.000,00	60
Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	110.540.000,00	130.478.000,00	60
UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	110.540.000,00	130.478.000,00	60
UMKM	110.540.000,00	130.478.000,00	60
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	12.541.664.000,00	13.572.254.691,00	33.674
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.515.942.000,00	805.552.210,00	55
Desa Pangan Aman	836.366.000,00	432.308.490,00	6
Lembaga	836.366.000,00	432.308.490,00	6
Pasar aman dari bahan berbahaya	185.998.000,00	106.884.320,00	9
Lembaga	185.998.000,00	106.884.320,00	9
Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PIAS) aman	493.579.000,00	266.359.400,00	40
Lembaga	493.579.000,00	266.359.400,00	40
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	4.669.725.000,00	8.551.927.925,00	28.495
KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	4.669.725.000,00	8.551.927.925,00	28.495
Orang	4.669.725.000,00	8.551.927.925,00	28.495
Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	988.812.000,00	866.872.520,00	1.671



NAMA KEMENTERIAN - PRIORITAS NASIONAL - OUTPUT - SUBOUTPUT - SATUAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REAL FISK
Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	898.636.000,00	828.824.720,00	1.527
Lembaga	898.636.000,00	828.824.720,00	1.527
Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	90.176.000,00	38.047.800,00	144
Lembaga	90.176.000,00	38.047.800,00	144
Pengawasan dan Pengendalian Produk	1.609.413.000,00	1.143.355.919,00	3.435
Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	512.778.000,00	248.668.402,00	982
Produk	512.778.000,00	248.668.402,00	982
Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1.043.936.000,00	864.171.917,00	2.277
Produk	1.043.936.000,00	864.171.917,00	2.277
Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	52.699.000,00	30.515.600,00	176
Produk	52.699.000,00	30.515.600,00	176
Perkara Hukum Badan Usaha	795.984.000,00	743.563.410,00	14
PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK	707.875.000,00	706.873.510,00	14
Perkara	707.875.000,00	706.873.510,00	14
PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SANGGAU	88.109.000,00	36.689.900,00	-
Perkara	88.109.000,00	36.689.900,00	-
Sarana Bidang Kesehatan	701.900.000,00	33.902.372,00	1
Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	701.900.000,00	33.902.372,00	1
Paket	701.900.000,00	33.902.372,00	1
Standarisasi Lembaga	2.259.887.000,00	1.427.080.335,00	3
Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	2.259.887.000,00	1.427.080.335,00	3
Lembaga	2.259.887.000,00	1.427.080.335,00	3
KEMENTERIAN KESEHATAN	17.391.335.000,00	7.587.667.101,00	
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	200.000.000,00	-	-
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	200.000.000,00	-	-
Pengembangan Telemedicine (Dekonsentrasi) (LR)	200.000.000,00	-	-
Provinsi	200.000.000,00	-	-
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	17.191.335.000,00	7.587.667.101,00	3.451
Bantuan Pendidikan Tinggi	1.045.700.000,00	1.974.400.000,00	76
Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK (SDM)	1.045.700.000,00	1.974.400.000,00	76
Orang	1.045.700.000,00	1.974.400.000,00	76
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	3.650.711.000,00	302.064.644,00	8
Bimtek, money, Pembinaan Pelaksanaan Imunisasi	302.064.644,00	-	-
Daerah(Prov/Kab/Kota)	302.064.644,00	-	-
Daerah yang Dibina Kesehatan Usia Produktif dan Lansia (LP)	239.709.000,00	-	-
Provinsi	239.709.000,00	-	-
Dukungan peningkatan Mutu, Akreditasi, Keselamatan pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dekonsentrasi) (LR)	1.285.082.000,00	138.144.859,00	1
Daerah(Prov/Kab/Kota)	1.285.082.000,00	138.144.859,00	1
Fasilitasi dan pembinaan Dinkes Kab/Kota terkait BLUD Puskesmas	264.065.000,00	-	-
Daerah(Prov/Kab/Kota)	264.065.000,00	-	-
Fasilitasi, Monitoring Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	403.337.000,00	-	-
Daerah(Prov/Kab/Kota)	403.337.000,00	-	-
Fasilitasi, monitoring pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	60.900.000,00	-	-
Kab/Kota	60.900.000,00	-	-
Fasilitasi, Monitoring Surveilans dan Respon KLB/Wabah	206.520.000,00	-	-
Daerah(Prov/Kab/Kota)	206.520.000,00	-	-
Kab/kota yang dibina dalam pemenuhan kualitas kesehatan lingkungan	215.000.000,00	-	-
Daerah(Prov/Kab/Kota)	215.000.000,00	-	-
Pembinaan Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi Posyandu (LP)	467.782.000,00	-	-
Daerah(Prov/Kab/Kota)	467.782.000,00	-	-
Pembinaan Pemerintah Daerah dalam rangka gemas diberbagai tatanan (LP)	205.456.000,00	163.919.785,00	7
Daerah(Prov/Kab/Kota)	205.456.000,00	163.919.785,00	7
Koordinasi	419.598.000,00	371.413.065,00	19
Koordinasi Manajemen Puskesmas dalam Penguatan Integrasi Layanan Primer (LP)	33.000.000,00	-	-
kegiatan	33.000.000,00	-	-
Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah (HS)	386.598.000,00	371.413.065,00	19
kegiatan	386.598.000,00	371.413.065,00	19
Layanan Manajemen SDM Internal	83.033.000,00	8.400.000,00	7
Pelatihan kesehatan (HS)	83.033.000,00	8.400.000,00	7
Orang	83.033.000,00	8.400.000,00	7
Pelatihan Bidang Kesehatan	7.788.499.000,00	1.774.303.540,00	112
Orientasi Komunikasi Antar Pribadi (KAP) Tk. Provinsi (LP)	320.173.000,00	807.480.500,00	15
Orang	320.173.000,00	807.480.500,00	15
Orientasi Strategi Komunikasi Berbasis Human-Centered Design (HCD) Tingkat Provinsi	170.188.000,00	-	-
Orang	170.188.000,00	-	-
Pelatihan 9 Penyakit Prioritas (SDM)	390.188.000,00	176.554.600,00	4
Orang	390.188.000,00	176.554.600,00	4
Pelatihan Imunisasi	182.340.000,00	-	-
Orang	182.340.000,00	-	-
Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	1.088.897.000,00	-	-
Orang	1.088.897.000,00	-	-
Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1.011.290.000,00	-	-
Orang	1.011.290.000,00	-	-
Pelatihan Surveilans dan Respon KLB/ Wabah	114.480.000,00	-	-
Orang	114.480.000,00	-	-
Pelatihan Surveilans Epidemiology (SDM)	1.268.604.000,00	387.540.000,00	4
Orang	1.268.604.000,00	387.540.000,00	4
Peningkatan Kapasitas Koordinator Pesantren Sehat di provinsi dan kab/kota (LP)	204.346.000,00	-	-
Orang	204.346.000,00	-	-
Tenaga Kesehatan yang dilatih terkait Manajemen Laboratorium Kesehatan Masyarakat (LP)	2.067.571.000,00	402.728.440,00	89
Orang	2.067.571.000,00	402.728.440,00	89
Tenaga Kesehatan yang diorientasi terkait Integrasi Layanan Primer (LP)	172.412.000,00	-	-
Orang	172.412.000,00	-	-
Tenaga Kesehatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Tatalaksana Program Kesehatan Jiwa (LP)	348.710.000,00	-	-
Orang	348.710.000,00	-	-
Workshop Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Catin dan KB (LP)	449.300.000,00	-	-
Orang	449.300.000,00	-	-
Pelayanan Publik kepada masyarakat	375.450.000,00	207.549.300,00	832
Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandar/lintas batas (HS)	320.350.000,00	207.549.300,00	832
Orang	320.350.000,00	207.549.300,00	832
Pelayanan kesehatan haji (HS)	55.100.000,00	-	-
Orang	55.100.000,00	-	-
Pelayanan Publik Lainnya	2.611.300.000,00	2.325.184.850,00	2.273
Layanan Kegawatdaruratan dan rujukan katagori II (HS)	4.450.000,00	-	-
layanan	4.450.000,00	-	-
layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut (HS)	1.085.638.000,00	625.014.100,00	135
layanan	1.085.638.000,00	625.014.100,00	135
Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (HS)	30.600.000,00	14.731.600,00	7
layanan	30.600.000,00	14.731.600,00	7
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD (HS)	38.216.000,00	23.775.000,00	26
layanan	38.216.000,00	23.775.000,00	26
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara (HS)	100.800.000,00	88.800.000,00	111
layanan	100.800.000,00	88.800.000,00	111
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan (HS)	368.400.000,00	364.800.000,00	609
layanan	368.400.000,00	364.800.000,00	609
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di PLBN (HS)	464.000.000,00	709.700.000,00	887
layanan	464.000.000,00	709.700.000,00	887
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare (HS)	17.121.000,00	13.125.000,00	37
layanan	17.121.000,00	13.125.000,00	37
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus (HS)	135.315.000,00	224.750.000,00	154
layanan	135.315.000,00	224.750.000,00	154
Layanan survei faktor risiko penyakit DBD (HS)	39.040.000,00	30.550.000,00	102
layanan	39.040.000,00	30.550.000,00	102
Layanan survei faktor risiko penyakit diare (HS)	23.360.000,00	19.352.000,00	65
layanan	23.360.000,00	19.352.000,00	65
Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS (HS)	6.370.000,00	4.494.450,00	9
layanan	6.370.000,00	4.494.450,00	9
Layanan survei faktor risiko penyakit malaria (HS)	51.680.000,00	53.258.000,00	49
layanan	51.680.000,00	53.258.000,00	49
Layanan survei faktor risiko penyakit pes (HS)	230.065.000,00	124.557.300,00	74
layanan	230.065.000,00	124.557.300,00	74
Layanan survei faktor risiko penyakit TB (HS)	16.245.000,00	28.277.400,00	8
layanan	16.245.000,00	28.277.400,00	8
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	63.296.000,00	-	-
Pemantauan dan Monev Pelaksanaan Kegiatan Integrasi Layanan Primer (LP)	41.080.000,00	-	-
Laporan	41.080.000,00	-	-
Pemantauan dan Monev Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (LP)	22.216.000,00	-	-
Laporan	22.216.000,00	-	-



KAJIAN FISKAL REGIONAL

Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2023



NAMA KEMENTERIAN - PRIORITAS NASIONAL - OUTPUT - SUBOUTPUT - SATUAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REAL. FISIK
Sarana Bidang Kesehatan	1.146.548.000,00	613.551.702,00	34
Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (HS)	1.146.548.000,00	613.551.702,00	34
Paket	1.146.548.000,00	613.551.702,00	34
Sosialisasi dan Diseminasi	7.200.000,00	10.800.000,00	90
Sosialisasi dan Diseminasi (HS)	7.200.000,00	10.800.000,00	90
Orang	7.200.000,00	10.800.000,00	90
Grand Total	56.953.411.000,00	46.813.570.510,00	

Sumber: Sistem Informasi Terpadu Pelaksanaan Anggaran (SINTESA)
Status data terakhir s.d. 30 Juni 2023

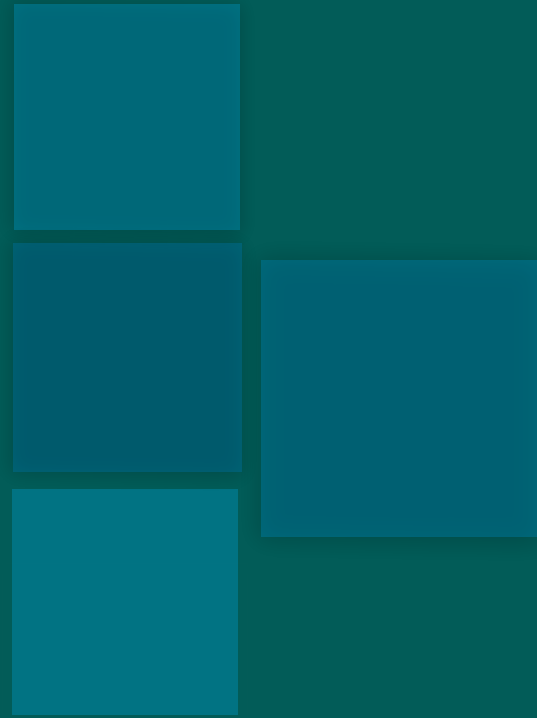
Capaian Output Bidang Infrastruktur Triwulan II Tahun 2023

NAMA KEMENTERIAN - PRIORITAS NASIONAL - OUTPUT - SUBOUTPUT - SATUAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REAL. FISIK
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1.660.101.911.000,00	1.528.341.865.722,00	
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1.411.137.978.000,00	1.238.427.644.489,00	35,429
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1.288.272.000,00	1.720.491.136,00	46
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi Daerah(Prov/Kab/Kota)	659.730.000,00	922.109.456,00	-
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM Daerah(Prov/Kab/Kota)	561.020.000,00	736.215.160,00	46
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan Daerah(Prov/Kab/Kota)	67.522.000,00	62.166.520,00	-
OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	166.016.278.000,00	66.510.925.513,00	119
Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	32.830.092.000,00	18.189.876.000,00	8
Km	32.830.092.000,00	18.189.876.000,00	8
Jalan Strategis (ProPN)	131.575.000.000,00	46.661.682.006,00	6
Km	131.575.000.000,00	46.661.682.006,00	6
Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	1.611.186.000,00	1.659.367.507,00	105
Km	1.611.186.000,00	1.659.367.507,00	105
OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	132.288.000,00	72.705.808,00	574
Preservasi Rutin Jembatan	132.288.000,00	72.705.808,00	574
m	132.288.000,00	72.705.808,00	574
Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	362.530.826.000,00	250.028.777.084,00	21
Pembangunan Jalan Strategis (ProPN)	362.530.826.000,00	250.028.777.084,00	21
Km	362.530.826.000,00	250.028.777.084,00	21
Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	330.128.389.000,00	74.139.269.137,00	1.035
Pembangunan Jembatan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	177.609.117.000,00	60.798.837.920,00	907
m	177.609.117.000,00	60.798.837.920,00	907
Pembangunan Jembatan Kawasan Prioritas (ProPN)	36.848.908.000,00	2.015.172.000,00	101
m	36.848.908.000,00	2.015.172.000,00	101
Pembangunan Jembatan Strategis (ProPN)	115.670.364.000,00	11.325.259.217,00	27
m	115.670.364.000,00	11.325.259.217,00	27
Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	465.875.613.000,00	827.879.672.287,00	33,633
Bantuan PSU Bidang Perumahan	9.600.000.000,00	935.243.232,00	100
Unit	9.600.000.000,00	935.243.232,00	100
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	174.619.556.000,00	549.022.627.890,00	26,753
Unit	174.619.556.000,00	549.022.627.890,00	26,753
Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat	18.373.717.000,00	17.464.423.500,00	3,563
SR	18.373.717.000,00	17.464.423.500,00	3,563
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perkotaan	3.408.366.000,00	6.137.468.300,00	1
Hektar	3.408.366.000,00	6.137.468.300,00	1
Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota	57.131.200.000,00	28.189.102.650,00	6
Liter/detik	57.131.200.000,00	28.189.102.650,00	6
Pemugaran Permukiman Kumuh	3.000.000.000,00	-	-
Hektar	3.000.000.000,00	-	-
Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota	72.842.128.000,00	136.719.497.130,00	123
Liter/detik	72.842.128.000,00	136.719.497.130,00	123
Perluasan SPAM Kabupaten/Kota	9.841.900.000,00	20.816.859.200,00	381
SR	9.841.900.000,00	20.816.859.200,00	381
Rumah Khusus	1.742.412.000,00	226.731.000,00	-
Unit	1.742.412.000,00	226.731.000,00	-
Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI	32.889.568.000,00	11.155.208.460,00	20
Unit	32.889.568.000,00	11.155.208.460,00	20
Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja	245.000.000,00	92.700.000,00	-
Unit	245.000.000,00	92.700.000,00	-
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	47.579.010.000,00	48.039.780.000,00	2,325
KK	47.579.010.000,00	48.039.780.000,00	2,325
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Komunal	23.256.756.000,00	8.486.748.925,00	157
KK	23.256.756.000,00	8.486.748.925,00	157
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	11.346.000.000,00	593.282.000,00	204
KK	11.346.000.000,00	593.282.000,00	204
Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	18.173.612.000,00	6.640.282.760,00	-
Prasarana Air Baku Penapat yang dibangun	18.173.612.000,00	6.640.282.760,00	-
Unit	18.173.612.000,00	6.640.282.760,00	-
Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	66.992.700.000,00	11.435.520.764,00	0
Bangunan Pengaman Pantai di Kabupaten Sambas yang Dibangun (Tahap II)	66.992.700.000,00	11.435.520.764,00	0
Km	66.992.700.000,00	11.435.520.764,00	0
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	22.976.000.000,00	14.772.169.525,00	-
Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	22.976.000.000,00	14.772.169.525,00	-
Penataan Bangunan Kawasan Cagar Budaya dan Permukiman Tradisional	1.100.000.000,00	1.538.847.442,00	-
Unit	1.100.000.000,00	1.538.847.442,00	-
Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya dan Istana	21.876.000.000,00	13.233.322.083,00	-
Unit	21.876.000.000,00	13.233.322.083,00	-
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	36.513.225.000,00	2.837.417.674,00	-
Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	36.513.225.000,00	2.837.417.674,00	-
Penataan Bangunan Kawasan Pos Lintas Batas Negara	36.513.225.000,00	2.837.417.674,00	-
Unit	36.513.225.000,00	2.837.417.674,00	-
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	189.474.708.000,00	272.304.634.034,00	179
Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	189.474.708.000,00	272.304.634.034,00	179
Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah	189.474.708.000,00	272.304.634.034,00	179
Unit	189.474.708.000,00	272.304.634.034,00	179
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	347.447.459.000,00	376.149.355.645,00	
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	336.621.908.000,00	375.951.013.645,00	3,986
Pelatihan Bidang Infrastruktur	6.780.000.000,00	7.081.342.960,00	3,915
Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	6.780.000.000,00	7.081.342.960,00	3,915
Orang	6.780.000.000,00	7.081.342.960,00	3,915
Pelayanan Publik Lainnya	42.082.765.000,00	39.817.516.880,00	59
Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	4.137.163.000,00	464.554.000,00	27
layanan	4.137.163.000,00	464.554.000,00	27



NAMA KEMENTERIAN - PRIORITAS NASIONAL - OUTPUT - SUBOUTPUT - SATUAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REAL. FISIK
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)	21.011.247.000,00	39.352.962.880,00	18
layanan	21.011.247.000,00	39.352.962.880,00	18
Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional)	16.934.355.000,00	-	14
layanan	16.934.355.000,00	-	14
Prasarana Bidang Konektivitas Darat	25.000.000.000,00	-	-
Pembangunan Terminal Barang Internasional Aruk Kalbar Tahap V (Termasuk Supervisi)	25.000.000.000,00	-	-
Unit	25.000.000.000,00	-	-
Prasarana Bidang Konektivitas Laut	42.200.000.000,00	71.038.491.600,00	5
Pengembangan Pelabuhan Kendawangan	42.200.000.000,00	71.038.491.600,00	5
Unit	42.200.000.000,00	71.038.491.600,00	5
Prasarana Bidang Konektivitas Udara	155.162.723.000,00	191.597.910.805,00	-
Pembangunan Bandar Udara Tebelian - PN	7.000.000.000,00	-	-
Unit	7.000.000.000,00	-	-
Pembangunan Bandar Udara Baru Singkawang, Kalimantan Barat	148.162.723.000,00	191.597.910.805,00	-
Unit	148.162.723.000,00	191.597.910.805,00	-
Promosi	300.000.000,00	-	-
Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	300.000.000,00	-	-
promosi	300.000.000,00	-	-
Sarana Bidang Konektivitas Darat	65.096.420.000,00	66.415.751.400,00	7
Perengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	65.096.420.000,00	66.415.751.400,00	7
Unit	65.096.420.000,00	66.415.751.400,00	7
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	10.825.551.000,00	198.342.000,00	0
Sarana Bidang Pendidikan	10.825.551.000,00	198.342.000,00	0
Sarana Penunjang Diklat Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	10.825.551.000,00	198.342.000,00	0
Paket	10.825.551.000,00	198.342.000,00	0
Grand Total	2.007.549.370.000,00	1.904.491.221.367,00	

Sumber: Sistem Informasi Terpadu Pelaksanaan Anggaran (SINTESA)
 Status data terakhir s.d. 30 Juni 2023



**KANTOR WILAYAH
DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan K.S. Tubun No. 36, Kota Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat, 78121